

## Kata Pengantar

Manusia hidup dalam suasana ketidakpastian, di mana masa depan tidak dapat diketahui secara pasti. Meskipun demikian, pengetahuan mengenai prediksi kejadian di masa depan akan dapat dijadikan pegangan ataupun panduan proses pengambilan keputusan bagi individu. Buku yang berjudul "Prognosa Ekonomi Indonesia dan Jawa Barat Tahun 2007" ditulis dengan tujuan utama untuk menjadi bahan referensi bagi individu-individu ataupun perusahaan-perusahaan yang memerlukan estimasi besaran-besaran makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun mendatang.

Dalam melakukan estimasi alat analisis utama yang dipakai adalah deskriptif analitis yang digabungkan dengan focus group discussion serta metode kuantitatif. Data historis dijadikan acuan dalam memproyeksi besaran makro di kuartal atau tahun mendatang.

Sebagaimana layaknya suatu kegiatan, buku ini tidak akan terwujud tanpa peran serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penyelesaian penulisan serta pemaparan buku ini. Untuk itu tim penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan penulisan buku ini, diantaranya yaitu:

1. Pemda Provinsi Jawa Barat
2. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
3. PT. Bank Jabar
4. PT. Pupuk Kujang
5. PT. Pupuk Sriwijaya
6. Bank Tabungan Negara
7. Bapak Dr. Freddy Danny, Ir, SE, ME

Di luar nama-nama tersebut di atas, terdapat beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah turut membantu terlaksananya kegiatan penulisan ini. Selain itu secara khusus kami sampaikan apresiasi kepada para *book reviewer* dan *editor content*.

Kesempurnaan adalah sesuatu yang niscaya. Meskipun terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini, upaya telah kami lakukan secara maksimal untuk meminimalisasinya.

Tim Penulis

# **Bab I.**

## **Pendahuluan**

### **1.1 OVERVIEW KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA**

#### **1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Indonesia mengalami sedikit perlambatan pada awal tahun 2006 yang lebih diakibatkan oleh adanya penyesuaian akibat peningkatan harga BBM pada tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan menjadi 4,7% (tahunan), turun dari 4,9% pada triwulan sebelumnya (lihat tabel 1). Namun demikian penurunan ini kemudian dikoreksi pada triwulan II-2006 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Tren peningkatan pertumbuhan ini terus berlanjut, dan pada triwulan III-2006 perekonomian Indonesia tumbuh 5.52%.

Dari sisi penawaran, seluruh sektor mencatat pertumbuhan yang positif. Struktur perekonomian Indonesia kembali berubah. Pada triwulan III-2006, pertumbuhan PDB dari sisi penawaran diwarnai oleh beberapa perubahan yang sangat kentara. Pertumbuhan PDB sangat dipengaruhi oleh kembali menggeliatnya sektor industri pengolahan. Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Kedua sektor tersebut masing-masing tumbuh sebesar 5.26% (dari 3.05%) dan 7.16% (dari 4.64%). Disisi lain, Sektor pertanian dan pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat drastis setelah pada dua triwulan sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua sektor ini hanya tumbuh sebesar 2.27% dan 1.03%. Angka-angka tersebut hampir sama dengan pertumbuhan kedua sektor tersebut pada tahun 2004. Ekspansi ekonomi Indonesia juga dipacu oleh terus meningkatnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi. Peningkatan ini didukung oleh perkembangan teknologi telekomunikasi dan transportasi yang sangat cepat.

Dari sisi permintaan, sisi konsumsi yang pada periode-periode sebelumnya selalu menjadi andalan kegiatan ekonomi, pada triwulan II-2006, konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan yang sangat drastis, terutama dari sisi konsumsi pemerintah. Tingkat konsumsi secara keseluruhan tumbuh sebesar 2.82% atau hanya tinggal setengah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 5.83%. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh penurunan pada sisi konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh sebesar 1.72% dari sebelumnya yang mencapai 31.38%. Selanjutnya konsumsi masyarakat memperlihatkan pertumbuhan tahunan yang tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya. Di sisi lain, investasi Indonesia belum memperlihatkan perkembangan yang baik. Investasi cenderung mengalami penurunan selama beberapa kuartal terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Komponen GDP Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
						Trw.1	Trw.2	Trw.3
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	3.83	4.38	4.72	5.05	5.60	4.70	5.22	5.52
- Tanpa Migas	5.11	5.09	5.62	5.99	6.48	5.36	5.66	6.06
- Migas	(5.30)	(1.25)	(2.88)	(3.52)	(3.26)	(2.33)	0.40	(0.63)
<b>Berdasarkan Lapangan Usaha</b>								
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	4.08	3.23	3.18	3.26	2.49	3.93	5.00	2.27
Pertambangan dan penggalian	0.33	1.00	(1.37)	(4.48)	1.59	3.65	5.43	1.03
Industri pengolahan Listrik, gas, dan air bersih	3.30	5.29	5.33	6.38	4.63	3.09	3.05	5.26
Bangunan	7.92	8.94	4.87	5.22	6.49	5.77	5.69	6.46
Perdagangan, hotel, dan restoran	4.58	5.48	6.10	7.49	7.34	7.15	8.26	8.36
Pengangkutan dan komunikasi	4.38	3.90	5.38	5.69	8.59	4.72	4.64	7.16
Keuangan, persewaan, dan jasa prs	8.10	8.39	12.19	13.38	12.97	11.03	13.29	13.50
Jasa-jasa	6.60	6.37	7.21	7.70	7.12	5.39	5.07	4.60
	3.24	3.75	4.41	4.85	5.16	5.44	5.86	6.96
<b>Berdasarkan Jenis Pengeluaran</b>								
Pengeluaran Konsumsi	3.88	4.74	4.55	4.86	4.41	3.88	5.83	2.82
-Rumah tangga	3.49	3.84	3.89	4.97	3.95	2.94	2.99	2.99
-Pemerintah	7.56	12.99	10.03	3.99	8.06	12.79	31.38	1.72
Pembentukan modal tetap Domestik bruto (PMTB)	6.49	4.69	0.60	14.58	9.93	0.90	(0.98)	(0.25)
Ekspor barang dan jasa	0.64	(1.22)	5.89	13.50	8.60	10.95	11.30	12.05
Impor barang dan jasa (-/-)	4.18	(4.25)	1.56	27.07	12.35	3.66	8.31	9.72

Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, ekspor Indonesia kembali memperlihatkan perbaikan dengan pertumbuhan yang terus meningkat pada triwulan kedua menjadi 5% dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar -1,58%. Secara tahunan pun, sektor ini kembali menjadi pemacu kegiatan ekonomi dengan tumbuh menjadi 11,3%. Selama kurun waktu Januari sampai September 2006 ekspor mengalami kenaikan sebesar 17,17% dari nilai ekspor selama kurun waktu yang sama pada tahun 2005. Peningkatan nilai ekspor ini sejalan dengan tingginya harga komoditas, khususnya pada komoditas pertanian dan pertambangan seperti batu bara, kelapa sawit dan karet. Selain itu, hal ini juga didukung oleh masih kondusifnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia (BI, 2006). Atau dengan kata lain, terlihat bahwa peningkatan ekspor Indonesia belum ditopang penuh oleh peningkatan kapasitas produksi. Pada saat yang sama, sisi impor memperlihatkan peningkatan pertumbuhan yang lebih kecil,

khususnya untuk impor bahan baku seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dan impor barang konsumsi (BI, 2006).

**Tabel 1.2**  
**Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor**  
**Januari- September 2005 & 2006**

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)		Perubahan Jan - Sep 2006 thd 2005	% Peran thd Total Jan - Sep 2006
	Jan- Sep 2005	Jan Sep 2006		
<b>Total Ekspor</b>	<b>62,699.50</b>	<b>73,467.90</b>	<b>17.17</b>	<b>100.00</b>
<b>Migas</b>	<b>13,973.10</b>	<b>15,949.90</b>	<b>14.15</b>	<b>21.71</b>
- Minyak Mentah	5,923.90	6,215.80	4.93	8.46
- Hasil Minyak	1,433.00	2,005.50	39.95	2.73
- Gas	6,616.20	7,728.60	16.81	10.52
<b>Non Migas</b>	<b>48,726.40</b>	<b>57,518.00</b>	<b>18.04</b>	<b>78.29</b>
- Pertanian	2,128.90	2,550.80	19.82	3.47
- Industri	41,098.20	47,412.40	15.36	64.53
- Pertambangan & Lain	5,499.30	7,554.80	37.38	10.29

Sumber: BPS

Dalam hal perdagangan, permintaan domestik masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase kontribusi permintaan domestik yang mencapai 79%, jauh meninggalkan substitusi impor dan ekspansi ekspor. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan yang lebih cepat terjadi pada permintaan domestik dari pada dua sisi lainnya. Kondisi ini berbeda dengan kondisi beberapa negara Asia lainnya yang pertumbuhan ekonominya cenderung didorong oleh ekspansi ekspor.

**Tabel 1.3**  
**Dekomposisi Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi**  
**(Dekomposisi Pertumbuhan PDB berdasarkan Kontribusi Permintaan**  
**Domestik, Substitusi Impor, dan Ekspansi Ekspor, Sebelum dan Setelah**  
**Tahun 2001)**

Negara	(Import + ekspor)/ PDB (%)		Kontribusi dalam perubahan PDB							
			Perubahan PDB (Juta US\$)		Permintaan Domestik		Substitusi Impor		Ekspansi Ekspor	
	pre	post	pre	post	pre	post	pre	post	pre	post
<b>Indonesia</b>	46.8	51.2	20,167.0	40,400.0	75.5	79.2	(4.8)	(5.8)	29.3	26.7
Philippines	60.7	69.7	10,500.0	13,067.0	96.3	88.0	22.6	19.7	26.4	31.7
Thailand	48.2	59.0	5,633.0	11,533.0	81.8	65.4	10.2	10.6	8.0	45.2
Vietnam	88.1	103.6	10,943.0	4,967.0	79.3	52.8	13.3	20.1	34.0	67.2
India	-	22.8	-	103,000.0	-	94.2	-	(6.7)	-	12.5
China	31.3	41.3	67,667.0	106,333.0	73.2	90.3	(2.2)	(21.3)	29.0	31.0

Sumber: Bank Dunia, 2006.

### **1.1.2 Inflasi dan Kebijakan Moneter**

Indikator makroekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2006 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga tercermin pada inflasi yang terus menurun dan nilai tukar rupiah yang stabil. Selain itu, perkembangan yang positif ini di dukung oleh menguatnya optimisme masyarakat terhadap perbaikan kondisi perekonomian yang tercermin dari membaiknya daya beli dan keyakinan konsumen terutama terhadap ekspektasi penghasilan.

Nilai tukar rupiah sepanjang triwulan II-2006 bergerak relatif stabil meskipun sempat beberapa kali mengalami tekanan. Fluktuasi nilai tukar tersebut terkait dengan perkembangan ekspektasi suku bunga di pasar internasional dan kondisi politik eksternal. Stabilitas nilai tukar didukung oleh perkembangan neraca pembayaran yang membaik. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah triwulan III-2006 mencapai Rp 9.124 per dolar AS atau sedikit melemah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp 9.115 per dolar. Secara point to point, rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,4% dari Rp 9.263 menjadi Rp 9.225. Perkembangan rupiah yang stabil ini juga tergambar pada volatilitas yang menurun signifikan dari 3,01% menjadi 0,85%. Terjaganya perkembangan rupiah ditopang oleh membaiknya kondisi makroekonomi domestik. Beberapa indikator ekonomi yaitu ekspor, PDB, serta inflasi, terus membaik sehingga turut menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

Penurunan BI Rate, bersamaan dengan sentimen positif dari pelaku pasar, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, nilai tukar yang stabil, kondusifnya sentimen global dan faktor eksternal telah mendorong investor untuk menambah portofolio investasinya di pasar saham yang mendorong maraknya perdagangan pasar modal. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi 1.535, menguat 17,1% dibanding triwulan sebelumnya. Dari sisi pemodal, perdagangan oleh investor asing masih mempengaruhi perilaku investor domestik. Perkembangan kondisi global, yang ditandai oleh bertahannya suku bunga AS mendorong investor asing untuk menambah portofolio saham.

Inflasi IHK sampai dengan oktober 2006 tetap terkendali dan tetap menunjukkan tren yang menurun. Tren penurunan inflasi ini didorong oleh kecilnya dampak inflasi dari administered prices yang hanya berasal dari penyesuaian tarif PDAM, kenaikan harga minyak tanah di tingkat eceran dan adanya penurunan harga BBM nonsubsidi. Perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan tingkat inflasi IHK secara tahunan masih menunjukkan tren yang menurun. Laju inflasi IHK pada triwulan III-2006 mencapai 14,55% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,53% (yoy). Sedangkan secara tahun kalender, laju inflasi sepanjang 2006 mencapai 4,06% (ytd), lebih rendah dibandingkan laju inflasi kalender pada 2005 yang mencapai 6,39% (ytd).

### 1.1.3 Keuangan Negara dan Fiskal

Pada tahun 2007 pemerintah memprediksikan akan terjadi peningkatan pendapatan dari pajak dalam negeri menjadi 13.9% yang didorong dari peningkatan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pada saat yang bersamaan, meskipun secara kuantitas terjadi peningkatan nilai penerimaan dalam negeri, namun secara persentase terhadap PDB justru terjadi penurunan sekitar 0,7%. Hal yang sama pun terjadi pada anggaran belanja negara yang turun dari 22.1% menjadi 21.1% dari total PDB pada 2007. Hal ini pun berimbas pada tingkat defisit anggaran yang juga mengalami penurunan menjadi hanya tinggal 0.9% pada 2007 dari 1.2% pada 2006. Penurunan tingkat defisit ini sebagai cerminan dari upaya pemerintah guna mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 0.5 - 0.7% terhadap PDB.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam anggaran dan pemerintah. Pertama, rencana pemerintah yang akan menaikkan gaji PNS pada 2007 sebesar rata-rata 7%. Rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS tersebut menyebabkan peningkatan belanja pegawai menjadi di atas 2.5%. Kedua, sampai saat ini pemerintah masih menghadapi masalah kelembagaan dan efektivitas *disbursement* dan penyerapan dana pemerintah. Hal ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini dengan tingkat pertumbuhan yang tidak teratur mencerminkan ketidakefektifan pengeluaran pemerintah.

**Tabel 1.4**  
**APBN 2006 DAN RAPBN 2007**  
**(dalam milyar rupiah)**

	2006		2007	
	RAPBN-P	% thd PDB	RAPBN	% thd PDB
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>651912.60</b>	<b>20.90</b>	<b>713443.30</b>	<b>20.20</b>
I. Penerimaan Dalam Negeri	647971.00	20.80	710774.30	20.10
1. Penerimaan Perpajakan	423455.30	13.60	505877.70	14.30
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	224515.70	7.20	204896.60	5.80
II. Hibah	3941.60	0.10	2669.00	0.10
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>689541.40</b>	<b>22.10</b>	<b>746541.60</b>	<b>21.10</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	470161.00	15.10	495993.30	14.00
1. Belanja Pegawai	79603.70	2.50	98472.90	2.80
2. Belanja Barang	54616.10	1.70	72470.70	2.10
3. Belanja Modal	67044.90	2.10	66060.30	1.90
4. Pembayaran Bunga Utang	83464.90	2.70	85115.60	2.40
5. Subsidi	104324.70	3.30	109702.20	3.10
a. Subsidi BBM	62735.20	2.00	68585.90	1.90
b. Subsidi Non-BBM	41589.50	1.30	41116.30	1.20
6. Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Bantuan Sosial	37228.10	1.20	49048.10	1.40
8. Belanja Lainnya	43878.70	1.40	15123.30	0.40
II. Belanja Daerah	219380.40	7.00	250548.40	7.10
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>45836.10</b>	<b>1.50</b>	<b>52017.30</b>	<b>1.50</b>

<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>-37628.80</b>	<b>-1.20</b>	<b>-33098.30</b>	<b>-0.90</b>
<b>E. Pembiayaan (E.I + E.II)</b>	<b>37628.80</b>	<b>1.20</b>	<b>33098.30</b>	<b>0.90</b>
I. Pembiayaan Dalam Negeri	52408.60	1.70	51304.10	1.50
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	-14779.80	-0.50	-18205.80	-0.50

Sumber: Depkeu

Beberapa asumsi dasar yang digunakan pemerintah pada tahun 2007 tidak terlalu berbeda dengan asumsi yang digunakan pada tahun 2006. Pemerintah masih mengasumsikan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.300,00 / US\$. Begitu pun dengan produksi minyak Indonesia yang ditetapkan 1 juta barel/ hari, dengan harga minyak internasional yang hanya berselisih 3 US\$/ barel dari asumsi tahun sebelumnya. Dengan perkembangan perekonomian saat ini, nilai tukar yang berada pada kisaran Rp 9.100,00/ US\$ dan harga minyak dunia yang sudah kembali stabil dibawah US\$ 60, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan yang lebih baik.

**Tabel 1.5**  
**ASUMSI DASAR Penyusunan APBN 2006 - 2007**

Indikator Makro	2006		2007
	RAPBNP	Proyeksi	RAPBN
1 Produk Domestik Bruto (milyar Rp)	3,122,012.00	3,119,073.50	3,531,087.50
2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)	5.90	5.80	6.30
3 Inflasi (%) <sup>1)</sup>	8.00	8.00	6.50
4 Nilai tukar Rupiah per US\$ <sup>1)</sup>	9,300	9,300	9,300
5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) <sup>1)</sup>	12.00	12.00	8.50
6 Harga minyak internasional (US\$/barel) <sup>1)</sup>	62	64	65
7 Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari) <sup>1)</sup>	1.00	1.00	1.00

1) Rata-rata

Sumber: Depkeu

#### **1.1.4 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan**

Pola ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa angkatan kerja bertambah sekitar 2 juta orang per tahun. Hal ini sejalan dengan penambahan penduduk usia kerja. Namun demikian, hal ini tidak didukung oleh peningkatan kesempatan kerja yang memadai. Pertumbuhan kesempatan kerja (penduduk bekerja) lebih lambat dari pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka terus meningkat dan diperkirakan akan mendekati 11% untuk tahun 2006.

Secara sektoral, kesempatan kerja di Indonesia lebih banyak ditawarkan sektor informal, sementara itu kesempatan kerja sektor formal stagnan dan bahkan cenderung menurun. Selama lima tahun terakhir, share kesempatan kerja sektor formal terus mengalami penurunan dari 32,3% pada 2001 menjadi 30,2% pada 2005. Hal ini digantikan oleh peningkatan pada kesempatan kerja sektor formal yang hampir mencapai 70% pada tahun 2005. Fenomena ini menjadi hal yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum krisis menerjang negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa setelah krisis, terjadi informalisasi ketenagakerjaan dari sektor yang memiliki produktivitas tinggi ke sektor yang produktivitasnya rendah.

**Tabel 1.6**  
**Profil Ketenagakerjaan Indonesia 2000–2005**

	2001	2002	2003	2004	2005
Angkatan Kerja (000)	98,812	100,779	100,316	103,973	105,802
Setengah Penganggur	30.80	28.65	27.74	26.88	34.57
<i>Terpaksa</i>	6.08	11.91	12.10	12.91	14.49
<i>Sukarela</i>	24.72	16.74	15.63	13.97	20.08
Penganggur terbuka	8.10	9.06	9.57	9.86	10.26
Penduduk yang Bekerja (000)	90,807.0	91,647.0	92,810.8	93,722.0	94,948.1
Share berdasarkan Status Pekerjaan (%)					
<i>Formal</i>	32.3	30.4	28.6	30.3	30.2
<i>Informal</i>	67.7	69.6	69.2	69.7	69.8
Jumlah	100.0	100.0	97.8	100.0	100.0
Share berdasarkan sektor (%)					
<i>Pertanian</i>	45.28	43.77	44.34	46.38	43.33
<i>Industri</i>	12.96	13.31	13.21	12.39	11.81
<i>Lainnya</i>	41.76	42.92	42.45	41.24	44.86
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Lapangan Usaha (%)					
<i>Pertanian</i>	3.83	4.37	4.72	5.05	5.60
<i>Industri</i>	4.08	3.23	3.18	3.26	2.49
<i>Lainnya</i>	3.30	5.29	5.33	6.38	4.63

Sumber: BPS, diolah

Penurunan produktivitas tenaga kerja juga terindikasi dari share tenaga kerja secara sektoral. Sektor pertanian dan jasa menjadi dua sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Pada tahun 2004, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 46% tenaga kerja, sedangkan sektor industri hanya mempekerjakan 12.38% dari total tenaga kerja. Hal ini tidak sejalan dengan tingkat output yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Kontribusi sektor pertanian terhadap total output relatif lebih kecil dari pada tingkat penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas. Fenomena ini pun menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ketenagakerjaan ke sektor yang memiliki produktivitas lebih rendah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Masalah ketenagakerjaan yang lainnya adalah kondisi pasar kerja Indonesia yang bersifat dualistic. Sekitar 70% angkatan kerja bekerja pada lapangan kerja informal dan dengan tingkat produktivitas yang masih rendah. Selain itu sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sekitar 55% dari total angkatan kerja adalah lulusan sekolah dasar ke bawah. Selain itu, sebagian besar angkatan kerja merupakan penduduk berusia muda. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam rangka penyediaan kesempatan kerja dalam rangka penurunan pengangguran. Pemerintah dituntut untuk dapat

meningkatkan pelayanan pendidikan, pelatihan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat keterampilan pekerja yang tersedia.

Selain dibebani oleh tingginya tingkat pengangguran, Indonesia juga dibayang-bayangi oleh masih tingginya tingkat kemiskinan. Krisis ekonomi telah menghasilkan tingkat kemiskinan yang sangat besar, yaitu mencapai hampir 25% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang menjadi miskin akibat krisis ekonomi, 80 % terjadi di perkotaan, dan hanya 27% di pedesaan. Terbatasnya arus barang dari luar negeri ke pedesaan dan peningkatan harga ekspor komoditas perkebunan yang berasal dari pedesaan, menjadi alasan ketahanan sektor ekonomi di pedesaan.

Setelah krisis ekonomi, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan terus membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan. Puncak penurunan tersebut terjadi pada 2005 (Februari) dimana tingkat kemiskinan Indonesia menjadi sebesar 15,97%. Namun prestasi tersebut ternyata tidak bisa bertahan lama. Tingkat kemiskinan kembali meningkat satu tahun berikutnya menjadi 17,75%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penurunan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun 2005.

Secara lebih rinci, berdasarkan kondisi demografi penduduk miskin tersebut terlihat bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di desa. Data terakhir menunjukkan bahwa dari total 37.30 juta penduduk miskin, sekitar 63% nya berada di daerah pedesaan. Jumlah ini diantaranya tersebar di kawasan tertinggal dengan infrastruktur yang tidak memadai sehingga menghambat akses peningkatan kesejahteraan ke daerah tersebut. Kegiatan ekonomi pedesaan yang masih bertumpu pada pertanian tradisional dengan akses pada informasi dan komunikasi yang sangat minim menjadi alasan selanjutnya mengapa persentase penduduk miskin di desa yang selalu lebih banyak dibanding penduduk kota.

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin**  
**1996-2006**

TAHUN	Jumlah Penduduk Miskin ( Juta Orang )			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
	1976	10.00	44.20	54.20	38.80	40.40
1984	9.30	25.70	35.00	23.14	21.18	21.64
1987	9.70	20.30	30.00	20.14	16.44	17.40
1990	9.40	17.80	27.20	16.75	14.33	15.10
1993	8.70	17.20	25.90	13.45	13.97	13.70
1996	9.42	24.59	34.01	13.39	19.78	17.47
1998	17.60	31.90	49.50	21.92	25.72	24.23
1999	15.64	32.33	47.97	19.41	26.03	23.43
2000	12.30	26.40	38.70	14.60	22.38	19.14
2001	8.60	29.30	37.90	9.76	24.84	18.41
2002	13.30	25.10	38.40	14.46	21.10	18.20

2003	12.20	25.10	37.30	13.57	20.23	17.42
2004	11.40	24.80	36.20	12.13	20.11	16.66
Feb 2005	12.40	22.70	35.10	11.37	19.51	15.97
Maret 2006	14.29	24.76	39.05	13.36	21.90	17.75

Sumber: BPS, berbagai tahun.

Perkembangan perekonomian Indonesia mengindikasikan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi telah berhasil menembus 5% dengan kondisi makroekonomi (tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah) yang terus membaik. Keberhasilan perbaikan perekonomian ini ternyata belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dimana tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terselubung masih tinggi serta beban kemiskinan yang kembali meningkat.

Untuk Indonesia, studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian Smeru (Suryahadi et. al. 2006) memberikan gambaran mengenai sektor dan lokasi yang akan memberikan dampak pada signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Studi ini menemukan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di pedesaan akan dapat menurunkan kemiskinan di seluruh sektor baik di desa maupun di kota. Meskipun demikian, dalam hal elastisitas kemiskinan, sektor jasa di perkotaan menyumbang tingkat penurunan kemiskinan yang terbesar untuk semua sektor selain sektor pertanian di perkotaan. Selanjutnya, pertumbuhan sektor pertanian di pedesaan akan memberikan dampak pada penurunan kemiskinan di sektor pertanian di pedesaan yang notabene merupakan sektor penyumbang kemiskinan terbesar. Kedua hal tersebut mengindikasikan bahwa cara paling efektif untuk mempercepat penurunan kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan yang terfokus pada sektor pertanian di pedesaan dan sektor jasa di perkotaan.

**Tabel 1.8**

**Dampak 1% Pertumbuhan terhadap Persentase Perubahan Tingkat Kemiskinan**

Variabel Independen	Mean Share PDB (%)	Elastisitas Kemiskinan					
		Desa			Kota		
		Pertanian	Industri	Jasa	Pertanian	Industri	Jasa
Desa Pertanian							
PDB	15.4	-0.09 *	-0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.01
Industrial							
PDB	9.93	0	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0
Jasa PDB	14.71	-0.07 **	-0.08 **	-0.08 **	-0.11 **	-0.07 **	-0.04 **
Kota Pertanian							
PDB	1.95	0	0.01	-0.01 *	-0.03 **	-0.01 *	0
Industrial							
PDB	21.32	-0.04 **	-0.03 *	-0.01	-0.04 **	-0.04 **	-0.02 **
Jasa PDB	36.35	-0.14 **	-0.15 **	-0.09 **	-0.05	-0.09 **	-0.11 **

Ket: \*\* = signifikan pada tingkat 1 %, \* = signifikan pada tingkat 5 %.

Sumber: Suryahadi, dkk (2006).

## **1.2 ISU DAN PERMASALAHAN EKONOMI**

### **1.2.1 Ketenagakerjaan**

Isu utama yang masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia adalah tingkat pengangguran. Dengan naiknya tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,26% pada tahun 2006 dari angka 9.8 % pada tahun 2005, kinerja pembangunan ekonomi selama dua tahun terakhir dengan adanya pertumbuhan ekonomi positif sebesar hampir 6% kembali menunjukkan fenomena paradoksial. Secara perhitungan resmi pemerintah memang dibutuhkan pertumbuhan minimal sebesar 7% pertahun untuk mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan. Perhitungan lain juga memperkirakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terjadi penyerapan sebanyak 400 ribu orang tenaga kerja. Perhitungan terbaru malahan lebih pesimis lagi dimana setiap 1% pertumbuhan, sebenarnya tenaga kerja yang dapat terserap hanyalah berkisar antara 200 sampai dengan 250 orang tenaga kerja saja.

Makin tingginya Jumlah populasi angkatan kerja pada tahun 2005 tercatat sebanyak 105,8 juta orang dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2 juta orang pertahunnya, namun pertumbuhan kesempatan kerja jauh lebih lambat lagi. Persoalan lain dalam hal ketenagakerjaan adalah tingginya pula tingkat pengangguran terselubung (bekerja kurang dari 35 jam per minggu) yang pada tahun 2005 tercatat hampir mencapai 30%. Ditenggarai pula bahwa angka setengah pengangguran ini relatif lebih tinggi untuk tingkat setengah pengangguran sukarela yang mencerminkan tingginya rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan angkatan kerja dalam mencari pekerjaan tetap.

Isu lain dalam hal ketenagakerjaan adalah makin tingginya tingkat kesempatan kerja di sektor-sektor informal sebagai konsekuensi dari terbatasnya kesempatan kerja di sektor-sektor formal. Analisa data yang tercatat menunjukkan bahwa fenomena ini diakibatkan oleh makin cenderung menurunnya tingkat produksi di sektor-sektor usaha formal selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Fenomena ini dapat menjadi penghambat proses pembangunan ekonomi Indonesia karena disadari bahwa kegiatan-kegiatan sektor informal ini tingkat produktivitasnya lebih rendah dibandingkan sektor informal dimana secara kelembagaan dana yang berputar tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang lebih luas, namun hanya dinikmati oleh sedikit pihak saja.

Hubungan antara pihak pekerja dan pengusaha mengalami banyak friksi yang terjadi secara berulang-ulang selama dua tahun terakhir. Demonstrasi penolakan Revisi UU Tenaga Kerja No. 13/2003 yang sempat menghentikan kegiatan usaha industri di berbagai kota besar merupakan salah satu indikasi adanya ketidak-beresan dalam tata-cara penyelesaian berbagai kasus

*dispute* yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Hal ini diperparah pula oleh penolakan pihak wakil tenaga kerja terhadap kenaikan UMP dan UMK di berbagai daerah di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan standar konsumsi layak hidup (KLH). Sebaliknya, tidak sedikit pula keluhan dan ketidakpuasan pihak pengusaha dengan kenaikan UMK dan UMP yang menurut mereka semakin mempersulit ruang gerak usaha mereka dengan semakin tingginya biaya produksi, sementara pasar produksi mereka baik domestik maupun ekspor dianggap tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Di tahun-tahun mendatang sepertinya masalah ketenagakerjaan nasional masih akan tetap menjadi topik yang harus dibenahi mengingat pentingnya isu ketenagakerjaan terhadap aspek-aspek yang lebih luas selain aspek ekonomi saja seperti aspek politik, keamanan dan ketertiban, serta sosial budaya.

### **1.2.2 Kemiskinan**

Bila kita membandingkan antara angka pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia pada dua tahun terkakhir (2005 - 2006), maka dapat kita lihat bahwa kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah fenomena paradoksial bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif dibarengi pula dengan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin.

Angka terakhir laporan BPS akhir bulan Maret 2006 memperlihatkan bahwa pada saat naiknya laju pertumbuhan ekonomi sebesar hampir 6% dibandingkan tahun sebelumnya, telah terjadi pula peningkatan 11% jumlah penduduk miskin menjadi 39.05 juta orang pada tahun 2006. Angka peningkatan 11% ini merupakan jumlah yang cukup fantastis namun dapat dimengerti oleh banyak pihak mengingat bahwa kenaikan harga BBM pada tahun 2005 pengaruhnya sangat besar dalam memicu besaran peningkatan jumlah penduduk miskin ini sekaligus meng-*offset* pengaruh dan multiplier positif dari naiknya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2005.

Disadari pula bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras makin membuat jumlah penduduk miskin makin meningkat pula. Selain itu ditenggarai pula bahwa tingkat kemiskinan ini dipicu pula oleh kecilnya porsi kepemilikan lahan oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa 67% masyarakat miskin berada di daerah pedesaan, 90% dari mereka bekerja, mayoritas sebagai buruh usaha pertanian sementara 10% lainnya tidak bekerja. Oleh karenanya disadari pula bahwa kebijakan mengenai *land reform* dimana terjadi pendistribusian kepemilikan lahan dari yang dikuasai negara kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Upaya-upaya pemerintah lewat program-program *pro-poor growth* seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepertinya tidaklah seampuh seperti yang diperkirakan oleh para pengambil kebijakan. Upaya impor beras guna menekan melonjaknya harga-harga umum yang dipicu oleh harga beras yang makin mahal juga mendapatkan

tantangan dari berbagai pihak yang merasa bahwa impor beras bukanlah upaya yang bijak terutama bagi kalangan penduduk yang bergerak dibidang usaha pertanian. Selain dari upaya-upaya yang bersifat *crash programs* ini, sebenarnya masih terdapat banyak program reguler gun mengentaskan kemiskinan seperti subsidi minyak tanah, bantuan beras miskin (Raskin), subsidi buku, subsidi transportasi untuk kereta api dan kapal laut, dan lain-lain yang jumlah totalnya hampir mencapai Rp. 40 Trilyun per tahun.

Kegagalan program-program ini secara gamblang dapat disimpulkan dari kericuhan serta masalah yang timbul pada operasionalisasi dan implemenasi program-program tersebut di lapangan. Selanjutnya ditenggarai pula bahwa program pengentasan kemiskinan bukanlah semata-mata masalah yang terkait pada aspek ekonomi, namun juga aspek-aspek lain terutama aspek sosial dan kesempatan usaha. Kedepan sepertinya dengan rencana mentransformasi BLT menjadi program bantuan dalam bentuk lain yang lebih mendidik, administrasi pengawasan dan penilaian program yang lebih menekankan pada pencapaian *output* dan *outcome* sedikit banyak dapat memperbaiki lemahnya kinerja pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### **1.2.3 Keuangan Negara**

Masalah penerimaan dan pengeluaran negara tidak kalah pentingnya dalam isu-isu sentral pembangunan perekonomian Indonesia. Komitmen nasional untuk meminimalkan, bila mungkin melepaskan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri dan selanjutnya lebih mengandalkan dana masyarakat dari dalam negeri atau dana lain dari luar yang tidak terlalu mengandung resiko biaya *inter-generations* bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa tingkat ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri memang telah terbukti berhasil dengan beberapa indikatornya yaitu pelunasan hutang IMF tanpa dibarengi dengan gejolak pasar dan penurunan rasio nilai hutang luar negeri pada dua tahun terakhir menjadi 37,5% pada tahun 2006 dari 46,8% pada tahun sebelumnya 2005.

Mengandalkan penerimaan negara pada pajak sepertinya bukan pilihan terbaik karena sifat pengaruh pajak yang ditenggarai lebih bersifat *dis-insetif* terhadap pembangunan perekonomian dibandingkan sebagai *device* dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Terlebih bila kita melihat lebih dalam lagi bahwa keputusan untuk lebih mengandalkan pajak sebagai penerimaan negara malah akan memperlemah daya saing negara kita dalam menumbuh-kembangkan perekonomian produktif lewat investasi dan kegiatan usaha dibandingkan dengan negara-negara lain terutama negara-negara tetangga. Kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak memang menunjukkan keberhasilan. Dalam perubahan APBN 2006 terlihat bahwa penerimaan dari pajak

(termasuk bea masuk dan cukai) telah mencapai Rp. 423 Trilyun, angka yang setara dengan 65% dari total penerimaan negara, menggeser dominasi peran penerimaan negara dari minyak dan gas bumi.

Namun angka realisasi penerimaan pajak ini juga mengandung resiko karena tercatat bahwa penerimaan pajak sejumlah itu lebih didominasi oleh pembayar pajak besar. Seribu orang pembayar pajak besar memiliki kontribusi lebih dari 60% dari total penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya reformasi pajak masih belum dapat dikatakan optimal karena ini membuktikan bahwa upaya intensifikasi pajak masih merupakan prioritas utama dibandingkan upaya ekstensifikasi-nya. Penggenjotan penerimaan pajak via intensifikasi ini dapat membahayakan kesinambungan fiskal negara karena sangat rentan pada keberadaan para pembayar pajak besar tersebut yang dengan mudah dapat saja merelokasikan kegiatan usaha-nya ke negara-negara lain yang memiliki sistem pajak lebih menguntungkan mereka.

Pemanfaatan dana lain dalam aspek sisi pembiayaan untuk penerimaan negara melalui penerbitan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) cukup menjanjikan hasilnya. Penerimaan SUN berdasarkan net penerbitan selama dua tahun terakhir meningkat pesat dari Rp. 22,2 Trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 29,67 Trilyun pada akhir bulan Juli, 2005. Kepemilikan asing dari total penerbitan SUN juga menunjukkan tendensi meningkat yaitu Rp. 10,74 Trilyun di pertengahan tahun 2004 menjadi Rp. 26.25 Trilyun pada akhir tahun 2005, dengan kata lain terjadi aliran masuknya dana asing Rp. 15.5 Trilyun. Pemerintah sepertinya berhasil memanfaatkan dana tersebut untuk menutup defisit anggarannya yang pada tahun 2006 ini diperkirakan akan mencapai 1,2 % dari total PDB. Namun ketergantungan penerimaan negara pada portofolio seperti ini juga beresiko terhadap kesinambungan fiskal seperti halnya penerimaan pajak yang terlalu mengandalkan pada pembayar pajak besar. Upaya lain seperti privatisasi BUMN pasca BPPN juga sepertinya bukanlah opsi yang dapat diterima oleh banyak kalangan walaupun terbukti upaya privatisasi inidapat sedikitnya memperluas ruang nafas dan ruang gerak keuangan negara untuk lebih fokus pada pengeluaran-pengeluaran yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat umum.

Dari sisi pengeluaran, beban terberat pada APBN 2006 adalah membengkaknya pengeluaran subsidi bahan bakar minyak akibat terus naiknya harga minyak mentah internasional. Dalam hal pengeluaran kesejahteraan lainnya, sepertinya besaran APBN 2006 untuk pendidikan masih belum dapat mengikuti apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 dengan ketentuan pengalokasian 20% dana APBN untuk sektor pendidikan. Pengeluaran-pengeluaran untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai negeri secara umum juga tidak dapat direalisasi secara optimal, malahan yang terjadi adalah peningkatan drastis gaji para pegawai negeri golongan tinggi serta anggota DPR. Dengan pendekatan klasifikasi belanja pengeluaran rutin dan pembangunan, APBN 2006 terlihat

tetap menonjolkan dominasi pengeluaran rutin untuk gaji pegawai, pembelian barang dan pembayaran hutang luar negeri. Di sisi lain, pengeluaran pembangunan cenderung mengalami penurunan terus menerus selama 3 tahun terakhir. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan tiga item pengeluaran yaitu belanja pembangunan, Pembayaran hutang dan belanja pegawai.

**Tabel. 1.9**  
**Jumlah Beberapa Item Pengeluaran Pemerintah**  
**(Trilyun Rupiah)**

Item	2004	2005	2006
Belanja Pembangunan	71.9	49.6	45
Bayar Utang	108.7	93.9	118.5
Belanja Pegawai	54.2	61.1	77.77

*Sumber: BPS, BI, dan Kadin*

Sepertinya pada tahun 2007, terdapat kecenderungan yang sama dengan apa yang telah ditunjukkan oleh kinerja APBN 2006, dimana penerimaan pemerintah akan tetap diandalkan dari penerimaan pajak, sisi pembiayaan akan tetap mengandalkan SUN terutama SUN dalam bentuk valuta asing. Pemerintah juga berupaya memperlonggar beban pembiayaan subsidi lewat upaya konversi subsidi BBM kepada penggunaan Elpiji yang beban subsidiya masih jauh lebih rendah. Dalam aspek pengeluaran sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nota RAPBN 2007, upaya pemerintah untuk melepaskan diri dari beban hutang luar negeri tetap menjadi prioritas utama dimana upaya pencapaian 20% pengeluaran pendidikan tetap masih menjadi harapan di tahun-tahun mendatang.

#### **1.2.4 Investasi**

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi ternyata belum direspon oleh investor untuk menggerakkan sektor produksi. Nilai PMDN dan PMA baik yang disetujui maupun realisasi setelah krisis ekonomi mengalami tendensi penurunan hingga tahun 2005. Perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2005 diharapkan mampu meningkatkan PMDN dan PMA pada tahun 2007. Namun demikian berbagai masalah yang dihadapi sektor produksi masih akan menjadi kendala peningkatan investasi, seperti permasalahan penyelesaian amandemen UU Ketenagakerjaan yang belum rampung hingga akhir tahun 2006, masalah UMR, UMP, UMK, masalah kepastian dan hukum dalam berusaha.

Alternatif pembiayaan dari sektor perbankan menghadapi masalah karena likuiditas perbankan yang meningkat tidak mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit.

GRAFIK PERTUMBUHAN PENYALURAN KREDIT

Q to Q

#### **1.2.5 Neraca Pembayaran**

Masalah lain yang dihadapi bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kecukupan cadangan devisa, yang

diindikasikan dengan penurunan cadangan devisa. Masalah cadangan devisa dapat

GRAFIK CADANGAN DEVISA dari tahun 2001 - 2006

## BAB II.

### GENERAL OUTLOOK for 2007

#### 2.1 MACROECONOMIC TRENDS

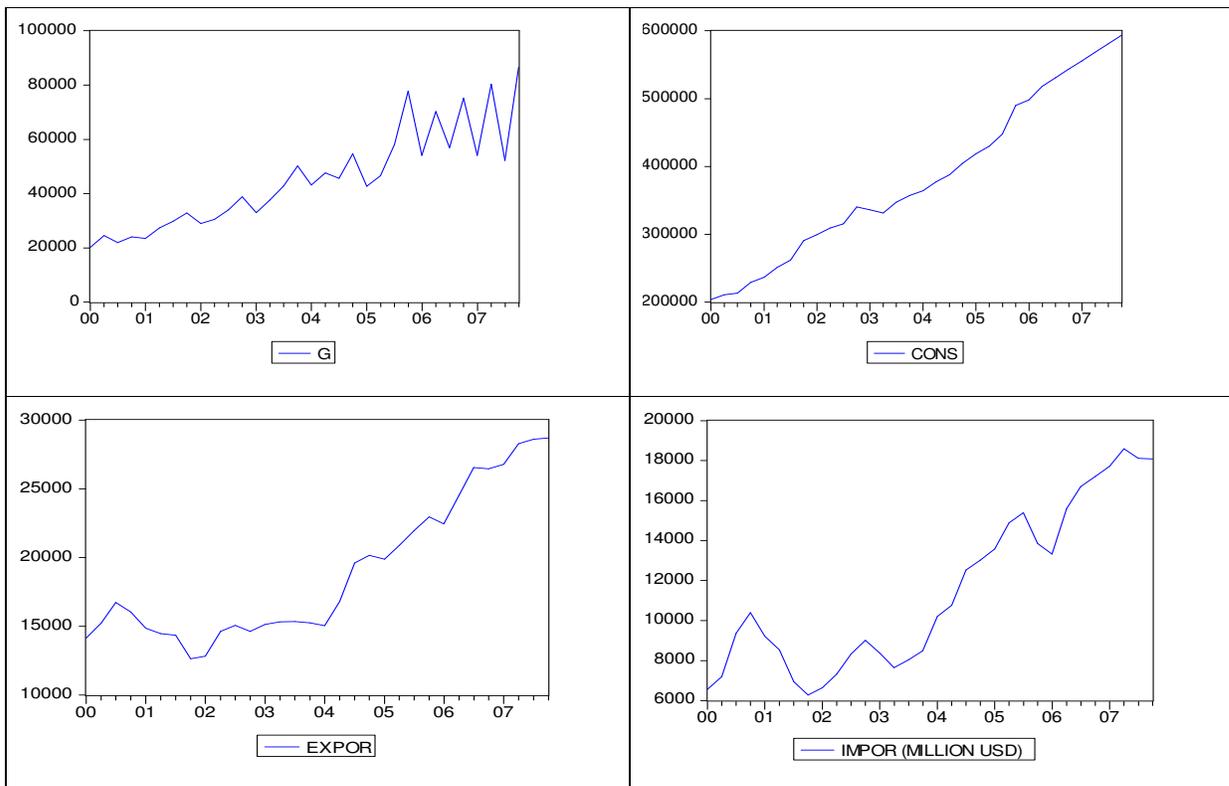
Asumsi proyeksi indikator ekonomi makro, yaitu:

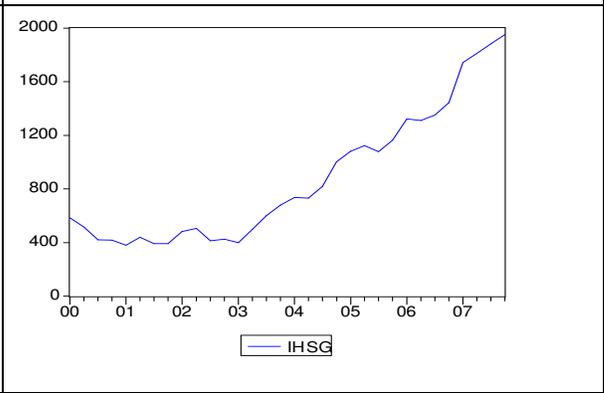
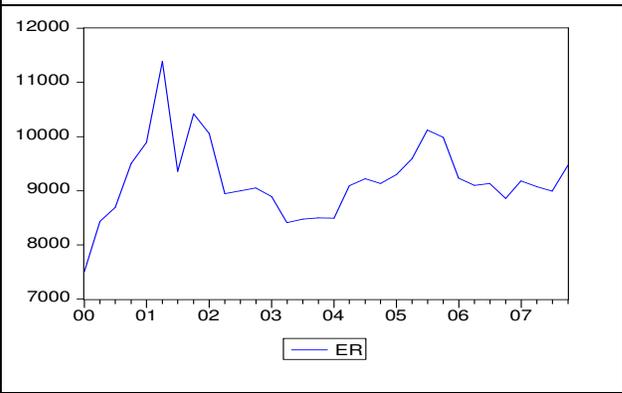
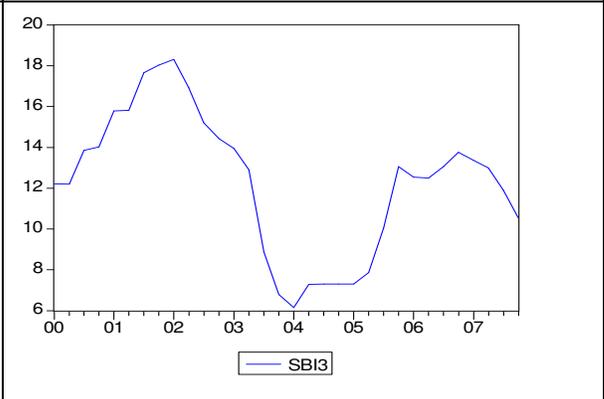
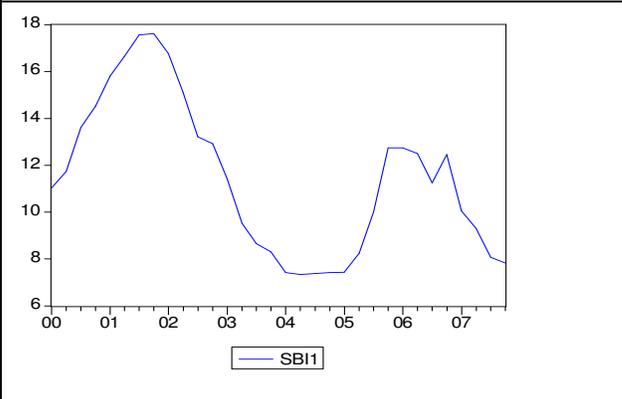
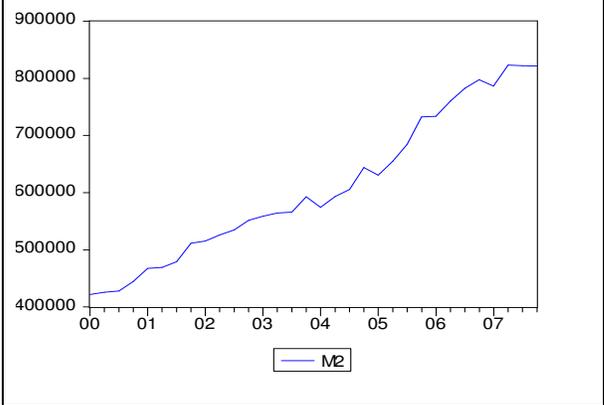
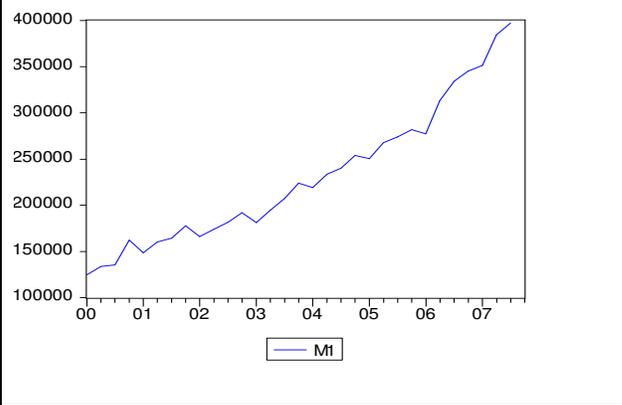
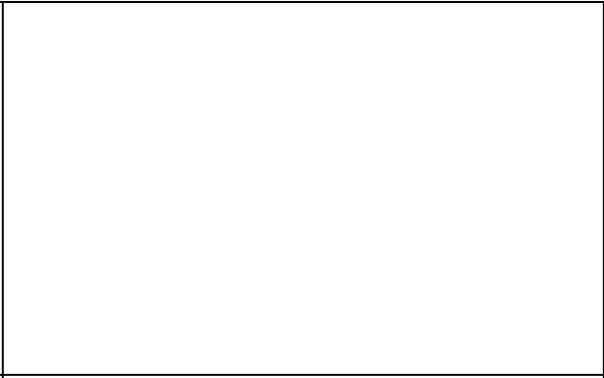
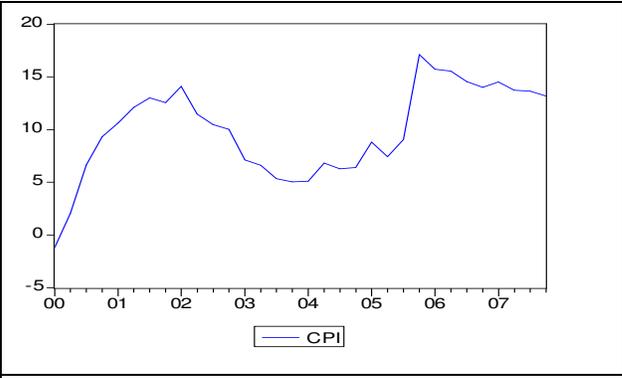
- a. Harga minyak internasional sama dengan asumsi APBN, yaitu sebesar 65US\$/barrel.
- b. Produksi minyak tahun 2007 tidak mengalami perubahan dibandingkan produksi minyak tahun 2006.
- c. Suku bunga SBI 3 bulan akan lebih rendah dibandingkan akhir 2006, yang sebesar ... (per Desember 2006).

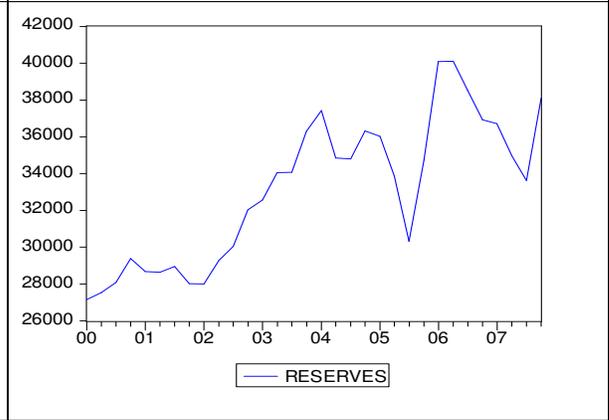
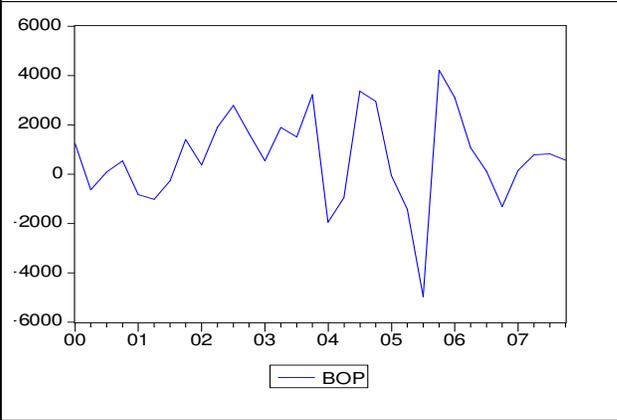
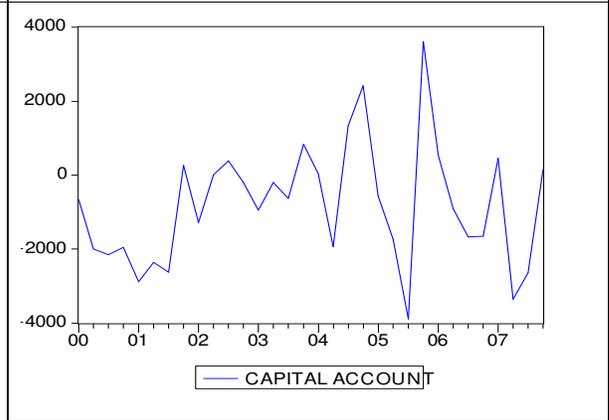
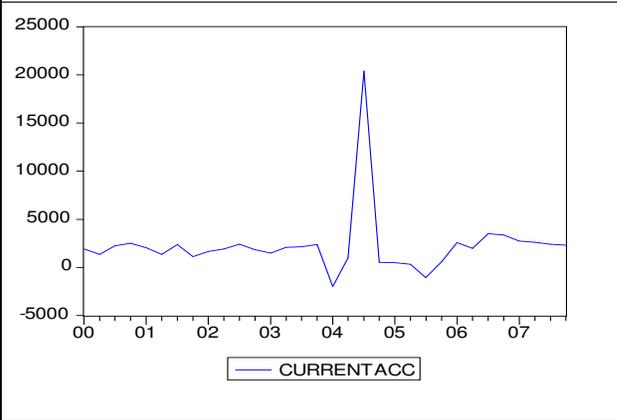
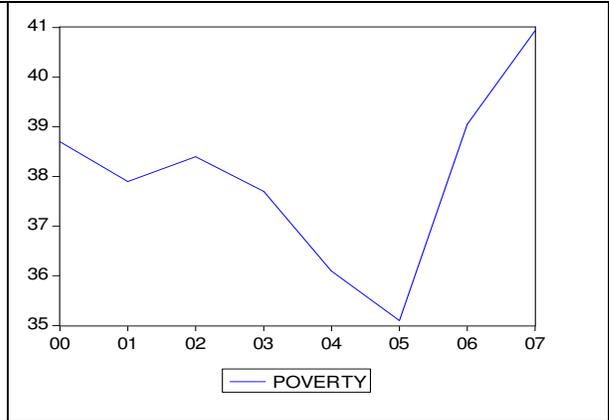
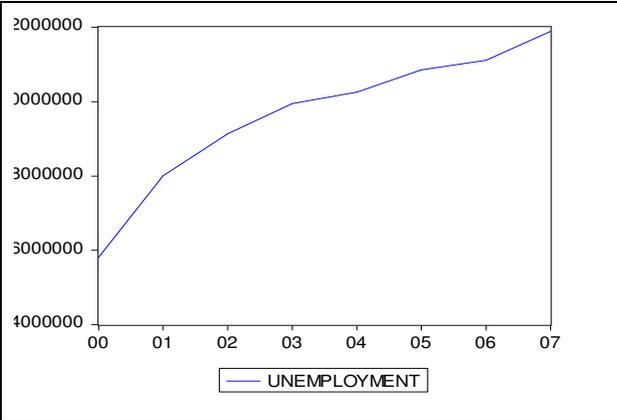
**Tabel. 2.1**

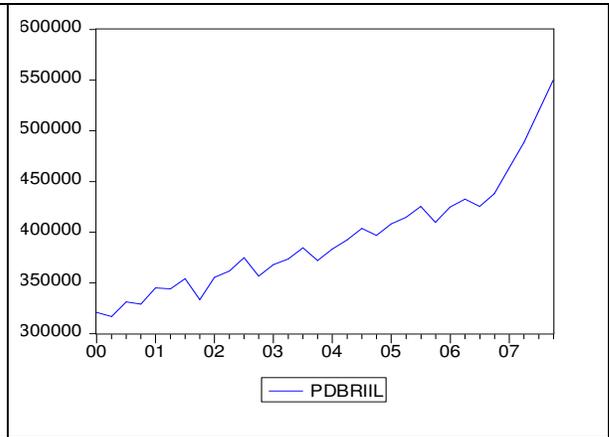
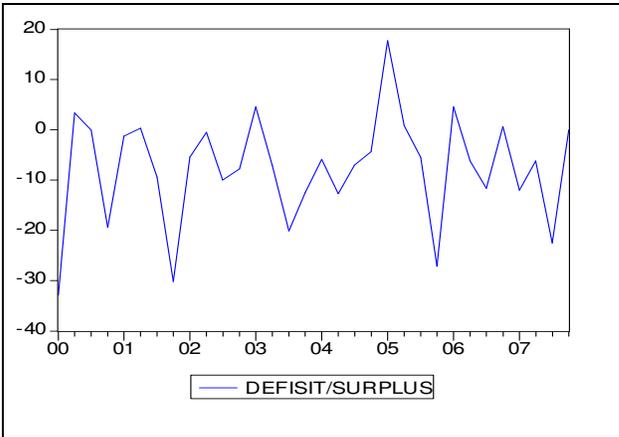
	Satuan	2007:I	2007:II	2007:III	2007:IV
<b>Proyeksi Indikator Harga, Moneter dan Keuangan</b>					
CPI		14.51	13.73	13.65	13.19
M1	(Miliar Rupiah)	354,198.54	383,731.15	395,256.43	407,876.44
M2	(Miliar Rupiah)	786,530.25	822,996.27	821,869.59	821,393.33
SBI 3 bulan	(%)	13.37	13.00	11.91	10.55
Nilai Tukar	(Rp/Dollar)	9,182.75	9,071.48	8,996.26	9,476.87
IHSG		1,741.74	1,811.78	1,881.73	1,951.84
<b>Proyeksi Indikator Komponen Pengeluaran Produk Domestik Bruto</b>					
Konsumsi Rumah Tangga	(Miliar Rupiah)	555,650.04	568,224.22	580,798.40	593,372.58
PMA	(Miliar Rupiah)	3,673.75	4,598.11	4,394.79	3,734.63
PMDN	(Miliar Rupiah)	346.50	1,149.50	1,447.70	209.90
Investasi	(Miliar Rupiah)	7,172.70	5,826.60	6,434.10	8,084.80
Konsumsi Pemerintah	(Miliar Rupiah)	54,018.70	80,317.20	52,162.80	86,459.90
Nilai Ekspor	(Juta Dollar)	26,768.47	28,285.68	28,590.46	28,684.59
Nilai Impor	(Juta Dollar)	17,707.98	18,589.78	18,116.47	18,076.48
Net Export	(Juta Dollar)	6,979.45	7,941.61	7,841.13	6,127.13
<b>Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi</b>					
PDB Riil	(Milyar Rp)	466,621.10	497,067.20	527,155.40	557,649.20
Growth	(%)	0.0553	0.0652	0.0605	0.0578
<b>Proyeksi Neraca Pembayaran dan Cadangan Devisa</b>					
Neraca Pembayaran	(Juta)	159.13	788.56	832.16	570.25

	<b>Dollar)</b>				
Cadangan Devisa	<b>(Juta Dollar)</b>	36,721.86	34,970.35	33,614.71	38,105.76
<b>Proyeksi Indeks Harga Produksi</b>					
IHPB Ekspor	<b>(Harga Konstan 1993)</b>	173	157	148	143
IHPB Impor	<b>(Harga Konstan 1993)</b>	314	315	311	314
Indeks Produksi		10,544	10,558	10,713	11,008
<b>Proyeksi Pengangguran dan Kemiskinan</b>					
	<b>Satuan</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Pengangguran	<b>(Orang)</b>	10,251,351.00	10,854,254.00	11,104,693.00	11,890,482.26
Kemiskinan	<b>(Juta Orang)</b>	36.10	35.10	39.05	40.93









## **BAB III.**

### **OUTLOOK 2007 FOR REAL SECTOR**

#### **3.1. SEKTOR KEUANGAN**

Di banyak negara, khususnya di Indonesia, perbankan masih merupakan sumber utama pembiayaan dunia usaha, walaupun pasar modal juga menunjukkan peran yang meningkat. Sampai dengan triwulan III-2006, seluruh indikator kinerja utama perbankan Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Selain penyaluran kredit, besaran total asset, dana pihak ketiga (DPK), dan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income - NII) juga meningkat. Perkembangan tersebut memberikan gambaran bahwa perbankan secara umum tetap dapat mengatasi risiko usaha yang dihadapinya dengan baik, termasuk mengurangi tekanan terhadap kredit bermasalah.

Terus membaiknya nilai ekspor dan meningkatnya cadangan devisa menyebabkan nilai tukar rupiah stabil dengan kecenderungan menguat selama bulan Oktober 2006. Jika di akhir September 2006 kurs tengah rupiah berada pada level Rp 9.235, maka pada akhir Oktober 2006 menguat ke posisi Rp 9.110 per dollar AS atau terapresiasi sekitar 1,35 persen. Cenderung menurunnya harga minyak mentah dunia dan terus membaiknya harga saham di pasar modal Indonesia menjadikan nilai rupiah relatif menguat.

Sementara itu, tekanan inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun. Berdasarkan prediksi Bank Indonesia, angka laju inflasi tahun 2006 diperkirakan kurang dari 7% dan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2006 sebesar 8%. Keyakinan terhadap prediksi tersebut didasari oleh realisasi laju inflasi selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2006 yang hanya 3,67%. Atas dasar perkembangan yang menggembirakan tersebut, maka Bank Indonesia selaku otoritas moneter mempunyai kepercayaan yang cukup tinggi untuk secara konsisten menurunkan tingkat bunga. Setelah menurunkan BI rate dari 12,75% menjadi 12,5% pada 9 Mei 2006, maka secara berturut-turut Bank Indonesia menurunkan BI rate menjadi 12,25% pada 6 Juli 2006 dan menjadi 11,75% pada 8 Agustus 2006 serta pada tanggal 5 September 2006 Bank Indonesia dengan penuh keyakinan kembali menurunkan BI rate menjadi 11,25%. Jika keyakinan terhadap realisasi laju inflasi pada akhir tahun 2006 tidak tergoyahkan pada level di bawah 7%, maka sangat dimungkinkan penurunan suku bunga akan mengarah pada level di bawah 10%. Situasi ini semakin meyakinkan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis, akan kondisi perekonomian yang lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu tren kenaikan harga saham dalam negeri terus berlanjut sejalan dengan terjaganya stabilitas moneter dan membaiknya gairah pasar modal dunia. Pada 31 Oktober 2006 indeks

harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tercatat berada pada level 1.582,63 atau naik 48,01 poin (sekitar 3,1 persen) dari level 1.534,62 pada akhir September 2006. Dicapainya level tersebut menunjukkan bahwa indeks bursa saham Indonesia kembali menciptakan rekor-rekor baru, dan sudah melebihi level 1.553 yang dicapai pada 11 Mei 2006.

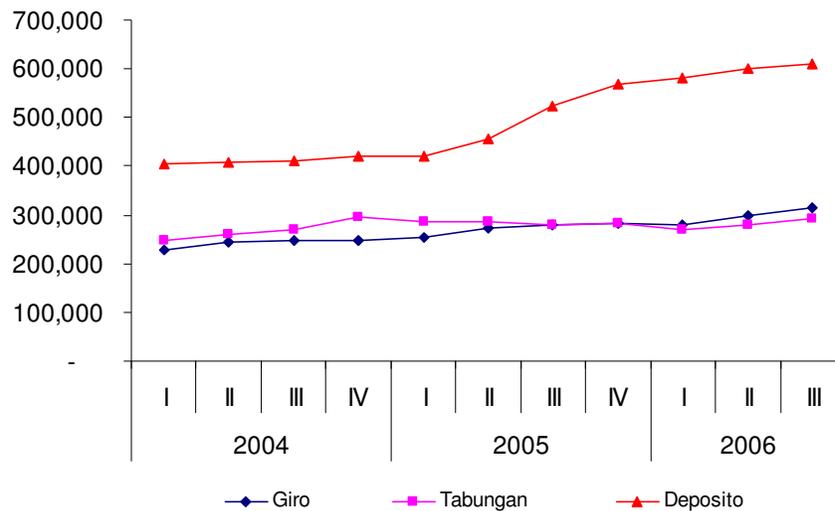
### 3.1.1. Perkembangan Perbankan

#### 3.1.1.1 Pengumpulan Dana dan Penyaluran Kredit

Pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan pada triwulan III-2006 menunjukkan pertumbuhan 3,17% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga telah mencapai posisi Rp1.216,8 triliun. Peningkatan penghimpunan dana tersebut khususnya terjadi pada komponen giro yang meningkat sebesar 5,45% di bandingkan dengan triwulan sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, peningkatan ini terutama akibat adanya *dropping* Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 1 bank persero dan *dropping* gaji.

Bila dilihat dari struktur jangka waktunya, DPK perbankan masih terkonsentrasi pada dana jangka pendek sampai dengan 3 bulan (91,5%). Selain itu, jumlah simpanan nasabah dengan nilai nominal diatas Rp100 juta memiliki pangsa 75,9% namun jumlah tersebut hanya dikuasai oleh 2,1% dari seluruh pemegang rekening di perbankan. Dengan kata lain, sebagian besar (98%) nasabah bank memiliki rekening dengan nominal kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi risiko likuiditas diperbankan terutama adanya penarikan dana nasabah besar secara tiba-tiba.

Gambar 3.1. Posisi Pengumpulan Dana Perbankan (Rp miliar)



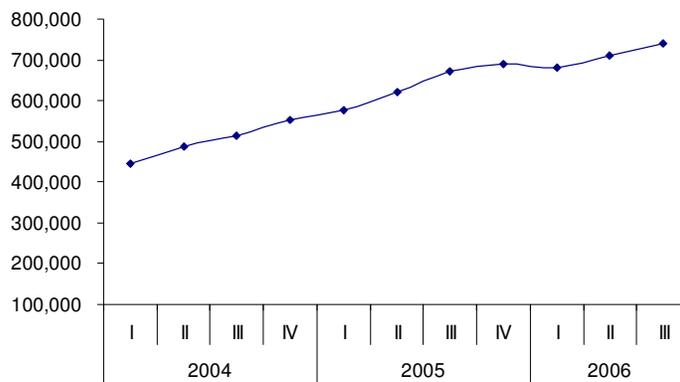
Selanjutnya, bila dilihat dari komposisi mata uangnya, peningkatan cukup besar terjadi pada DPK rupiah (sebesar 1,9%) sedangkan DPK valas naik 0,8% sehingga DPK perbankan masih tetap didominasi oleh DPK rupiah (84,2%) dengan pangsa terbesar pada deposito. Pangsa deposito mencapai 49,5% dari total DPK dan sebagian besar DPK (58,1%) dimiliki oleh perorangan.

Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan kredit pada pada saat memasuki awal tahun 2006, pada triwulan III-2006 kredit perbankan mengalami peningkatan sebesar 4,3% (qtq) sejalan

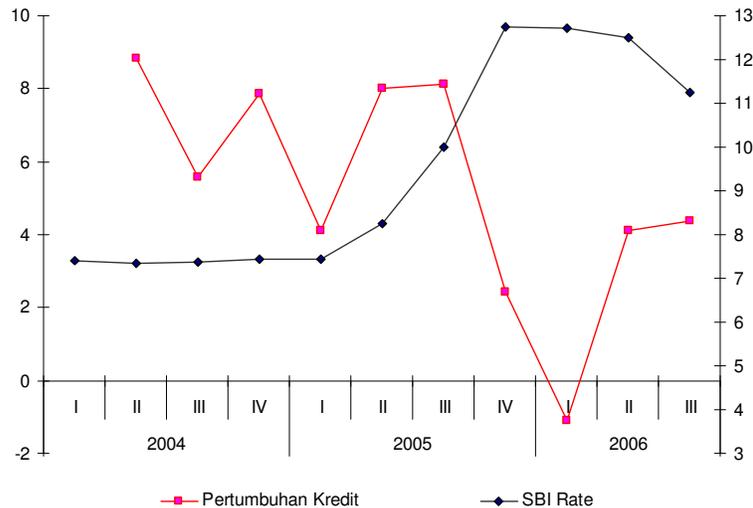
dengan membaiknya indikator-indikator ekonomi makro. Peningkatan kredit dalam kurun waktu tersebut meskipun lebih rendah dibanding laporan triwulan-III tahun sebelumnya, namun bulan terakhir triwulan-III 2006 menunjukkan bahwa kredit naik paling tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya, yakni sekitar 2,4%, sehingga posisi kredit pada triwulan-III 2006 menjadi Rp 741,087 triliun.

Sejalan dengan peluang menurunnya tingkat suku bunga dalam periode-periode ke depan yang terkait dengan kecenderungan turunnya BI Rate, kegiatan perekonomian yang lebih menjanjikan dan beberapa kebijakan di bidang perbankan yang bersifat relaksasi yang dibungkus dalam Pakto 2006, di harapkan perbankan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukan ekspansi kredit. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa menurunnya BI rate cenderung diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan kredit, khususnya sejak triwulan-II 2006.

**Gambar 3.1. Posisi Penyaluran Kredit Bank Umum (Rp miliar)**



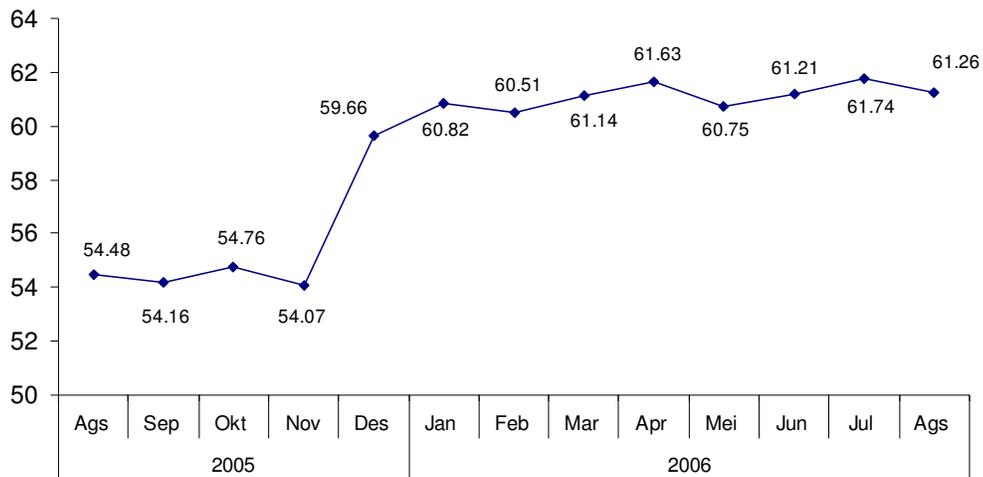
**Gambar 3.2. Pertumbuhan Kredit dan BI Rate (%)**



Posisi simpanan masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan relatif lebih besar dibanding kenaikan kredit, yang posisi laporan naik 1,7% (qtq), mengakibatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami sedikit penurunan dari 61,74% pada Juli 2006 menjadi 61,26% pada Agustus 2006, dan mengindikasikan bahwa perbankan mengalami kelebihan likuiditas.

Namun demikian, animo dunia usaha terhadap permintaan kredit tampak meningkat relatif tinggi 1 bulan terakhir. Seperti yang dinyatakan oleh Bank Indonesia, ini tercermin pada meningkatnya UL (*undisbursed loan*) perbankan selama triwulan-III 2006 yang naik cukup signifikan sebesar Rp 6,5 triliun, terbesar sepanjang tahun 2006 mengindikasikan cukup banyak pengajuan kredit oleh dunia usaha (*demand side*) namun belum dapat dimanfaatkan segera oleh debitur karena berbagai alasan terutama menunggu suku bunga kredit turun lebih jauh. Selain itu, juga mungkin karena kalangan bisnis belum berani mengambil resiko untuk mengambil kreditnya secara penuh. Ekspansi bisnis terhambat kendala mulai dari daya serap pasar yang masih lemah hingga daya saing produk domestik yang kalah bersaing dengan produk-produk asal RRC. Peningkatan UL yang cukup signifikan tadi menunjukkan bahwa perbankan sebenarnya memiliki kecenderungan untuk lebih menyalurkan kredit, dan menunjukkan adanya masalah di sektor riil.

**Gambar 3.3. Loan to Deposit Ratio Bank Umum (%)**

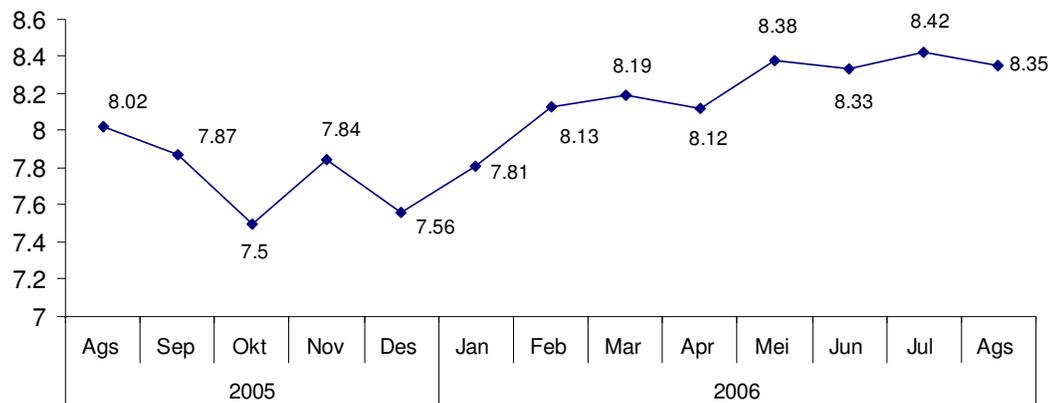


**3.1.1.2 Non-Performing Loan (NPL)**

Sejak awal tahun 2006, tampak bahwa kualitas kredit perbankan menunjukkan kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum menunjukkan perbaikan yang substansial. Pada triwulan-III 2006, NPL mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari 8,42% menjadi 8,35%. Menurut Bank Indonesia, kecenderungan naiknya NPL

hingga triwulan-III 2006 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh naiknya jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 1,5 triliun. Kenaikan jumlah kredit bermasalah tersebut tercermin pada peningkatan kredit kategori Macet sebesar Rp 4,8 triliun (11,2%) pindahan dari kategori Kurang Lancar dan Diragukan yang masing-masing turun sebesar Rp Rp 2 triliun (15,2%) dan Rp 1,1 triliun (9,1%). Untuk mengimbangi NPL, perbankan telah menaikkan Penyisihan Penghapusan Kredit sebesar Rp 1,6 triliun sehingga net NPL perbankan mengalami penurunan mendekati batas indikatif 5,0% dari 5,1%. Penyediaan cadangan Penyisihan Penghapusan Kredit ini sedikit banyaknya tentu dapat mempengaruhi ekspansi penyaluran kredit oleh perbankan. Namun demikian, perbankan akan tetap menyalurkan kredit karena selain merupakan tugas utama perbankan sebagai lembaga intermediasi finansial juga karena kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi perbankan. Sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit, diharapkan kualitas kredit perbankan akan semakin membaik, khususnya bila perbankan semakin prudent dalam menyalurkan kredit disertai dengan pengawasan dan pengarahan yang baik oleh Bank Indonesia.

**Gambar 3.4. Non Performing Loan (NPL) Bank Umum (%)**



### 3.1.1.3 Perkembangan Suku Bunga

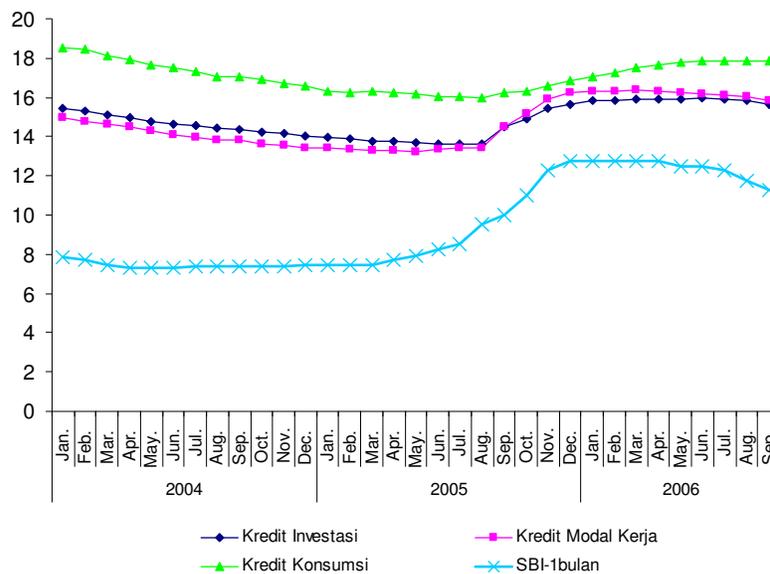
Setelah melakukan pelonggaran moneter sejak Mei 2006, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan BI Rate pada awal Oktober 2006 dan awal November 2006. Dengan penurunan yang mencapai 50 bps pada Oktober 2006 dan 50 bps pada November 2006 berarti BI telah menurunkan suku bunganya sebesar 250 bps dan menjadikan BI Rate berada pada level 10,25 persen di awal November 2006. Langkah BI menurunkan BI Rate memberikan titik terang untuk mendorong perbankan memaksimalkan penyaluran kredit pada hingga akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007. Bersamaan dengan pelonggaran sejumlah ketentuan, khususnya pelonggaran BMPK, penurunan BI rate menunjukkan kecenderungan menyeret turun suku bunga kredit sehingga selanjutnya diharapkan mendorong ekspansi kredit perbankan pada periode ke depan.

Namun demikian, penurunan suku bunga tampaknya tak akan berpengaruh banyak bagi iklim bisnis jika pemerintah tidak turut

memberikan beragam insentif lainnya yang dibutuhkan bagi pengembangan investasi. Dunia usaha selama ini kerap mengeluhkan masalah-masalah klasik yang diidap oleh perekonomian Indonesia seperti ekonomi biaya tinggi karena lambannya birokrasi dan banyaknya pungutan-pungutan yang tidak resmi.

Keberanian Bank Indonesia menurunkan suku bunga di tengah fenomena kenaikan suku bunga global terkait dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi, khususnya ekspor serta cadangan devisa yang meningkat, inflasi yang cenderung menurun, dan kurs rupiah yang stabil. Selain itu *spread* dengan suku bunga di luar negeri juga masih cukup tinggi dengan tidak berubahnya suku bunga *Fed Funds* pada level 5,25 persen, yang merupakan posisi terakhir sejak Juni 2006. Kekhawatiran terjadinya *capital outflow* dapat dikatakan tidak muncul, dengan masih meningkatnya aliran dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, terutama dalam bentuk investasi di pasar finansial seperti saham dan obligasi pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan cadangan devisa terus meningkat, yang pada akhir September 2006 mencapai US\$ 42,35 milyar.

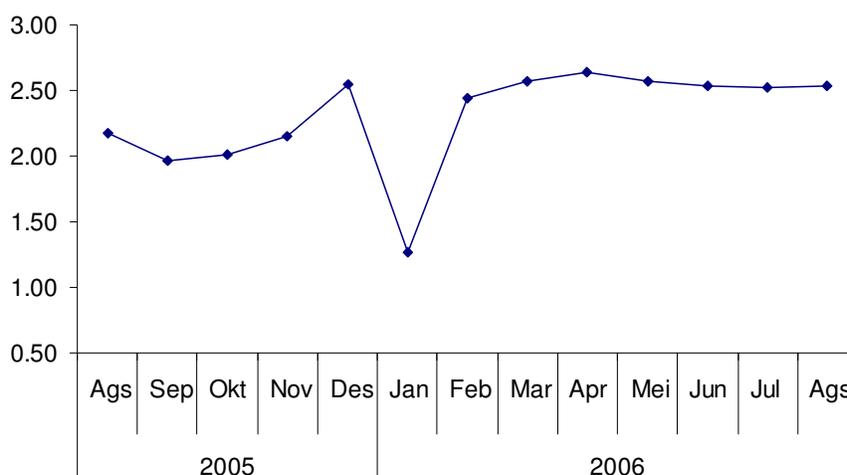
**Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Suku Bunga (%)**



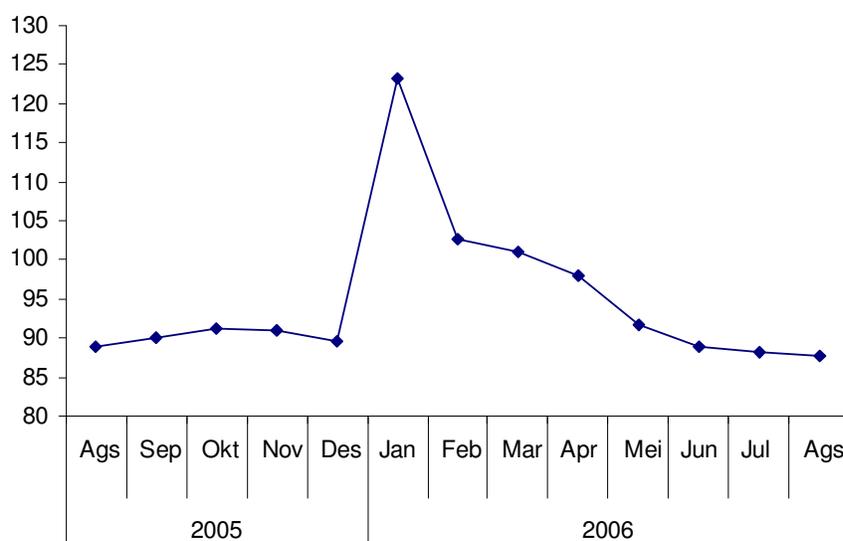
### 3.1.1.3 Profitabilitas

Dibanding dengan posisi triwulan sebelumnya, selama triwulan III-2006 rasio profitabilitas perbankan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh indikator *Return on Assets* (ROA), masih stabil dan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan awal tahun. Pada bulan Agustus 2006, ROA bank umum mencapai sekitar 2,53%. Sementara itu, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank umum menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, yang mengindikasikan semakin membaiknya efisiensi perbankan di bandingkan dengan awal tahun 2006.

**Gambar 3.6. Return on Asset Bank Umum (%)**



**Gambar 3.7. Rasio Efisiensi, BOPO (%)**



Net interest income (NII) perbankan lebih rendah dari pada triwulan sebelumnya, yang terkait dengan rendahnya pertumbuhan kredit bulanan selama triwulan-III 2006 dibandingkan dengan pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya. Sementara itu, kenaikan biaya operasional—khususnya biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)—pada periode laporan tidak terlalu besar sehingga rasio efisiensi BOPO perbankan relatif stabil. Ini kemudian berpengaruh pada ROA perbankan yang sedikit mengalami peningkatan.

Perkembangan profitabilitas perbankan juga terkait dengan kecenderungan meningkatnya kesenjangan antara suku bunga kredit dan simpanan walaupun BI Rate terus mengalami penurunan. Ini

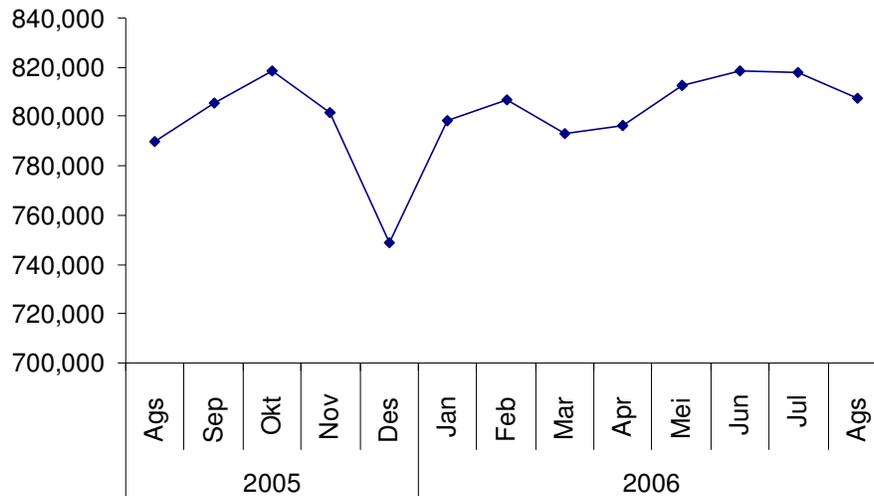
karena penyesuaian suku bunga simpanan lebih sensitif dibandingkan dengan suku bunga kredit.

### 3.1.1.4 Permodalan

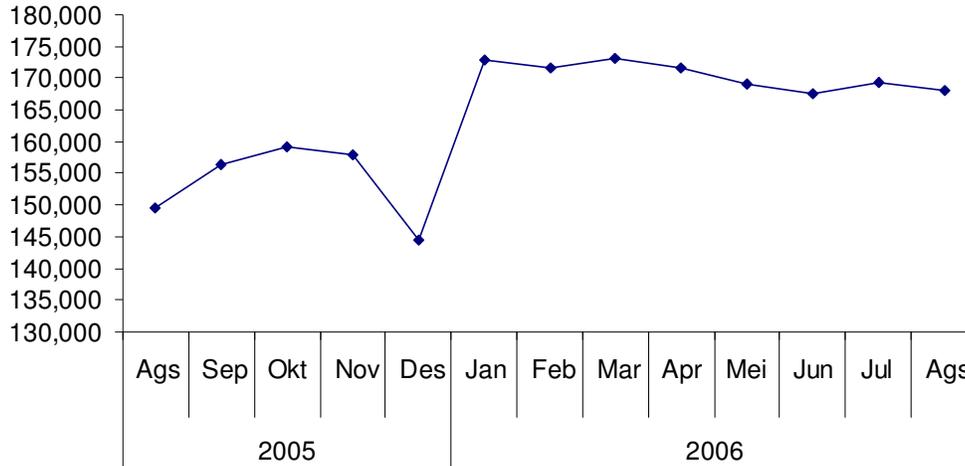
Pertumbuhan kredit yang relatif lebih kecil dibanding triwulan sebelumnya menyebabkan ATMR perbankan juga tumbuh lebih lambat. Di sisi lain, laba perbankan masih tumbuh cukup baik (meski dengan pertumbuhan yang lebih kecil dibanding posisi sebelumnya), menyebabkan rasio permodalan bank sedikit meningkat dari 20,5% menjadi 20,8%. Menurut Bank Indonesia, rasio permodalan tersebut, selain tergolong cukup besar (bahkan tertinggi dikawasan Asia), juga sebagian besar merupakan modal inti (Tier 1). Rasio modal inti terhadap ATMR perbankan saat ini mencapai mencapai 17,7% (naik dari posisi sebelumnya yang sebesar 17,6%).

Sementara itu, nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio modal terhadap ATMR, pada triwulan-III 2006 mulai menunjukkan kenaikan hingga mencapai angka 20,8% setelah terus mengalami penurunan hingga triwulan sebelumnya. Dengan demikian, dari segi permodalan, perbankan Indonesia cukup *solvable* menghadapi risiko, mendukung untuk melakukan ekspansi kredit lebih besar.

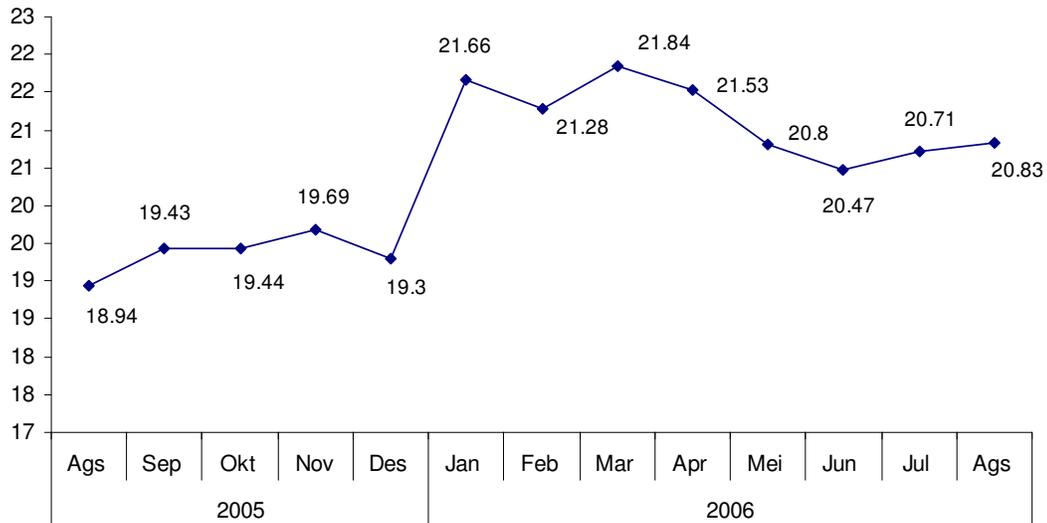
**Gambar 3.8. Aset Tertimbang Menurut Resiko (Rp miliar)**



**Gambar 3.9. Modal Bank Umum (Rp miliar)**



**Gambar 3.10. Capital Adequacy Ratio Bank Umum (%)**



### 3.1.2 Perkembangan Pasar Modal

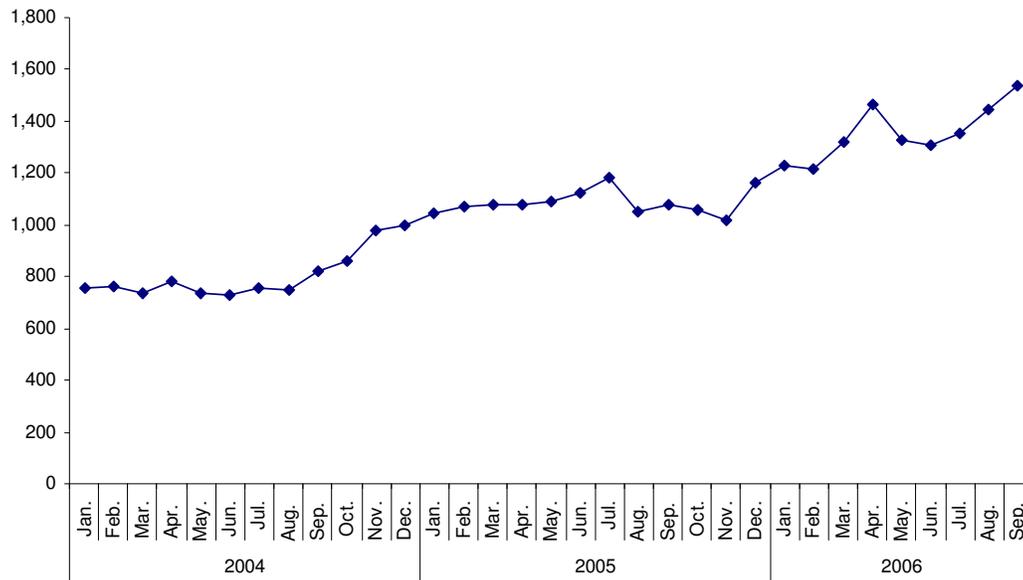
#### 3.1.2.1 Pasar Saham

Pergerakan bursa saham di Indonesia menunjukkan penguatan selama periode triwulan-III 2006. Penurunan BI Rate selama 3 kali pada triwulan III-2006, sejalan dengan angka inflasi dan nilai perdagangan yang membaik, semakin mendorong maraknya perdagangan pasar modal, tercermin dari meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi 1.535 pada bulan September 2006. Posisi ini menguat 224 (17,1%) dibanding triwulan sebelumnya, yang dengan demikian membayar kerugian yang sempat

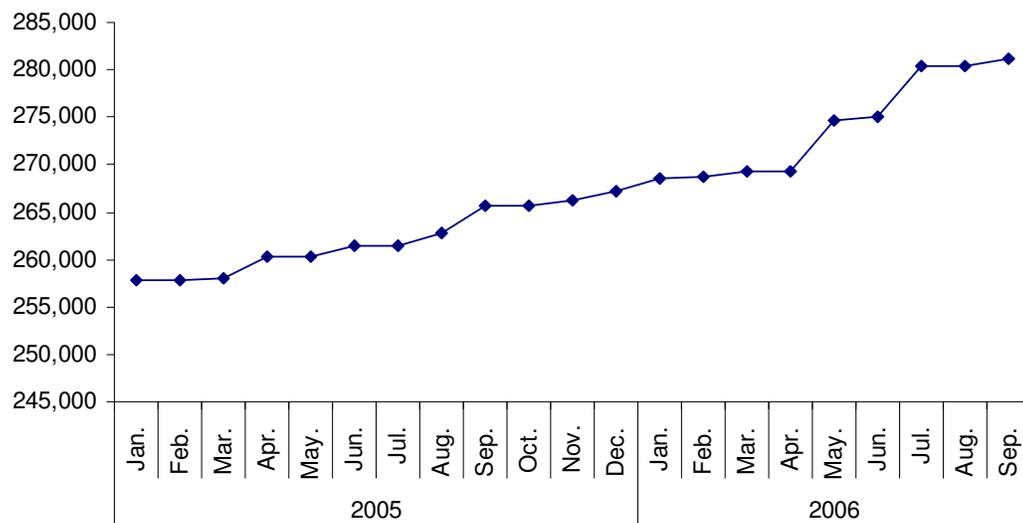
dialami pada bulan Mei dan Juni dimana penjualan obral sempat terjadi.

Pada sisi pembiayaan bisnis, penggunaan sumber dari pembiayaan pasar modal terus menunjukkan peningkatan seperti tercermin pada nilai emisi saham yang terus meningkat hingga triwulan-III 2006. Pada bulan September 2006, nilai emisi saham mengalami sedikit kenaikan dibanding bulan sebelumnya, yakni 0,31 persen menjadi Rp 281,227,6 miliar. Di bandingkan dengan triwulan sebelumnya, berarti mengalami kenaikan sebesar 2,23% persen.

**Gambar 3.11. Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta**



**Gambar 3.12. Nilai Emisi Saham di BEJ (Rp Miliar)**



Reaksi pasar yang mendorong indeks harga terlihat dari kondisi sebelum dan sesudah penurunan BI Rate dimana perdagangan saham

semakin ramai. Dari sisi domestik, sentimen positif berupa kesesuaian ekspektasi pelaku pasar atas penurunan BI Rate. Seperti yang telah diharapkan, suku bunga Bank Indonesia turun 50bps menjadi 11,25% pada tanggal 5 September tahun ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2006 yang cukup baik, dan pergerakan nilai tukar yang cenderung stabil mendorong investor untuk menambah portofolio investasinya di pasar saham. Sentimen positif juga datang dari kenaikan *sovereign rating* Indonesia oleh lembaga S&P pada akhir Juli.

Sampai dengan bulan Agustus 2006, sektor yang menunjukkan kinerja terbaik di pasar modal adalah sektor yang sensitif terhadap tingkat suku bunga seperti otomotif dan perbankan/keuangan yang masing-masing naik 11,84% dan 8,52%. Penurunan suku bunga mendorong sentimen investor di mana mereka percaya bahwa penjualan mobil dan sepeda motor telah melewati masa titik terendahnya dan diharapkan penjualan akan mulai membaik. Penjualan mobil dari Astra International di harapkan menguat dengan keluarnya versi/mesin baru dari model Avanza dan Xenia. Sementara itu, saham-saham perbankan yang naik pesat adalah bank-bank yang menikmati keuntungan besar dari penurunan suku bunga seperti bank-bank yang memiliki banyak obligasi pemerintah dengan suku bunga tetap dan porsi besar dari deposito yang sensitif terhadap suku bunga, seperti time deposit.

Sementara itu, kinerja sektor gas, mineral dan pertambangan turun sejalan dengan turunnya harga saham Bumi Resources dan Medco. Harga saham Bumi turun dengan pembatalannya untuk membeli Energi. Saham Medco turun setelah Medco tidak menjual anak perusahaannya Apexindo ke perusahaan India, seperti yang sempat diberitakan sebelumnya, dan juga penumpahan lumpur panas dari anak perusahaan Lapindo (Medco memiliki 32% saham di Lapindo) yang makin tidak terkendali.

Dari sisi investor, perdagangan oleh investor asing masih mempengaruhi perilaku investor domestik. Perkembangan kondisi global, yang ditandai oleh bertahannya suku bunga AS menyebabkan pasar saham kembali *bullish*. Hal ini mendorong investor asing untuk menambah portofolio saham di Indonesia yang tercermin dari besarnya posisi net beli asing selama periode laporan. Relatif besarnya pembelian saham oleh investor non residen mempengaruhi pemodal lokal untuk melakukan hal yang serupa sehingga mempengaruhi kenaikan IHSG. Selama triwulan III-2006, posisi net beli asing mencapai Rp 3,5 triliun, meningkat dibanding triwulan II-2006 sebesar Rp 3,2 triliun. Sementara untuk rata-rata harian, net beli asing juga meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 52 miliar/hari menjadi sebesar Rp 58 miliar/hari.

Di sisi eksternal, kebijakan bank sentral AS yang menahan kenaikan suku bunga *Fed Funds Rate* untuk kedua kalinya telah mendorong pasar modal dunia untuk meningkat. Sentimen global ini kemudian ikut mendukung peningkatan IHSG. Secara keseluruhan, membaiknya kondisi fundamental Indonesia serta kemungkinan penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut semakin mendorong

minat investor domestik maupun asing untuk memperbesar aktivitasnya.

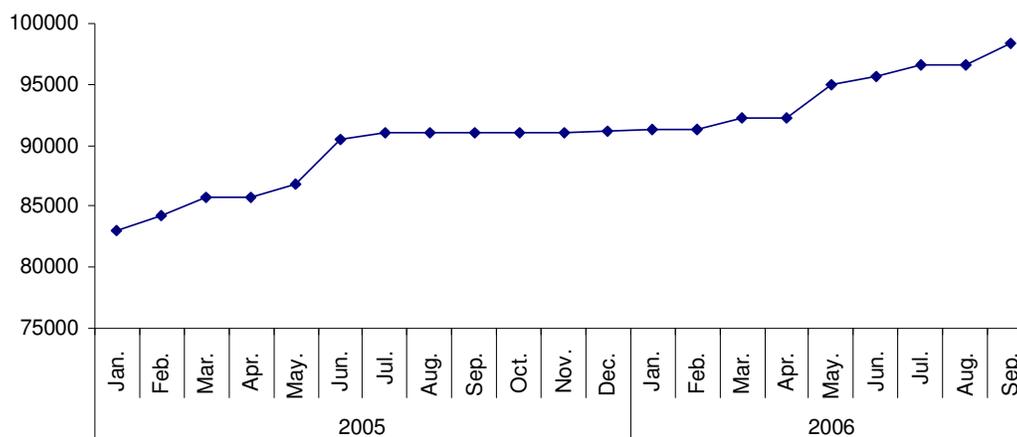
Diperkirakan bahwa kinerja bursa saham tahun 2006 dan 2007 masih positif dengan menguatnya indikator ekonomi yang akan menyertai penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga akan menjadi pendorong untuk konsumsi swasta dan investasi, dan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2006 dan 2007. Ini membuat menimbulkan pandangan yang positif terhadap bursa saham di Indonesia di tahun depan.

Aktivitas di pasar saham juga diperkirakan akan semakin marak sehubungan dengan adanya rencana dari perusahaan-perusahaan Malaysia untuk melakukan pencatatan ganda (*dual listing*) di Kuala Lumpur dan Jakarta. Pada tanggal 22 Agustus 2006 perwakilan Kuala Lumpur *Business Club* (KLBC) bersama otoritas pasar modal yang disertai 40 perusahaan telah melakukan kunjungan ke BEJ. Pada saat yang sama BEJ juga sedang menyelesaikan peraturan pendukung mengenai *dual listing* yang diharapkan selesai pada akhir tahun ini, sehingga rencana *dual listing* dapat terealisasi pada awal tahun 2007. Mengingat selama ini sudah ada perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia, khususnya perkebunan, maka kemungkinan besar pada tahap awal yang akan dilakukan *dual listing* adalah perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut. Selain itu perusahaan-perusahaan dalam bidang infrastruktur juga kemungkinan besar akan segera melakukan pencatatan ganda.

### **3.1.2.2 Pasar Obligasi**

Tingkat suku bunga yang cenderung menurun akan menjadi momentum bagi para emiten, baik korporasi BUMN dan swasta maupun pemerintah, untuk menerbitkan obligasi. Dengan turunnya tingkat suku bunga maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar bunga atau kupon (*cost of fund*) menjadi lebih rendah. Namun demikian, bagi investor masih akan memperoleh tingkat kupon yang lebih besar dari yang diterimanya dari instrumen deposito. Terdapat banyak kepentingan bagi para emiten untuk menerbitkan obligasi. Bagi korporasi, baik BUMN maupun perusahaan swasta, sebagian besar akan memanfaatkan dana hasil pengeluaran obligasi untuk menambah modal kerja dan sebagian di antaranya akan digunakan untuk melakukan refinancing terhadap utang-utangnya seperti yang akan dilakukan oleh PT Pakuwon dan PT BSD. Sedangkan bagi pemerintah penerbitan obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Obligasi Ritel Indonesia (ORI) akan digunakan membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan maupun pengeluaran rutinnya.

**Gambar 3.13. Nilai Emisi Obligasi (Rp milyar)**



Dalam semester akhir tahun 2006 ini hingga tahun 2007 mendatang, diperkirakan akan terjadi penerbitan obligasi korporasi secara besar-besaran. Sampai akhir tahun 2006 setidaknya akan diterbitkan obligasi-obligasi korporasi dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan nilai kapitalisasi 200 juta dolar, PT Bank Jabar senilai Rp 750 miliar dan PT PNM Madani Rp 300 miliar. Sedangkan untuk tahun 2007 sudah terdapat beberapa perusahaan yang sudah mengambil posisi untuk mengeluarkan obligasi korporasi, yaitu PT Bank Niaga Tbk. dengan nilai kapitalisasi Rp 1,5 triliun, PT Bank Tabungan Negara Rp 1 triliun, PT Bank Mega senilai Rp 500 miliar dan PT Pupuk Kaltim dengan nilai kapitalisasi Rp 600 miliar. Dalam penawaran obligasi Bank Ekspor Indonesia (BEI) beberapa waktu yang lalu, terjadi kelebihan pemesanan (*oversubscribed*) 2,27 kali dari nilai yang ditawarkan Rp 500 miliar. Pada pertengahan Oktober yang akan datang PT Bumi Serpong Damai (BSD) juga akan menawarkan obligasi keduanya senilai Rp 500 miliar, dengan indikasi kupon antara 14,5% sampai dengan 15,5%.

Pasar obligasi dalam periode yang akan datang, juga akan semakin marak dengan akan diterbitkannya peraturan tentang pedoman penerbitan obligasi daerah (*municipal bond*) pada tahun ini sesuai *master plan* pasar modal Indonesia. Dengan demikian, akan semakin muncul sinergi antara masyarakat dengan kegiatan pembangunan daerahnya melalui penerbitan obligasi daerah yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah daerah.

### **3.1.3 Prospek dan Tantangan 2007**

Dengan melihat perkembangan yang telah terjadi sampai sejauh ini, kemanakah arah perbankan dan pasar modal Indonesia tahun depan? Sejalan dengan prospek kinerja perekonomian yang lebih menjanjikan maka di tahun depan diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas dalam sistem finansial Indonesia, khususnya perbankan dan pasar modal. Suku bunga yang diharapkan akan semakin rendah pada tahun depan akan mendorong pertumbuhan

kredit yang signifikan seiring dengan kenaikan permintaan kredit oleh sektor riil. Walaupun NPL masih tetap tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sehingga memberi kendala bagi ekspansi kredit, namun perbankan harus tetap menyalurkan kredit karena kredit merupakan sumber pendapatan terbesar dan penyaluran kredit merupakan tugas utama perbankan sebagai lembaga intermediasi finansial. Seiring dengan laju pertumbuhan kredit NPL diharapkan menurun, khususnya bila perbankan, dibawah pengawasan Bank Indonesia, lebih intensif mengelola kredit-kredit bermasalah dan lebih *prudent* dalam menyalurkan kredit.

Demikian pula, prospek perekonomian yang cenderung membaik akan mendorong kenaikan aktivitas di pasar modal. Pembiayaan dunia usaha dari pasar saham dan pasar obligasi akan diharapkan semakin meningkat. Suku bunga yang semakin rendah akan mendorong pembelian aset dan pengumpulan dana di pasar modal sehingga mendorong aktivitas dan harga di pasar modal. Aturan BAPEPAM yang membolehkan reksadana untuk diperjual belikan di pasar modal akan menambah ragam aset finansial yang bisa diperdagangkan di bursa efek. Secara tidak langsung, hal ini juga akan membantu proses 'financial deepening' di Indonesia.

Dalam upaya penanganan faktor risiko secara lebih sistematis dan komprehensif untuk menghindari terulangnya 'crash' sektor finansial sebagaimana terjadi di Indonesia tahun 1997/1998, Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko telah mewajibkan para pimpinan dan manajer bank, khususnya yang terkait dengan pengelolaan risiko, untuk memperoleh sertifikasi manajemen risiko. Kebijakan ini, secara perlahan tetapi pasti, telah membuat dunia perbankan menjadi lebih kokoh dan tahan terhadap 'goncangan' risiko. Sebagai ejawantahnya, beberapa lembaga pemeringkat internasional telah menaikkan 'rating' Indonesia. Tren ini, meskipun lambat, dipercaya akan terus berlanjut pada tahun depan.

Di sektor perbankan, kebijakan 'Single Presence Policy' akan membuat sektor ini menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Meskipun demikian, beberapa kendala yang masih mengganjal, membuat pelaksanaannya masih memerlukan beberapa waktu transisi sebelum bisa sepenuhnya diterapkan sehingga implementasinya belum akan terjadi secara penuh pada tahun depan.

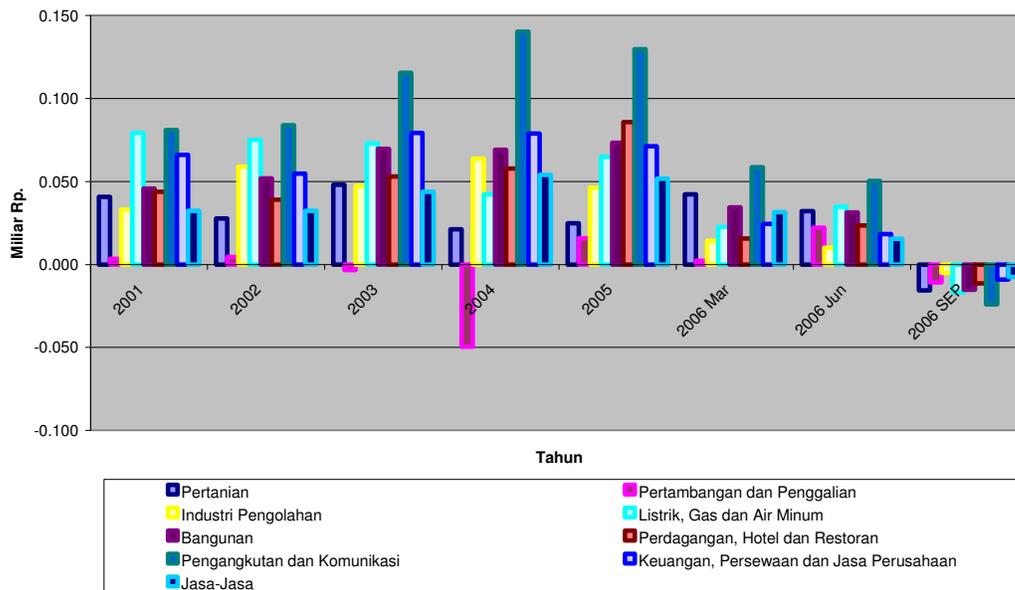
Perlu diperhatikan bahwa perkembangan sektor finansial sangat terkait dengan prospek perekonomian secara keseluruhan. Masalah yang dihadapi sektor finansial di Indonesia saat ini adalah masih lambannya pertumbuhan sektor riil. Dunia usaha masih merasakan dampak kenaikan harga-harga yang mempengaruhi biaya produksi dan daya serap pasar. Masalah klasik seperti birokrasi dan biaya tinggi masih tetap dikeluhkan. Khususnya terkait dengan otonomi daerah yang diharapkan menjadi momentum untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam beberapa hal justru lebih banyak menjadi pemungut resmi yang menyulitkan dunia usaha.

### **3.2. INDUSTRI NON MIGAS**

Pada tahun 2007, dengan menguatnya fondasi ekonomi makro Indonesia dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan 4,9% serta pertumbuhan volume perdagangan dunia sebesar 7,6% (BI, 2006) maka terdapat peluang pertumbuhan sektor produksi atau sektor riil Indonesia di tahun 2007 dengan catatan terjadi pertumbuhan investasi baik PMA, PMDN dan kredit produktif perbankan serta penyediaan infrastruktur. Perbaikan iklim investasi baik di pusat dan daerah pada tahun 2006 diharapkan mampu menarik PMDN dan PMA. Penurunan BI rate hingga 9,75 % di awal Desember 2006 diharapkan mampu mendorong perbankan menyalurkan kredit produktif.

Sektor produksi Indonesia pasca krisis ekonomi ditopang oleh pertumbuhan sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencatat pertumbuhan relative tinggi dibandingkan sektor produksi lain (lihat Gambar 1). Pertumbuhan sektor perdagangan serta pengangkutan dan komunikasi yang relative tinggi merespon pertumbuhan aliran barang dan orang bersumber pada peningkatan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah serta ekspor dan impor. Pertumbuhan industri pengolahan yang sebelum krisis ekonomi rata-rata 12% namun setelah krisis ekonomi melambat bahkan sejak tahun 2005 cenderung lebih menurun. Industri pengolahan merupakan sektor tumpuan penyerapan tenaga kerja formal yang mengalami deindustrialisasi akibat masalah inefisiensi dan tekanan pertumbuhan industri Negara tetangga termasuk China yang sangat pesat.

### Pertumbuhan Sektor Produksi Atas Dasar Harga Konstan 2000



Gambar 3.15

Pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan yang tergolong tinggi sebesar 5.77% pada tahun 2005 menunjukkan kecenderungan menurun di tahun 2006 sejalan dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi swasta merespon penurunan daya beli masyarakat. Penurunan konsumsi terutama terjadi pada penurunan pembelian kendaraan penumpang, barang elektronik dan pakaian jadi (BI, 2006). Artinya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tahun 2006 dan 2007 walaupun masih didorong oleh pertumbuhan konsumsi namun dengan tingkat yang menurun dan otomatis sangat berharap pada pembentukan investasi baik dari swasta maupun pemerintah dengan tingkat yang cukup tinggi. Tahun 2007 pertumbuhan sektor perdagangan diprediksi masih tinggi terutama karena dukungan tersedianya infrastruktur tempat perdagangan yang tumbuh pesat di kota-kota besar.

Besaran nilai tambah setiap sektor produksi seperti ditunjukkan oleh tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2006. Walaupun meningkat tetapi peningkatannya menunjukkan penurunan

dibandingkan tahun 2005. Secara rata-rata nilai tambah seluruh sektor produksi meningkat sebesar 3,88% pada kuartal 3 tahun 2006. Peningkatan ini lebih kecil dibandingkan peningkatan nilai tambah seluruh sektor produksi pada tahun 2005 sebesar 5,31 %.

Tabel 3.I Output Sektor Produksi Harga Konstan Tahun 2000

Tahun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<b>2001</b>	5420 7.86	41923 .05	96399 .48	2098 .43	1914 3.35	56113 .15	1625 3.05	2886 5.78	3243 8.45
<b>2002</b>	5642 1.43	42061 .07	99580 .95	2264 .60	2002 0.10	58568 .25	1756 9.03	3077 1.38	3348 9.33
<b>2003</b>	5798 0.40	42246 .72	10544 5.85	2434 .50	2105 9.83	60852 .30	1904 3.28	3245 8.05	3457 4.23
<b>2004</b>	6076 9.00	42106 .70	11043 8.68	2612 .00	2252 5.85	64074 .88	2124 4.78	3502 9.33	3608 8.55
<b>2005</b>	6205 5.70	40025 .10	11748 8.10	2722 .45	2408 3.40	67776 .23	2422 4.18	3779 6.95	3803 4.33
<b>2006 Q1</b>	6359 7.83	40660 .50	12292 4.88	2899 .15	2585 0.95	73599 .08	2736 6.78	4048 9.90	3999 7.68
<b>2006 Q2</b>	6628 9.20	40747 .50	12467 5.50	2964 .40	2673 9.10	74748 .00	2897 1.00	4147 9.70	4126 0.90
<b>2006 Q3</b>	6841 6.30	41654 .40	12593 6.80	3067 .70	2757 7.80	76498 .70	3042 8.80	4224 2.30	4189 8.70
I. Sektor Pertanian II. Sektor Pertambangan dan Penggalian III. Sektor Industri Pengolahan IV. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum V. Sektor Bangunan VI. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran VII. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi VIII. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan IX. Sektor Jasa-jasa									

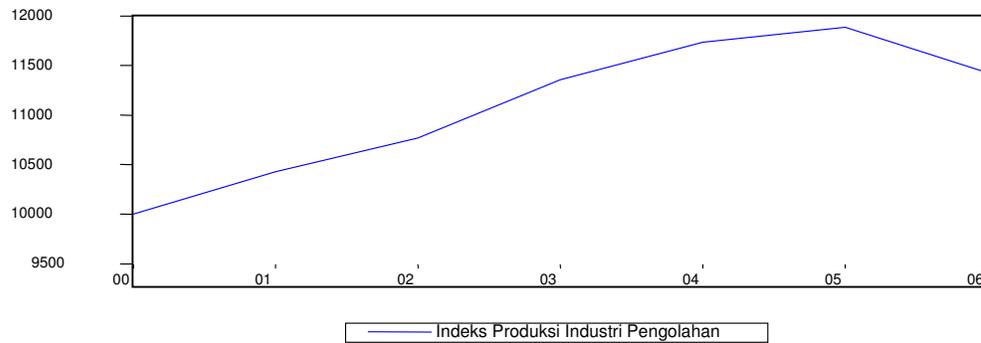
Sumber: Bank Indonesia

Selain prospek kegiatan perdagangan, prospek peningkatan produksi diharapkan dari sektor pertanian dan pertambangan terutama pada lima komoditas berbasis komoditas primer yang mencatat kontribusi ekspor terbesar seperti minyak kelapa sawit, tembaga, bijih kerak dan abu logam, bahan bakar mineral terutama batu bara serta karet dan karet. Prospek peningkatan produksi tahun 2007 akan terjadi seiring dengan terjadinya trend kenaikan harga dunia untuk komoditas primer. Insentif pajak berupa

pembebasan PPN 10% pada produk primer yang mulai diberlakukan Januari 2007 akan menjadi pendorong pertumbuhan di sektor primer ini.

Hingga tahun 2006, cabang industri pengolahan yang hingga kini masih mencatat kontribusi tertinggi terhadap PDB dan pertumbuhan paling tinggi yaitu industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pertumbuhan produksi dan omset penjualan di pasar domestic terjadi untuk otomotif dan sepeda motor, dan prospek pertumbuhan akan berlanjut di tahun 2007. Cabang kedua terbesar adalah industri pupuk, kimia dan barang karet.

Beberapa komoditas industri pengolahan yang memiliki prospek pertumbuhan ekspor cukup tinggi yaitu CPO, Tekstil dan produk tekstil, produk kimia, dan peralatan elektronika. Impor barang modal yang tumbuh 6% pada bulan Oktober 2006 merupakan signal peningkatan produksi di tahun 2007. Selain pembentukan barang modal, faktor terpenting bagi pertumbuhan produksi dan ekspor adalah peningkatan daya saing internasional melalui upaya menurunkan biaya-biaya non produksi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan yang belum terselesaikan hingga akhir tahun 2006 akan mendistorsi pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan dan beberapa sektor terkait lainnya. Permasalahan yang melekat pada pengembangan industri pengolahan terutama yang bukan orientasi ekspor berkaitan dengan masalah ketergantungan impor bahan baku (sekitar 55% impor non migas tahun 2005 adalah bahan baku industri), tingginya biaya non produksi (perpajakan, perijinan, dan biaya birokrasi) serta masalah ketenagakerjaan telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan total produksi (lihat Grafik 1). Akibatnya utilisasi kapasitas produksi yang rata-rata sekitar 70% masih akan sulit ditingkatkan di tahun 2007.



Gambar 3.16

Dari struktur industri pengolahan diketahui bahwa lebih dari 60% output industri bercorak industri padat karya dimana rantai nilai relative pendek sehingga tidak mudah untuk menciptakan peningkatan nilai tambah, seperti industri makanan, minuman dan tembakau serta tekstil dan pakaian jadi. Mengingat cabang industri ini menyerap tenaga kerja banyak maka peranannya dalam perekonomian Indonesia menjadi sangat penting. Data tahun 2003, sebaran lokasi industri terbanyak di Pulau Jawa yaitu di Jawa Tengah (26,36%) diikuti Jawa Timur (18,14%) dan Jawa Barat dan Banten (12,80%).

Prospek pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2007 didukung juga oleh adanya insentif pajak berupa pembebasan PPN 10% untuk produk primer yang mulai diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari 2007. Hal ini akan memberikan insentif pada para produsen dalam negeri untuk mendapatkan bahan baku dengan mudah dan mampu bersaing dengan produsen luar negeri.

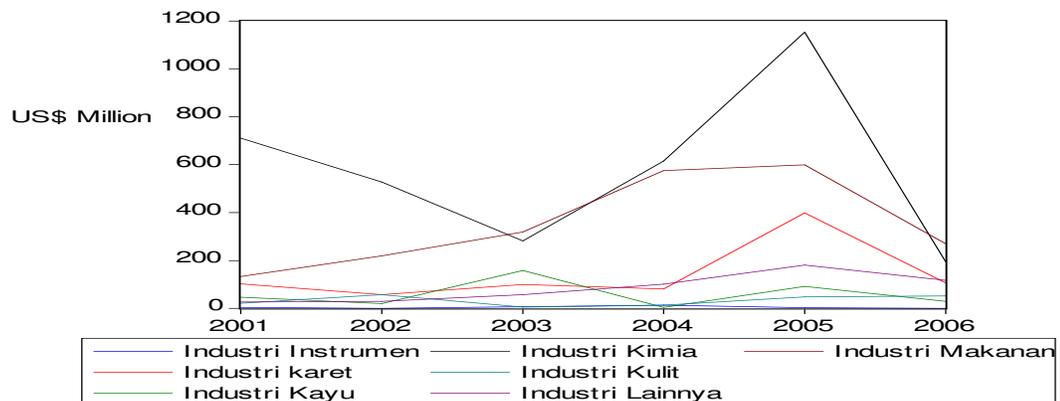
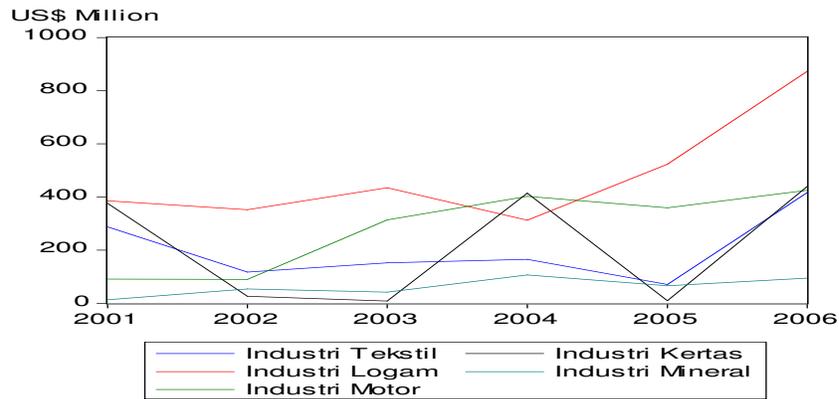
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Peraturan Presiden No. 7/2005) yang memfokuskan pada pembangunan industri jangka menengah (2004-2009) pada penguatan dan penambahan klaster-klaster industri inti, yaitu Industri Makanan dan Minuman, industri pengolahan hasil laut, industri tekstil dan produk tekstil, Industri alas kaki, industri kelapa sawit, industri barang kayu, industri karet, industri pulp dan kertas, industri

petrokimia, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan di sektor-sektor industri tersebut.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor industri. Pada Rapat Kerja Departemen Perindustrian pada tanggal 2 - 5 Mei 2006 di Jakarta, Menteri Perindustrian telah mengeluarkan dan terus mengusulkan berbagai insentif untuk menarik investasi di sektor industri untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk memperbaiki mata rantai produksi dan distribusi secara lintas lembaga baik di pusat maupun di daerah. Dalam kaitan perbaikan iklim investasi, Departemen Perindustrian mengusulkan beberapa insentif meliputi : (1). Insentif untuk industri yang melakukan kegiatan litbang dengan dana sendiri; (2). Insentif keringanan pajak bagi pengadaan perlengkapan (peralatan dalam rangka kegiatan litbang); (3). Insentif pajak penghasilan untuk penanaman modal bidang usaha tertentu atas daerah tertentu, untuk menumbuhkan industri-industri yang belum ada di Indonesia serta daerah tertentu yang tertinggal; (4). Pembebasan PPN untuk pembelian bahan baku/komponen (kapas, komponen boiler, komponen mesin peralatan listrik, komponen kapal). Insentif ini diharapkan mampu mendorong investasi di berbagai sektor industri sehingga bisa mendorong pertumbuhan di sektor-sektor industri tersebut.

Memperhatikan trend persetujuan nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sektoral yang fluktuatif dan realisasinya cenderung menurun menunjukkan masalah investasi masih menjadi kendala pembangunan ekonomi yang harus mendapat penanganan prioritas. Fluktuasi aliran penanaman modal asing diharapkan mempunyai trend meningkat sejak tahun 2005 terutama di sektor pertambangan, kontruksi dan pengangkutan.

Grafik 3.17 PMA Sektor Industri



Relokasi perusahaan asing ke luar Indonesia hingga tahun 2002 mengakibatkan aliran PMA ke sektor industri pengolahan menjadi stagnan. Namun demikian, dengan kinerja ekspor yang baik pada beberapa cabang industri maka pada tahun 2007 penanaman modal asing (PMA) diprediksi akan meningkat. Walaupun realisasi PMA total menunjukkan trend menurun pada tahun 2006 namun ada prospek penggiatan sektor produksi tahun 2007 diindikasikan oleh meningkatnya trend realisasi PMA untuk sektor industri tekstil, kertas, Logam, Mineral bukan logam, elektronika dan kendaraan bermotor. Realisasi PMDN pada industri pengolahan diprediksikan meningkat pada pada tahun 2007 terutama cabang industri mineral bukan logam seperti batubara.

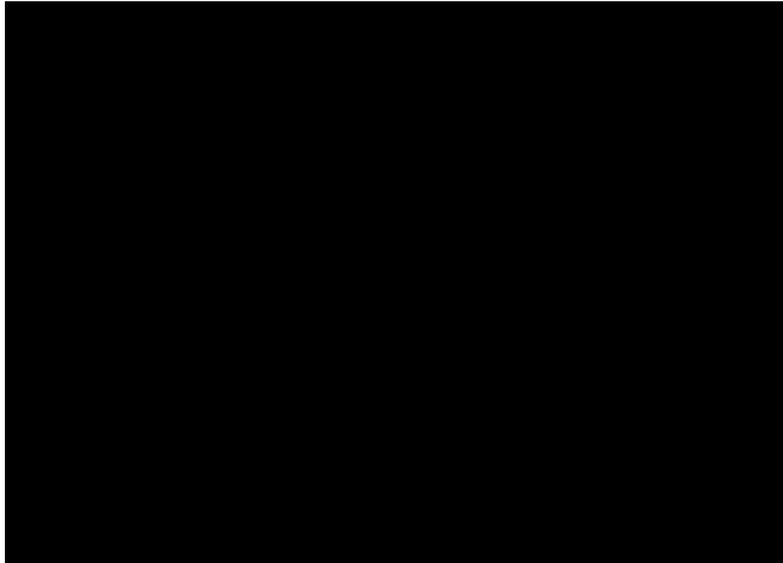
Dengan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen di tahun 2006 (proyeksi pemerintah, namun diperkirakan sulit tercapai), diperkirakan dapat menyerap sekitar 1,7 juta hingga 1,8 juta angkatan kerja baru. Namun dengan kondisi ini, masih saja menciptakan pengangguran sebesar 300 ribu hingga 400 ribu orang angkatan kerja baru. Pada 2007, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen (sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2007), penyerapan tenaga kerja baru diharapkan 1,9 juta orang. Kebijakan pemerintah yang meningkatkan anggaran belanja negara—meski dengan konsekuensi meningkatkan defisit fiskal (budget deficit)—dan memfokuskan pengeluarannya pada sektor-sektor yang padat karya, diharapkan dapat mengurangi laju pertumbuhan pengangguran. Di samping itu, perbaikan iklim investasi yang kini terus diupayakan diharapkan dapat mendorong sektor riil sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

## **BAB IV.**

### **OUTLOOK 2007 OF REGIONAL DIMENSION**

#### **4.1 PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian daerah tidak lepas dari perkembangan perekonomian nasional dan perekonomian wilayah-wilayah lainnya. Interaksi antar daerah (baik barang, jasa, maupun tenaga kerja) serta kebijakan-kebijakan di tingkat nasional akan berdampak pada perekonomian suatu daerah. Gambaran mengenai perekonomian suatu daerah (Shaffer, 1993) dapat diilustrasikan seperti sebuah drum (Gambar-1), dimana perekonomian daerah sangat bergantung pada adanya arus keluar dan masuk pendapatan dan komoditi dari daerah lain atau nasional, besarnya potensi produk yang ada diwilayah bersangkutan, serta besarnya potensi kebocoran yang ada diwilayah tersebut (seperti tingkat pengangguran, dan pemborosan dalam penggunaan sumberdaya)



**Gambar-4.1**  
**Gambaran Perekonomian Daerah**

Sementara itu perkembangan kemajuan perekonomian daerah (menurut Blakely, 1989) akan sangat ditentukan oleh empat faktor penentu, *pertama*, Kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut (termasuk didalamnya pengertian mengenai kualitas tenaga kerja sehingga dapat memberikan akses lokasi yang baik bagi perusahaan

yang akan melakukan usaha didaerah tersebut), *kedua*, Basis pembangunan daerah (dalam pengertian bahwa adanya pengembangan institusi ekonomi yang baik yang mampu mendorong kearah peningkatan hasrat berusaha bagi kalangan dunia usaha), *ketiga*, Asset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah yang didasarkan pada kualitas lingkungan, *keempat*, Sumberdaya pengetahuan, dalam pengertian pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian (*Knowledge Base Development*).

Berdasarkan atas kedua pengertian tersebut maka dapat diambil suatu pengertian bahwa proses pembangunan ekonomi di daerah ditujukan untuk:

- Membentuk "institusi" baru yang mendukung perekonomian daerah
- Mengembangkan industri-industri alternatif
- Meningkatkan kapasitas pekerja agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik
- Mencari pasar yang lebih luas
- Terjadinya transfer teknologi, serta
- Membuka peluang investasi bagi para pengusaha

Oleh sebab itu pada dasarnya tujuan utama dari pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk meningkatkan inisiatif daerah untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakatnya (baik dari jumlah maupun jenis pekerjaan) dan merangsang peningkatan aktivitas ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka tantangan pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah diantaranya adalah:

- Bagaimana meningkatkan keterkaitan perekonomian daerah dengan wilayah yang lebih luas, agar terjadi peningkatan aliran potensi pendapatan dari luar daerah
- Berupaya untuk meningkatkan penggunaan sumberdaya daerah agar menghasilkan output, kesempatan kerja dan penghasilan yang lebih tinggi bagi masyarakatnya
- Bagaimana menurunkan potensi kebocoran daerah agar dapat meningkatkan pendapatan

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan daerah adalah Provinsi Jawa Barat, sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana melihat prospek perekonomian Jawa Barat di tahun 2007 nanti. Relevan dengan uraian di atas, maka untuk dapat melihat arah perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Barat perlu diperhatikan pengertian, proses dan tujuan pembangunan ekonomi daerah serta keberadaan faktor-faktor penentunya. Selain itu juga perlu sedikit dikemukakan tentang gambaran perekonomian nasional serta posisi strategis Jawa Barat di tingkat nasional.

Untuk tujuan tersebut maka pembahasan pada tulisan ini akan dibagi kedalam 5 bagian utama. *Bagian Pertama*, adalah membahas perkembangan perekonomian nasional selama ini dan prospeknya di tahun 2007. *Bagian Kedua* akan membahas mengenai kedudukan dan posisi perekonomian Jawa Barat terhadap nasional. *Bagian Ketiga dan Keempat*, akan membahas mengenai kondisi perekonomian Jawa

Barat hingga saat ini, dan prospek perkembangannya di tahun 2007. Sedangkan bagian terakhir merupakan kesimpulan dan implikasi kebijakan dari hasil prediksi perekonomian Jawa Barat di tahun 2007.

#### **4.2 PROSPEK PEREKONOMIAN NASIONAL**

Perekonomian Indonesia hingga tahun 2005 menunjukkan adanya kemajuan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% dan mulai menggeliatnya sektor riil yang dicirikan dengan adanya peningkatan pada investasi, baik PMA maupun PMDN. Dimana realisasi dari investasi PMA dan PMDN meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu menjadi sebesar USD 8,9 Milyar dan Rp. 30,6 Triliun (lihat tabel-2). Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan mulai tumbuhnya kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, sejalan dengan membaiknya posisi Indonesia berdasarkan penilaian lembaga pemeringkatan internasional.

Dari sisi sektoral (lihat tabel-1), perkembangan sektor-sektor yang dapat dijadikan indikator kemantapan perekonomian terlihat cukup memiliki potensi yang menjanjikan. Sektor Bangunan sebagai salah satu indikator tingkat akumulasi modal (merupakan komponen terbesar dalam PMTDB) menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Begitu juga dengan sektor pengangkutan dan komunikasi (sebagai indikator distribusi) memiliki pertumbuhan terbesar (lebih dari 12% sejak tahun 2003), kondisi ini sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan transportasi di dunia. Sektor keuangan juga bisa tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional, dan ini menggambarkan bahwa lembaga intermediasi di Indonesia mulai menjalankan fungsinya dalam penyaluran dana bagi sektor-sektor yang membutuhkan.

Meskipun perkembangan beberapa sektor ekonomi cukup menggembirakan, akan tetapi tidak demikian dengan sektor-sektor yang memiliki tenaga kerja besar (seperti pertanian, dan industri pengolahan). Sektor-sektor tersebut masih tumbuh dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini tentu saja memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena hingga saat ini kedua sektor tersebut dipercaya sebagai sektor yang memiliki employment multiplier yang cukup besar. Pertumbuhan yang terbatas pada kedua sektor tersebut akan memberikan dampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja yang mampu dilakukan oleh perekonomian - sementara itu laju pertumbuhan angkatan kerja Indonesia cukup besar, mencapai angka 2 juta orang per tahun. Oleh karenanya pertumbuhan yang terjadi di Indonesia tampaknya masih akan terbentur oleh permasalahan penyerapan tenaga kerja dan pengangguran, yang pada akhirnya berkaitan pula dengan permasalahan kemiskinan.

Pada dasarnya kondisi tersebut telah disadari oleh pemerintah Indonesia sehingga dalam laporan RKP 2007 di bulan Agustus 2006 Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tema pembangunan nasional di tahun 2007 adalah **"Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menanggulangi Kemiskinan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"**. Bahkan pemerintah telah meletakkan masalah kemiskinan dan pengangguran (kesempatan kerja) sebagai prioritas pertama dan kedua dari 9 prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah selama tahun 2007.

Tabel 4.1

## Pertumbuhan Komponen GDP Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)

	2001	2002	2003	2004	2005
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	3.83	4.38	4.72	5.05	5.60
- Tanpa Migas	5.11	5.09	5.62	5.99	6.48
- Migas	(5.30)	(1.25)	(2.88)	(3.52)	(3.26)
<b>Berdasarkan Lapangan Usaha</b>					
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	4.08	3.23	3.18	3.26	2.49
Pertambangan dan penggalian	0.33	1.00	(1.37)	(4.48)	1.59
Industri pengolahan Listrik, gas, dan air bersih	3.30	5.29	5.33	6.38	4.63
Bangunan	7.92	8.94	4.87	5.22	6.49
Perdagangan, hotel, dan restoran	4.58	5.48	6.10	7.49	7.34
Pengangkutan dan komunikasi	4.38	3.90	5.38	5.69	8.59
Keuangan, persewaan, dan jasa prs	8.10	8.39	12.19	13.38	12.97
Jasa-jasa	6.60	6.37	7.21	7.70	7.12
	3.24	3.75	4.41	4.85	5.16
<b>Berdasarkan Jenis Pengeluaran</b>					
Pengeluaran Konsumsi	3.88	4.74	4.55	4.86	4.41
-Rumah tangga	3.49	3.84	3.89	4.97	3.95
-Pemerintah	7.56	12.99	10.03	3.99	8.06
Pembentukan modal tetap Domestik					
bruto (PMTDB)	6.49	4.69	0.60	14.58	9.93
Ekspor barang dan jasa	0.64	(1.22)	5.89	13.50	8.60
Impor barang dan jasa (-/-)	4.18	(4.25)	1.56	27.07	12.35

Sumber: Bank Indonesia

Kondisi pengangguran di Indonesia saat ini memang sudah sangat mencemaskan. Besaran tingkat pengangguran terus bertambah, meskipun krisis ekonomi sudah berjalan selama 8 tahun. Dari tahun ke tahun angka tingkat pengangguran terbuka semakin bertambah, bahkan jauh lebih besar dibanding saat krisis ekonomi di tahun 1998 (tingkat pengangguran terbuka pada tahun 1998 sebesar 5,5% sedangkan tahun 2005 telah mencapai angka 10,86%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja semakin berkurang untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh perekonomian. Jika sebelum krisis setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap kurang lebih 500 ribu lapangan kerja baru, akan tetapi sejak tahun 2002 jumlah ini menurun menjadi kurang dari 250 ribu orang dan tahun 2005 sekitar 50 ribu orang saja. Salah satu penyebab dari hal ini,

seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, terjadi karena pertumbuhan Indonesia hingga saat ini masih didorong oleh sektor-sektor yang memiliki tingkat employment multiplier yang rendah (sementara sektor-sektor yang memiliki employment multiplier yang tinggi, seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah). Pertumbuhan suatu sektor kurang dari 3-4% pada dasarnya tidak akan membuka tambahan lapangan pekerjaan, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan sebesar itu masih dapat dicover oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja yang ada (Bagdja M, 2003). Oleh sebab itu tidak mengherankan jika tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus meningkat (tabel-3) lebih disebabkan karena adanya gangguan pertumbuhan pada sektor Pertanian dan Industri Pengolahan selama ini.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Izin	Nilai Investasi (Rp Milyar)	Jumlah Izin	Nilai Investasi (Juta US \$)
2001			454	3509.6
	160	9,890.8		
2002	108	12,500.0	442	3090.1
2003	119	11,890.0	570	5450.4
2004	129	15,264.7	544	4601.1
2005	214	30,665.0	909	8914.6
2006*)	128	13,545.9	770	4480.7

Keterangan : \*) hingga Oktober 2006  
Sumber : BKPM, berbagai edisi

**Tabel 4.3**  
**Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tahun	Angkatan kerja (Juta)	Tenaga kerja baru (Juta)	Penduduk yang bekerja (Juta)	Lapangan pekerjaan baru (Juta)	Pengangguran Terbuka (Juta)
1996	88.19	3.96	83.9	3.79	4.29
1998	92,7	Na	87,67	Na	5.5

1999	94.85	2.11	88.82	1.14	6.03
2000	95.65	0.94	89.84	1	5.81
2001	98.81	3.16	90.81	0.97	8
2002	100.78	1.97	91.65	0.84	9.13
2003	102.63	1.85	92.81	1.16	9.82
2004	103.97	1.34	93.72	0.91	10.25
2005	105.8	1.83	94.95	1.23	10.85

Sumber: BPS, berbagai edisi

Perkembangan perekonomian dari sisi anggaran, selama ini telah menunjukkan bahwa pemerintah telah serius menggali penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri, yang terlihat dari terjadinya peningkatan penerimaan pajak, dan penurunan pembiayaan dari luar negeri. Kondisi ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian bangsa dalam proses pembangunannya. Kecenderungan kedua hal tersebut, dari sisi anggaran pemerintah secara tegas diperlihatkan pada RAPBN tahun 2007 (lihat tabel-4). Target penerimaan dalam negeri dari sektor pajak rencananya akan terus ditingkatkan menjadi sebesar 14,3% dari GDP (meningkat dibandingkan dengan target tahun 2006 yang hanya sebesar 13,6%). Pembiayaan dari luar negeri akan segera berkurang sejalan dengan adanya pelunasan hutang IMF 100% oleh Pemerintah Indonesia.

**Tabel 4.4**  
**RAPBN Indonesia tahun 2006-2007**

	2006		2007	
	RAPBN-P	% thd PDB	RAPBN	% thd PDB
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>651912.60</b>	<b>20.90</b>	<b>713443.30</b>	<b>20.20</b>
I. Penerimaan Dalam Negeri	647971.00	20.80	710774.30	20.10
1. Penerimaan Perpajakan	423455.30	13.60	505877.70	14.30
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	224515.70	7.20	204896.60	5.80
II. Hibah	3941.60	0.10	2669.00	0.10
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>689541.40</b>	<b>22.10</b>	<b>746541.60</b>	<b>21.10</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	470161.00	15.10	495993.30	14.00
1. Belanja Pegawai	79603.70	2.50	98472.90	2.80
2. Belanja Barang	54616.10	1.70	72470.70	2.10

3. Belanja Modal	67044.90	2.10	66060.30	1.90
4. Pembayaran Bunga Utang	83464.90	2.70	85115.60	2.40
5. Subsidi	104324.70	3.30	109702.20	3.10
a. Subsidi BBM	62735.20	2.00	68585.90	1.90
b. Subsidi Non-BBM	41589.50	1.30	41116.30	1.20
6. Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Bantuan Sosial	37228.10	1.20	49048.10	1.40
8. Belanja Lainnya	43878.70	1.40	15123.30	0.40
II. Belanja Daerah	219380.40	7.00	250548.40	7.10
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>45836.10</b>	<b>1.50</b>	<b>52017.30</b>	<b>1.50</b>
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>-37628.80</b>	<b>-1.20</b>	<b>-33098.30</b>	<b>-0.90</b>
<b>E. Pembiayaan (E.I + E.II)</b>	<b>37628.80</b>	<b>1.20</b>	<b>33098.30</b>	<b>0.90</b>
I. Pembiayaan Dalam Negeri	52408.60	1.70	51304.10	1.50
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	-14779.80	-0.50	-18205.80	-0.50

Sumber: Depkeu

Peningkatan target sumber-sumber pendapatan dalam negeri ini juga dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan belanja pemerintah. Kondisi ini terlihat dari tabel-1 bahwa laju pertumbuhan konsumsi pemerintah sejak tahun 2001 jauh lebih besar dibandingkan dengan laju konsumsi rumah tangga (kecuali untuk tahun 2004). Ini menjadi satu indikator bahwa pemerintah Indonesia telah memasuki ruang-ruang yang mestinya menjadi peran dari aktivitas masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Dengan adanya kecenderungan peningkatan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi, dan juga membaiknya stabilitas makro ekonomi Indonesia Pemerintah Indonesia merasa yakin bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 akan optimis. Hal ini ditunjukkan dengan angka-angka asumsi pemerintah dalam penetapan APBN tahun 2007 (lihat tabel-5) yang cukup optimis, bahkan jauh lebih optimis dibandingkan dengan asumsi-asumsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional semisal world bank.

**Tabel 4.5**  
**Proyeksi Perekonomian Indonesia**  
**Dalam Asumsi RAPBN 2007**

Indikator Makro	2006		2007
	RAPBN	Proyeksi	RAPBN
1 Produk Domestik Bruto (milyar Rp)	3,122,012.00	3,119,073.50	3,531,087.50
2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)	5.90	5.80	6.30
3 Inflasi (%) 1)	8.00	8.00	6.50
4 Nilai tukar Rupiah per US\$ 1)	9,300	9,300	9,300
5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) 1)	12.00	12.00	8.50
6 Harga minyak internasional (US\$/barell)1)	62	64	65
7 Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari) 1)	1.00	1.00	1.00

Keterangan : 1) Rata-rata

### 5 *Posisi Perekonomian Jawa Barat Terhadap Nasional*

Jawa Barat memiliki posisi yang cukup strategis, baik dari segi lokasi maupun perannya dalam perekonomian nasional. Letak geografis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta membuat Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi sebagai daerah hinterland DKI. Sebagai hinterland Jawa Barat terkena eksternalitas, baik positif maupun negatif, dari berbagai aktivitas yang berkembang di DKI. Letak geografis dan spillover effect tersebut, membuat posisi perekonomian Jawa Barat menjadi sangat penting bagi nasional, diantaranya adalah:

- Dari sisi perekonomian secara makro, Jawa Barat memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional kurang lebih sebesar 14,5 % selama periode 2001-2005. Kontribusi tersebut cukup besar mengingat luas wilayah Jawa Barat relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas wilayah Indonesia. Kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional berada di urutan ke-3 setelah DKI (dengan rata-rata kontribusi sebesar 17%) dan Provinsi Jawa Timur (kontribusinya mencapai hampir 15%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jawa Barat secara ekonomi merupakan salah satu sumber sisi produksi utama di Indonesia.

- Diantara sektor-sektor perekonomian, Jawa Barat memiliki kontribusi yang sangat besar terutama pada sektor listrik (kontribusinya mencapai lebih dari 40% listrik di Indonesia), sektor industri pengolahan (dengan kontribusi sekitar 20%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (rata-rata kontribusi sebesar 15%), dan sektor pertanian (sebesar 13%). Perkembangan kontribusi masing-masing sektor terlihat pada tabel-6. Khusus untuk listrik, Provinsi Jawa Barat merupakan sumber pasokan listrik utama di Indonesia, khususnya untuk pasokan listrik sistem Jawa-Bali yang merupakan tulang punggung perlistrikan di Indonesia.
- Dengan adanya infrastruktur yang baik, khususnya listrik, maka Jawa Barat merupakan daerah tujuan investasi utama para investor (baik dalam bentuk PMA maupun PMDN) setelah DKI Jakarta. Tabel-7 menunjukkan persentase jumlah realisasi investasi baik PMA maupun PMDN yang ada di Jawa Barat. Minat investasi yang besar di Jawa Barat khususnya tampak dari jenis investasi asing.

**Tabel 4.6**

**Share Perekonomian Jawa Barat dalam Perekonomian Nasional**

	2001	2002	2003	2004*	2005**
1. Pertanian	13.10	12.53	12.13	13.71	13.64
2. Pertambangan & Pengalihan	9.96	9.96	10.15	4.81	4.42
3. Industri Pengolahan	20.84	20.51	20.68	20.83	21.33
4. Listrik, gas & air bersih	46.03	44.57	42.97	49.02	48.72
5. Bangunan	6.42	6.61	6.68	6.85	7.52
6. Perdagangan, hotel & restoran	15.54	15.88	15.28	16.45	16.05
7. Pengangkutan & Komunikasi	11.28	11.13	10.91	10.60	9.41
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4.78	4.96	5.03	4.79	4.67
9. Jasa-jasa	10.85	11.27	12.01	12.72	12.79

Keterangan : \*angka diperbaiki, \*\*angka sementara

**Tabel 4.7**  
**Share Investasi Jawa Barat terhadap Nasional**

Tahun	Disetujui		Realisasi	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2001	7.89	8.39	5.18	16.40
2002	19.26	9.32	63.26	37.26
2003	7.21	6.92	20.85	20.38
2004	8.84	20.02	18.23	24.72
2005	11.65	10.59	10.91	28.80
2006*)	5.18	10.23	4.54	33.26

Keterangan : \*) hingga Oktober 2006

## **6 Kondisi Perekonomian Jawa Barat**

### **Sisi Produksi**

Kondisi perekonomian makro suatu propinsi dapat dilihat baik dari sisi produksi maupun sisi pengeluaran. Dari sisi produksi terlihat bahwa sejak tahun 2000 hingga 2005 (berdasarkan harga konstan 2000) perekonomian Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu berbeda dengan pola nasionalnya, meskipun dari PDRB tanpa migas Provinsi Jawa Barat memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di tingkat nasional ditahun 2004 (untuk tahun 2005 belum bisa diperbandingkan mengingat bahwa angka Jawa Barat masih bersifat sementara). Secara umum PDRB dan pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian Jawa Barat dapat dilihat pada tabel-8.

Dari sisi sektoral, terdapat 3 sektor utama penggerak perekonomian Jawa Barat yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut memberikan 70% kontribusi terhadap aktivitas perekonomian Jawa Barat. Sektor Industri pengolahan memiliki kontribusi yang terus meningkat (diatas 40%) begitu juga Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (18%). Share sektor pertanian juga masih cukup besar memberikan peranan dalam perekonomian Jawa Barat (sekitar 14%). Tabel-9 menggambarkan kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian Jawa Barat.

Sektor industri pengolahan memiliki laju pertumbuhan yang terus meningkat selama 2001-2005 (dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,59%) jauh melebihi laju pertumbuhan ekonomi provinsi (yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,66% selama periode yang sama). Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian tumbuh secara fluktuatif (Lihat tabel-8).

Sementara itu sektor industri pengolahan dan bangunan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan pada investasi/PMTB di Jawa Barat - seperti yang dapat dilihat dari sisi pengeluaran perekonomian Jawa Barat pada tabel-9.

**Tabel 4.8**  
**PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat**  
**Berdasarkan Harga Konstan 2000 (milyar Rp)**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004*	2005**
1. Pertanian	28,784,186.59	29,554,466.83	29,186,913.59	29,161,783.40	34,038,120.63	34,691,239.65
2. Pertambangan & Penggalian	17,548,716.93	16,761,111.22	16,918,714.31	17,019,035.48	7,705,213.45	7,194,525.89
3. Industri Pengolahan	79,949,896.89	82,993,409.84	86,029,221.10	91,336,589.53	97,902,362.10	104,886,919.46
4. Listrik, gas & air bersih	3,882,660.88	4,169,157.26	4,398,612.33	4,447,323.69	5,337,897.17	5,649,829.62
5. Bangunan	5,254,511.71	5,143,936.70	5,580,463.36	5,984,953.41	6,602,399.92	7,780,823.72
6. Perdagangan, hotel & restoran	35,567,824.82	36,403,261.68	38,647,464.98	39,198,353.11	44,604,769.96	47,259,969.72
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,314,261.24	7,925,724.28	8,478,452.14	9,323,751.20	10,274,962.93	10,295,854.17
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,351,150.09	5,885,016.62	6,490,645.27	7,067,352.62	7,247,001.69	7,570,633.17
9. Jasa-jasa	12,099,818.43	14,532,915.56	15,661,103.30	17,426,171.39	19,344,963.10	20,468,266.35
PDRB Dengan Minyak dan Gas Bumi	195,753,027.58	203,368,999.98	211,391,590.40	220,965,313.81	233,057,690.94	245,798,061.75
PDRB Tanpa Minyak dan Gas Bumi	175,645,077.76	184,304,148.84	191,935,742.86	201,770,359.65	223,349,891.67	236,925,108.21
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>						
1. Pertanian		2.68	-1.24	-0.09	16.72	1.92
2. Pertambangan & Penggalian		-4.49	0.94	0.59	-54.73	-6.63
3. Industri Pengolahan		3.81	3.66	6.17	7.19	7.13
4. Listrik, gas & air bersih		7.38	5.50	1.11	20.02	5.84
5. Bangunan		-2.10	8.49	7.25	10.32	17.85
6. Perdagangan, hotel & restoran		2.35	6.16	1.43	13.79	5.95
7. Pengangkutan & Komunikasi		8.36	6.97	9.97	10.20	0.20
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan		9.98	10.29	8.89	2.54	4.47
9. Jasa-jasa		20.11	7.76	11.27	11.01	5.81
PDRB Dengan Minyak dan Gas Bumi		3.89	3.94	4.53	5.47	5.47
PDRB Tanpa Minyak dan Gas Bumi		4.93	4.14	5.12	10.70	6.08

Sumber/Source : BPS

Keterangan : \*angka diperbaiki, \*\*angka sementara

Seperti juga pada tingkat nasional, sektor pertanian masih memiliki pertumbuhan yang berfluktuasi, bahkan sempat mengalami kontraksi di tahun 2002 dan 2003. Kondisi ini, sekali lagi, membuat potensi peluang kesempatan kerja menjadi mengecil (ditambah lagi sektor industri pengolahan yang menjadi tumpuan perekonomian Jawa Barat, baik dari sisi kontribusinya maupun dari sisi pertumbuhannya) mengalami cobaan yang sangat besar berupa kenaikan pada komponen biaya tenaga kerja pada beberapa tahun kebelakang ini.

Sektor industri pengolahan tanpa migas merupakan pangsa terbesar sektor industri di Jawa Barat, lebih dari 96% dari total industri pengolahan. Sedangkan dari industri tanpa migas sub sektor industri alat angkutan, mesin dan peralatannya merupakan jenis industri pemberi sumbangan terbesar (rata-rata kontribusinya sebesar 47,2%), diikuti oleh sub sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki (yang memiliki kontribusi yang terus meningkat dengan rata-rata sebesar 20,04%), serta sub sektor industri pupuk, kimia dan barang dari karet (dengan share rata-rata sebesar 11,74%). Laju pertumbuhan sub sektor industri berfluktuasi selama periode 2001-2005, akan tetapi sub sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki memiliki laju pertumbuhan yang terus positif (dengan tingkat pertumbuhan

rata-rata sebesar 13,02%), sementara sub sektor industri alat angkutan, mesin dan peralatannya hanya mampu tumbuh rata-rata sebesar 3,26% (karena pernah mengalami kontraksi sebesar 15,31% di tahun 2004) dan sub sektor industri pupuk, kimia dan barang dari karet juga hanya mampu tumbuh rata-rata sebesar 1,48% (juga pernah mengalami kontraksi sebesar 3,21% pada tahun 2003). Secara umum dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor industri tanpa migas di Jawa Barat mampu menjadi penggerak perekonomian akan tetapi kinerja dari masing-masing sub sektor industrinya (setidaknya dari sisi kriteria pertumbuhan, belum menunjukkan pola yang mapan).

**Tabel 4.9**  
**Kontribusi Sektoral dalam Perekonomian Jawa Barat**  
**Berdasarkan Harga Konstan 2000 (%)**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004*	2005**
1. Pertanian	14.70	14.53	13.81	13.20	14.61	14.11
2. Pertambangan & Penggalian	8.96	8.24	8.00	7.70	3.31	2.93
3. Industri Pengolahan	40.84	40.81	40.70	41.34	42.01	42.67
4. Listrik, gas & air bersih	1.98	2.05	2.08	2.01	2.29	2.30
5. Bangunan	2.68	2.53	2.64	2.71	2.83	3.17
6. Perdagangan, hotel & restoran	18.17	17.90	18.28	17.74	19.14	19.23
7. Pengangkutan & Komunikasi	3.74	3.90	4.01	4.22	4.41	4.19
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.73	2.89	3.07	3.20	3.11	3.08
9. Jasa-jasa	6.18	7.15	7.41	7.89	8.30	8.33
<b>Berdasarkan Jenis Pengeluaran</b>						
01. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga				60.30	65.17	64.53
a. Makanan				37.37	37.42	36.96
b. Bukan Makanan				22.93	27.75	27.56
02. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba				0.58	0.72	0.52
03. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah				6.78	7.09	7.41
04. Pembentukan Modal Tetap Bruto				15.51	16.22	16.67
05. Perubahan Stok				2.11	0.45	0.89
06. Ekspor Netto				14.72	10.35	9.99
07. Ekspor :				41.15	49.29	48.29
a. Antar Negara				27.41	29.43	29.42
b. Antar Provinsi				13.75	19.86	18.87
08. Impor :				26.43	38.94	38.30
a. Antar Negara				6.19	17.87	17.95
b. Antar Provinsi				20.25	21.07	20.35

\* Perbaikan

\*\* Sementara

### **Sisi Pengeluaran**

Berdasarkan sisi pengeluaran (lihat tabel-9 PDRB berdasarkan jenis pengeluaran), perkembangan perekonomian Jawa Barat sangat didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusi kegiatan tersebut mencapai angka diatas 60% sejak tahun 2003. Kegiatan konsumsi rumah tangga di Jawa Barat masih didominasi oleh kegiatan untuk konsumsi makanan (mencapai hampir 37% terhadap total pengeluaran, atau sekitar rata-rata 58,9% dari total konsumsi), sementara kegiatan konsumsi bukan makanan

mencapai angka 27,6% dari total pengeluaran, atau rata-rata sebesar 41,1% dari total konsumsi dengan kecenderungan yang terus meningkat). Tidak seperti beberapa propinsi lain, kontribusi bukan makanan di Jawa Barat menunjukkan angka yang cukup besar, hal ini setidaknya menggambarkan tingginya konsumsi barang-barang sekunder dan tersier di Jawa Barat.

Ekspor Jawa Barat menyumbang peranan berikutnya dari sisi pengeluaran, rata-rata sekitar 46% PDRB dari sisi pengeluaran disumbang oleh kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor antar negara menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan ekspor interregional (dengan perbandingan antara 29,42% berbanding 18,87% terhadap total pengeluaran). Kondisi ini menggambarkan bahwa produk barang dan jasa (komoditi) yang dihasilkan oleh Jawa Barat telah dapat diterima oleh pangsa pasar luar negeri. Komoditi ekspor terbesar Jawa Barat berasal dari komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT), alat telekomunikasi, mesin listrik beserta alat-alatnya serta mesin kantor dan pengolah data. Ekspor tekstil dan pakaian (garment) selama periode 2000-2005 mencapai angka rata-rata sebesar USD 3,68 Milyar, sedangkan alat telekomunikasi mencapai angka rata-rata USD 2,25 Milyar, sedangkan ekspor mesin listrik dan mesin kantor beserta pengolah data mencapai angka rata-rata sebesar masing-masing USD 1,3 Milyar dan USD 0,9 Milyar (lihat tabel-10). Seperti yang juga telah dijelaskan pada pembahasan makroekonomi nasional, kenaikan nilai ekspor lebih banyak ditentukan oleh kenaikan harga dibandingkan dengan kenaikan volumenya. Kondisi ini menggambarkan bahwa sesungguhnya peningkatan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi masih sebatas dari sisi kenaikan harga dan bukan volume eksportnya.

Sebaliknya aktivitas impor Jawa Barat ditandai dengan besarnya impor interregional dibandingkan dengan impor komoditi dari luar negeri. Meskipun aktivitas impor cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi proporsi impor interregional masih lebih besar dibandingkan dengan impor dari luar negeri. Kondisi ini menggambarkan bahwa keterkaitan input Jawa Barat dari luar negeri lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan dalam negerinya. Hal ini sangat menggembirakan karena dapat dijadikan landasan bahwa *import content* terbesar dari aktivitas kegiatan usaha di Jawa Barat bersumber dari sisi domestik. Akan tetapi yang patut diwaspadai adalah kecenderungan impor luar negeri yang terus membesar dibandingkan dengan impor interregional, yang berarti ada kecenderungan peningkatan ketergantungan aktivitas usaha di Jawa Barat terhadap input luar negeri.

Kondisi ekspor-impor Jawa Barat sekaligus memberikan gambaran mengenai posisi perekonomian Jawa Barat berdasarkan definisi Shaffer. Terlihat bahwa provinsi ini telah berusaha memaksimalkan potensi aktivitas ekonomi daerahnya dari hubungan dengan wilayah sekitarnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Semakin besar hubungan ekspor-impor tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat *openess* yang

membesar. Para ekonom sepakat bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat openness suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh sebab itu melihat kecenderungan yang semakin besar pada aktivitas ekspor-impor Jawa Barat, maka diprediksi pertumbuhan ekonominya pun akan tumbuh lebih baik dimasa yang akan datang.

Satu hal yang menggembirakan lagi dari perkembangan perekonomian Jawa Barat adalah meningkatnya PMTDB secara konsisten sejak 2003. Hal ini menggambarkan bahwa proses akumulasi modal mulai tumbuh, dan ini diharapkan akan menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dimasa depan.

**Tabel 4.10**  
**Komoditas Utama Ekspor Jawa Barat 2000–2005**  
**(Ribuan USD)**

KOMODITAS UTAMA		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Alat Telekomunikasi	Nilai :	2,224,803	2,357,265	2,630,869	1,937,030	2,132,858	2,187,225
	Volume :	162,121	186,583	197,659	135,382	120,186	91,985
2. Benang Tenun, Kain Tekstil dan hasil-hasilnya	Nilai :	2,353,722	1,980,198	1,858,956	1,859,593	1,694,343	1,903,568
	Volume :	895,810	786,543	819,379	773,075	631,251	671,564
3. Pakaian	Nilai :	1,967,889	1,837,858	1,522,697	1,580,708	1,759,652	1,900,767
	Volume :	162,128	159,384	134,081	136,832	134,481	135,897
4. Mesin Listrik, Aparat dan Alat-alatnya	Nilai :	1,262,511	1,079,040	1,259,211	1,388,036	1,405,106	1,362,088
	Volume :	226,990	194,828	300,352	257,701	214,225	208,619
5. Mesin Kantor dan Pengolah Data	Nilai :	1,261,324	959,391	849,657	872,660	974,367	1,292,117
	Volume :	93,529	67,578	73,328	66,764	67,114	90,932
6. Kertas, Kertas Karbon dan Olahannya	Nilai :	988,192	578,620	564,434	511,546	657,299	721,861
	Volume :	1,759,959	1,034,376	1,116,035	930,285	972,440	982,993
7. Barang-barang Karet	Nilai :	313,673	273,754	400,043	433,213	553,585	646,666
	Volume :	205,964	168,638	205,981	271,692	286,522	274,179
8. Hasil Industri Lainnya	Nilai :	673,462	539,930	460,728	508,758	555,330	586,704
	Volume :	133,756	119,184	123,796	124,819	127,175	142,231
9. Perabotan	Nilai :	373,112	297,335	289,194	303,148	338,087	363,973
	Volume :	209,378	170,876	174,575	244,037	158,128	160,708
10. Kendaraan Bermotor untuk Jalan Raya	Nilai :	119,947	119,907	121,805	170,893	291,714	476,592
	Volume :	31,506	26,841	24,540	52,557	41,198	58,423
11. Barang-barang Dari Mineral Bukan Logam	Nilai :	325,745	271,715	312,064	337,372	373,454	357,319
	Volume :	3,280,477	2,449,098	3,027,636	2,897,141	3,819,293	3,455,685
12. Mesin Industri dan Perlengkapannya	Nilai :	199,900	186,427	282,039	254,378	318,199	300,064
	Volume :					68,972	

	:	39,654	36,445	60,401	65,169		55,566
13. Besi dan Baja	Nilai :	185,174	121,116	192,067	133,228	230,411	238,833
	Volume :	525,122	431,401	728,502	353,992	368,786	359,516
14. Kimia Organik	Nilai :	554,855	383,726	382,011	403,071	261,834	224,900
	Volume :	1,013,350	999,678	807,552	743,525	358,866	247,756
15. Sepatu dan Perelatan Kain Lainnya	Nilai :	1,277,367	1,006,300	737,064	641,662	373,892	223,381
	Volume :	111,486	91,542	60,749	52,560	30,537	17,892
16. Barang-barang Kayu dan Gabus	Nilai :	375,137	258,161	213,874	213,209	190,540	197,939
	Volume :	366,129	267,930	256,566	247,749	202,233	180,706
17. Bahan Plastik	Nilai :	618,726	361,662	200,822	205,585	180,824	180,226
	Volume :	830,287	492,910	512,958	252,173	187,884	160,629
18. Barang-barang Logam Lainnya	Nilai :	199,321	127,400	124,120	132,985	181,234	219,862
	Volume :	109,357	80,615	154,027	83,424	77,852	89,642
19. Olahan Bahan Plastik	Nilai :	162,067	135,728	135,136	143,410	165,839	192,078
	Volume :	96,097	79,596	84,353	80,885	77,469	77,775
20. Serta Tekstil dan Sisasisanya	Nilai :	130,579	112,459	170,517	113,313	152,707	194,141
	Volume :	135,959	121,956	200,746	125,470	116,712	152,397
21. Lainnya	Nilai :	1,318,790	1,209,308	1,319,758	1,500,353	1,419,946	1,512,805
	Volume :	1,212,916	1,141,083	1,357,206	1,144,085	990,723	938,150
<b>Total</b>	<b>Nilai :</b>	<b>16,886,298</b>	<b>14,197,299</b>	<b>14,027,067</b>	<b>13,644,149</b>	<b>14,211,222</b>	<b>15,283,112</b>
	<b>Volume :</b>	<b>11,601,974</b>	<b>9,107,085</b>	<b>10,420,421</b>	<b>9,039,316</b>	<b>9,052,045</b>	<b>8,553,245</b>

Sumber : Statistik Ekonomi Daerah (Sekda), Bank Indonesia Bandung

Tumbuhnya kegiatan akumulasi modal di Jawa Barat juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada realisasi investasi, terutama untuk PMA (lihat tabel-11). Meskipun sempat mengalami keterpurukan di tahun 2001, akan tetapi provinsi ini masih tetap memiliki daya tarik investasi ditingkat nasional. Selama periode 2001-2005 terjadi pertumbuhan nilai investasi rata-rata sebesar 16,4%. Demikian pula dengan jumlah proyek investasinya juga mengalami peningkatan dengan laju rata-rata sebesar 13,6%. Akan tetapi dari daya serap tenaga kerjanya terlihat bahwa terjadi kenaikan rasio jumlah investasi per pekerja, yang menunjukkan bahwa penyerapan satu tenaga kerja membutuhkan investasi yang semakin besar. Kondisi ini perlu dijadikan perhatian dalam proses penciptaan lapangan pekerjaan baru di Jawa Barat.

**Tabel 4.11**

**Nilai Investasi dan Penyerapan TK di Jawa Barat 2000-2005**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PROYEK</b>	<b>INVESTASI ( Rp. )</b>	<b>TK (ORANG)</b>
2000	284	25,299,532,200,568	84,938
2001	131	5,478,489,881,259	35,816
2002	146	11,328,141,150,756	38,724
2003	225	12,996,614,635,180	52,933
2004	221	14,146,076,286,159	58,281
2005	350	18,370,990,323,263	97,832
Kumulatif	1,357	87,619,844,477,185	368,524

Sumber : BPMD Jawa Barat, berbagai edisi

Perkembangan dari sisi kredit, berupa jumlah kredit yang tersalur di Jawa Barat (lihat tabel-12), terlihat bahwa menurut sektor ekonomi sektor industri pengolahan menerima kredit terbesar yang bersumber dari sektor Perbankan (rata-rata sebesar 39%), sedangkan dari sisi jenis penggunaannya kredit konsumsi memiliki pertumbuhan yang pesat dengan share yang terus meningkat (sementara kredit modal kerja mengalami penurunan share). Kondisi ini sekali lagi menggambarkan pentingnya sektor industri pengolahan di Jawa Barat, serta mulai berkembangnya pola konsumsi bukan makanan pada sebagian masyarakat Jawa Barat yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi pada barang-barang sekunder dan tersier (namun perlu diingat bahwa pola konsumsi barang sekunder dan tersier biasanya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat golongan menengah keatas). Oleh sebab itu besarnya laju konsumsi barang bukan makanan setidaknya menggambarkan kenaikan konsumsi pada masyarakat menengah keatas jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat golongan bawah. Atau dengan kata lain adanya kecenderungan perbaikan tingkat distribusi pendapatan di Jawa Barat.

**Tabel 4.12**

**Posisi Kredit Perbankan di Jawa Barat 2000-2005 (Juta Rp)**

<b>Kredit</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>Jenis</b>						
<b>Penggunaan</b>	64,330,806	75,342,578	79,272,987	68,713,261	83,404,643	98,321,503
1. Modal						
Kerja	33,443,046	38,662,012	40,768,248	33,354,098	39,148,352	45,565,930
2.						

Investasi	21,714,715	23,902,011	21,070,018	16,974,859	18,226,978	18,291,749
3.						
Konsumsi	9,173,045	12,778,555	17,434,721	18,384,304	26,029,313	34,463,824
<b>Menurut Sektor Ekonomi</b>						
1.						
Pertanian	2,880,384	3,133,120	3,240,512	2,764,547	3,470,060	3,122,429
2.						
Pertambangan	53,891	73,579	179,208	204,272	423,102	279,322
3.						
Perindustrian	29,142,238	33,351,124	34,910,302	23,943,621	26,501,464	31,911,087
4.						
Listrik, Gas dan Air	7,266,986	7,540,013	4,263,109	3,298,841	3,202,726	2,379,086
5.						
Konstruksi	883,938	1,107,983	1,176,580	3,099,519	4,106,683	4,347,744
6.						
Perdagangan, Restoran dan Hotel	4,288,713	4,990,955	6,670,018	7,814,826	9,702,616	12,585,274
7.						
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	4,604,783	6,263,130	6,096,455	4,317,374	4,842,337	2,178,358
8. Jasa-jasa dunia usaha	2,716,165	1,440,632	2,660,943	2,826,499	3,216,873	4,566,947
9. Jasa-jasa Sosial Masyarakat	442,777	517,379	682,864	724,653	1,011,475	1,257,954
10. Lain-lain	12,050,931	16,924,663	19,392,996	19,719,109	26,927,307	35,693,302

Sumber : Statistik Ekonomi, Keuangan Daerah Bank Indonesia

Dari sisi ketenagakerjaan terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja paling tinggi terjadi di sektor pertanian, kurang lebih sebesar 31% dari jumlah pekerja yang ada di Jawa Barat bekerja di sektor tersebut. Sektor perdagangan, hotel & restoran menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar kurang lebih 22%, serta sektor industri pengolahan menyerap rata-rata sebesar 17% dari total jumlah pekerja yang ada. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Barat (Lihat tabel-13). Sementara itu dari sisi yang lain kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang sangat berat, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka yang semakin besar, dimana pada tahun 2005 angka tingkat pengangguran terbuka telah mencapai 14,73% (lihat tabel-14). Disamping itu kendala lain dari sisi ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja di Jawa Barat, sekitar 60% dari tenaga kerja di Jawa Barat berpendidikan SD atau kurang (lihat tabel-15) yang berarti banyak dari pekerja di Jawa Barat menempati posisi sebagai unskilled labor. Kondisi ini saat rentan terhadap jenis kegiatan usaha di Jawa Barat yang ternyata lebih banyak

labor intensive, terutama jika terjadi kenaikan biaya produksi tenaga kerja.

**Tabel 4.13**  
**Share Tenaga Kerja Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sektor Ekonomi	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	32.67	31.81	34.57	30.34	30.06
Pertambangan & Penggalian	0.38	0.52	0.82	0.45	0.40
Industri	17.41	17.07	15.75	17.90	17.18
Listrik, Gas dan Air	0.23	0.24	0.28	0.28	0.27
Konstruksi	5.87	5.33	5.16	5.92	6.09
Perdagangan	22.90	22.40	22.71	23.21	22.70
Komunikasi	7.81	8.65	7.34	8.95	8.85
Keuangan	0.53	0.73	0.55	0.19	1.83
Jasa-jasa	12.20	13.25	12.81	12.76	12.62

Sumber : BPS, beberapa edisi

**Tabel 4.14**  
**Jumlah Angkatan Kerja, Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat**

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Menganggur	Tingkat Pengangguran (%)
2000	18,732,407	17,048,013	,684,394	8.99
2001	16,433,204	14,499,420	1,933,784	11.77
2002	16,609,270	14,417,739	2,191,531	13.19
2003	16,393,647	14,345,796	2,047,851	12.49
2004	16,938,649	14,618,934	2,319,715	13.69
2005	17,157,083	14,629,276	2,527,807	14.73

Sumber : BPS, beberapa edisi

Tabel 4.15

## Jumlah Tenaga Kerja Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan/	2001		2002		2003		2004		2005
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Tdk/blm sekolah	647,274	4.46	512,887	3.56	271,197	1.89	329,897	2.26	389,90
Tdk/blm tamat SD	2,026,364	14	2,113,824	14.7	1,598,394	11.1	1,717,632	11.8	1,722,44
SD	6,589,652	45.5	6,537,839	45.4	6,934,415	48.3	6,703,655	45.9	6,563,62
SLTP Umum/SMP	2,041,578	14.1	2,027,265	14.1	2,171,866	15.1	2,475,650	16.9	2,368,70
SLTP Kejuruan	172,652	1.19	152,115	1.06	144,045	1	156,318	1.07	161,05
SLTA Umum/SMU	1,509,102	10.4	1,633,229	11.3	1,887,732	13.2	1,658,941	11.4	1,666,58
SLTA Kejuruan/SMK	843,188	5.82	757,187	5.25	703,221	4.9	821,009	5.62	985,44
Diploma I/II	182,956	1.26	157,955	1.1	115,891	0.81	136,542	0.93	193,32
Akademi/Diploma III	159,312	1.1	192,057	1.33	163,101	1.14	216,957	1.48	172,56
Universitas	327,342	2.26	333,381	2.31	355,934	2.48	402,333	2.75	405,62
Total	14,499,420	100	14,417,739	100	14,345,796	100	14,618,934	100	14,629,27

Sumber : BPS, beberapa edisi

Optimisme terhadap perkembangan pembangunan dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah (dapat ditunjukkan oleh pencapaian nilai indeks pembangunan masyarakatnya (IPM). Kondisi perkembangan IPM Daerah Jawa Barat yang terus meningkat, masih ditandai dengan adanya peningkatan yang sangat lambat pada indeks daya beli masyarakatnya (lihat tabel-15). Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai peningkatan konsumsi bukan makanan serta kenyataan dalam perkembangan angka indeks daya beli yang sulit untuk bergerak (serta kenyataan adanya peningkatan pada masyarakat miskin di Jawa Barat, yang pada tahun 2005 mencapai 28,6% dari total penduduk Jawa Barat sebesar 39,9 Juta) setidaknya menjadi titik awal untuk mulai mewaspadaai adanya gejala ketimpangan yang semakin membesar pada golongan masyarakat di Jawa Barat. Kondisi pengangguran dan kondisi kemiskinan ini perlu diwaspadai sebagai aspek kebocoran (menurut istilah Shaffer) dalam perekonomian Jawa Barat yang menjadi faktor penghambat kemajuan perekonomian daerah. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat dapat menjadi penghambat kemajuan pengembangan potensi perekonomian daerah.

**Tabel 4.16**  
**Pencapaian IPM Jawa Barat**

	2001	2002	2003	2004	2005
<b>IPM</b>	66.10	67.45	67.87	68.36	69.35
<b>Indeks</b>	64.80	78.30	78.40	79.02	79.59
<b>Pendidikan</b>					
<b>Indeks</b>	66.33	66.55	66.57	67.23	69.28
<b>Kesehatan</b>					
<b>Indeks Daya</b>	55.10	57.42	58.63	58.83	59.18
<b>Beli</b>					

Sumber : Pemda Jawa Barat

Selama ini upaya-upaya peningkatan angka IPM Jawa Barat selalu didorong oleh aktivitas belanja pemerintah daerah. Berbagai kegiatan dan aktivitas (baik yang bersifat pembangunan maupun rutin di Jawa Barat selama ini selalu dikaitkan dengan peningkatan IPM). Dengan peran pemerintah dalam perekonomian sangat terbatas (kurang dari 2% terhadap PDRB, seperti terlihat pada tabel-16) Pemerintah Jawa Barat berusaha untuk menaikkan seluruh komponen indeks IPM secara cepat untuk mencapai target sebesar 80 di tahun 2010. Tindakan ini mungkin berhasil bagi peningkatan indeks pendidikan dan kesehatan, karena memang sebagian besar masalah kesehatan dan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya dalam penyediaan prasarana pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi untuk masalah daya beli, dengan kondisi keterbatasan anggaran dan peran pemerintah dalam perekonomian secara keseluruhan, maka kegiatan-kegiatan yang diupayakan untuk meningkatkan indeks daya beli menjadi tidak berarti (dan bahkan cenderung menjadi pemborosan dalam sisi anggaran). Upaya peningkatan daya beli hanya mampu didongkrak oleh sektor swasta itu sendiri dengan aktivitas kegiatannya yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pihak pemerintah dalam hal ini hanya dapat mengambil bagian dari sisi menciptakan "institusi" baru yang bisa mendorong pihak swasta untuk bertindak kearah tersebut (seperti yang disarankan oleh Blakely).

Terbatasnya peran pemerintah daerah terhadap total perekonomian daerah di Jawa Barat ditunjukkan pula oleh kondisi kapasitas fiskal Jawa Barat yang masih rendah. Akibatnya perekonomian Jawa Barat dari kacamata anggaran pemerintah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat yang tinggi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah rendahnya multiplier pajak di Jawa Barat atau dengan kata lain adanya keterbatasan pada peningkatan pendapatan dari pajak. Studi yang dilakukan oleh LP3E FE-UNPAD pada awal tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 9 sektor yang ada dalam perekonomian daerah semuanya memiliki tax multiplier sebesar kurang dari 5%. Hanya sektor

industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran saja yang memiliki angka tax multiplier mendekati angka 5%. Tabel-18 menggambarkan potensi penerimaan pajak di Jawa Barat untuk setiap peningkatan sebesar Rp. 1 Milyar permintaan akhir dimasing-masing sektor.

Tabel 4.17

## Kondisi Anggaran Pemerintah Daerah Jawa Barat (Juta, Rp)

Item	2001	2002	2003	2004	2005*)
PENDAPATAN DAERAH	2,438,792.60	2,757,339.75	3,264,484.95	4,044,464.69	3,725,421.52
% Terhadap PDRB	1.2	1.3	1.48	1.74	1.52
a. Pendapatan Asli Daerah	1,211,417.72	1,551,490.97	2,170,593.64	2,846,800.73	2,619,535.11
• Pendapatan Pajak Daerah	1,126,966.74	1,435,020.84	2,008,486.49	2,688,355.98	2,483,551.00
• Retribusi Daerah	9,458.48	10,529.61	13,604.37	24,812.62	24,966.00
• Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22,574.32	40,492.24	60,111.58	75,865.89	82,296.90
• Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	52,418.19	65,448.27	88,391.20	57,766.25	28,721.20
b. Dana Perimbangan	911,603.00	831,284.76	1,093,891.31	1,197,663.95	1,105,886.42
• Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	390,372.91	437,404.76	519,011.20	623,885.95	532,116.42
• Dana Alokasi umum yang sah	521,230.09	393,880.00	574,880.12	573,778.00	573,770.00
• Dana Alokasi khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Lain-lain pendapatan	31,095.34	158,765.09	0.00	0.00	0.00
d. Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat

Keterangan:

\*) Data didasarkan pada Nota Keuangan APBD Jawa Barat (belum data realisasi)

Rendahnya tax multiplier di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Barat hanya perlu memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak langsung menyentuh perekonomian masyarakat, karena hal tersebut akan bersifat memboroskan anggaran tanpa ada hasil yang seimbang. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan peran pemerintah adalah sebagai fasilitator pembangunan, yaitu berusaha sekuat mungkin untuk mempersiapkan sistem "institusi" yang baik agar aktivitas swasta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta memberikan jaminan dan kepastian dalam sistem pendistribusian yang lebih baik dalam perekonomian daerah.

**Tabel 4.18**  
**Multiplier Pajak dari Setiap Sektor di Jawa Barat**

Sektor	Multiplier	Potensi Penerimaan Pajak (Rp Juta)
Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan	0.0143	2.48
Pertambangan dan Penggalian	0.0330	5.72
Industri Pengolahan	0.0454	7.87
Listrik Gas dan Air Bersih	0.0195	3.38
Bangunan/Konstruksi	0.0406	7.04
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.0498	8.64
Pengangkutan dan Komunikasi	0.0349	6.05
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.0299	5.18
Jasa-jasa	0.0191	3.31

Sumber: Tabel I-0 Jawa Barat tahun 2003, diolah

## **7 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan implikasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi perekonomian Jawa Barat di tahun 2007 kedepan, diantaranya adalah:

- Dengan adanya peningkatan pertumbuhan yang disertai dengan adanya peningkatan pada pengangguran dan kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi di Jawa Barat sebagai pertumbuhan yang "belum berkualitas" karena tidak dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.
- Oleh sebab itu perlu upaya yang keras dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menciptakan kesempatan kerja, terutama bagi golongan masyarakat bawah.
- Target peningkatan IPM (khususnya dari indeks daya beli) tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, oleh sebabnya pemerintah harus berusaha dengan keras menciptakan "institusi" yang dapat mendorong pihak swasta untuk

menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat bawah

## 1. Prospek Perekonomian Jawa Barat

Berdasarkan perkembangan kegiatan perekonomian Jawa Barat selama lima tahun terakhir, terdapat suatu optimisme akan pertumbuhan perekonomian Jawa Barat untuk tahun 2007, baik dari sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran. Satu hal yang mengkhawatirkan perkembangan perekonomian di Jawa Barat adalah besarnya potensi kebocoran yang terjadi yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat. Kondisi ini akan semakin besar dengan adanya keputusan gubernur mengenai kenaikan UMP Jawa Barat tahun 2007 sebesar 15,73% (yang merupakan angka kenaikan tertinggi selama 4 tahun ke belakang). Berdasarkan analisis tabel IO Jawa Barat tahun 2003, kenaikan upah tersebut akan berpotensi untuk meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya akan membuat pasar tenaga kerja terdistorsi.

Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan UMP akan menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2007 nanti diperkirakan akan menjadi sekitar 14,9% hingga 15,8%. Kebocoran yang cukup besar dalam perekonomian ini telah mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karenanya pertumbuhan perekonomian daerah Jawa Barat di tahun 2007 diprediksi hanya akan tumbuh berkisar 5,75% hingga 6,5%. Satu hal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar itu adalah masih terciptanya kenaikan investasi (PMA, PMDN, maupun kredit) yang terfokus ke sektor industri pengolahan. Dan oleh sebab itu sektor industri pengolahan masih dapat melakukan ekspor keluar negeri dengan peningkatan pertumbuhan yang sama seperti periode sebelumnya (kondisi ini didukung oleh berkembangnya pertumbuhan perekonomian dunia di tahun 2007).

Adanya peningkatan pertumbuhan yang disertai dengan peningkatan pada tingkat pengangguran, akan semakin menekan angka pencapaian IPM Jawa Barat, terutama dari sisi indeks daya beli. Karena pertumbuhan perekonomian yang terjadi (yang utamanya digerakan oleh sektor swasta) belum dapat menciptakan tambahan yang mencukupi pada lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Akibat lainnya dari kondisi tersebut adalah diperkirakan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat akan bertambah menjadi lebih besar dari keadaan tahun 2005 yang menunjukkan angka 11,4 juta. Berdasarkan hal tersebut akan sangat jelas bahwa peran dari pemerintah yang utama adalah mendorong agar terbentuknya "institusi baru" yang mampu menggerakkan pihak swasta untuk dapat menciptakan lapangan

pekerjaan dan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang ada di daerah Jawa Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki iklim investasi, aturan-aturan mengenai perijinan, meningkatkan kepastian dalam berusaha bagi para investor. Selain itu adanya peningkatan pada akuntabilitas pemerintah (melalui peningkatan transparansi, memerangi korupsi, dan lain sebagainya) dapat mendorong tingkat kepercayaan publik yang pada akhirnya akan mendorong terbentuknya institusi baru yang pro terhadap pembangunan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Barat 2001 - 2005 melalui Perda No. 1 Tahun 2001 yang kemudian disempurnakan oleh Perda No. 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 - 2007 yang dijabarkan lebih lanjut oleh Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2003 - 2008; Secara materil nampak bahwa Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mengadopsi konsep yang dikembangkan oleh UNDP yaitu Konsep Pembangunan Manusia (*Human Development / People Centre Development*) dengan antara lain menetapkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator pembangunannya. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dimanifestasikan dalam dimensi kehidupan yang layak. Adapun indikatornya adalah pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (PPP rupiah) dengan indikator dimensinya adalah Indeks Daya Beli.

Pada tahun 2005, Indeks Daya Beli Jawa Barat mencapai 59,18 (*Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007, Pemda Prop. Jawa Barat, 2006*). Pada tahun 2000 (dapat dianggap sebagai tahun dasar), Indeks Daya Beli Jawa Barat tercatat sebesar 53,22 dihitung dari angka paritas daya beli pada tahun 2000, sebesar Rp. 530.300 (Pencapaian 14 Indikator Makro Jabar tahun 2001 - 2004, Sekda Jabar, RA Seminar Akselerasi Pencapaian IPM, 2005). Dengan demikian nampak bahwa kemampuan Jawa Barat untuk mempercepat pencapaian Indeks Daya Beli selama periode 2000 - 2005 adalah 5,96 point atau rata-rata pertahunnya sebesar 1,19 point. Apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2005 sebesar 72,3 (*Program dan Sasaran Pencapaian Indeks Daya Beli, Lex Laksmana, 2005*) nampak bahwa terdapat kesenjangan antara target pada tahun 2005 dengan realisasinya sebesar 13,1 point. Perbedaan yang cukup besar antara target dengan realisasi pada tahun 2005 disebabkan karena kemampuan nyata (riil) Jabar untuk meningkatkan Indeks Daya Beli per tahunnya selama periode 2000 - 2005 hanya sebesar 1,19 point sedangkan target menuntut per tahunnya harus meningkat 3,8 point atau sebesar 19,1 point selama periode 2000 - 2005. Kesenjangan (gap) antara kemampuan nyata untuk menambah Indeks Daya Beli dengan tuntutan target (3,8 point) dapat dikatakan sebagai tantangan pencapaian Indeks

Daya Beli. Masa depan cenderung makin berat karena tidak saja membawa "pekerjaan rumah" yang belum selesai, namun juga masih ditambah dengan pekerjaan yang cukup berat di masa akan datang (2006 - 2010) untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel. 4.19**  
**Target dan Realisasi IDB Tahun 2000-2005**

Tahun	Target IDB	Realisasi IDB
2000	53.2	53.22
2001	55.1	55.10
2002	65.6	58.09
2003	68.2	58.63
2004	70.2	58.83
2005	72.3	59.18
Pertambahan Indeks ( $\Sigma$ )	19.1	5.96
Pertambahan per tahun (X)	3.8	1.19

Dengan asumsi bahwa kemampuan nyata Jabar untuk meningkatkan Indeks Daya Beli per tahun hanya sebesar 1,19 point dan tidak ada kebijakan serta upaya khusus untuk lebih mempercepat pencapaian dan meningkatkan daya mampu Jabar di masa akan datang maka pencapaian target Indeks Daya Beli sebesar 83.6 baru akan tercapai pada tahun 2026 bukan 2010 atau sekitar 16 tahun atau sekitar 3 kali RPJM. Apabila target Indeks Daya Beli sebesar 83.6 harus tercapai pada tahun 2010, sedangkan pencapaian pada tahun 2005 baru sebesar 59.18 maka tuntutan penyelesaian sisa pekerjaan selama periode 2005 - 2010 adalah 24.4 point atau sebesar 4.08 point rata-rata setiap tahunnya. Dibandingkan dengan kemampuan atau kapasitas Jabar selama periode 2000 - 2005 hanya sebesar 1.19 point maka Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat Jabar harus meningkatkan kemampuannya secara akseleratif yaitu sebesar 4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya (dari 1.19 point per tahun menjadi 4.88 point per tahun. Untuk lebih jelasnya besaran target dengan revisinya selama periode 2005 - 2006 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel. 4.20**  
**Target dan Realisasi IDB Tahun 2005-2010**

Tahun	Target IDB	Revisi Target IDB
2005	59.18	-
2006	74.2	64.06
2007	76.3	68.94
2008	78.7	73.82
2009	81.1	78.70

2010	83.6	83.58
------	------	-------

## 2. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Untuk membantu memahami tantangan yang dihadapi di masa mendatang oleh Jawa Barat yang telah menetapkan Indeks Daya Beli pada tahun 2010 sebesar 83.6 sedangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan Indeks Daya Beli hanya sebesar 1.19 point per tahun padahal tuntutan target adalah 4.88 point per tahun maka pertanyaan yang harus dijawab untuk menghadapi tantangan tersebut adalah "Prasyarat apa saja yang harus ada agar target Indeks Daya Beli sebesar 83.6 dapat dicapai ?"

Pertama: Reformasi Kelembagaan (Institutional Reform) baik kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan ekonomi.

Kedua: Manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian peningkatan daya beli perlu di integrasikan di dalam satu pusat kewenangan dan pertanggung jawaban.

Ketiga: Kebijakan dan program/kegiatan yang mengarah dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli perlu difokuskan kepada pemberdayaan manusia pelaku usaha (pengusaha) terutama pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi.

Keempat: Kemampuan manusia perlu ditingkatkan agar produktivitasnya meningkat dan dapat berpartisipasi penuh dalam proses mencari dan memanfaatkan setiap peluang usaha dan peluang kerja agar mendapat penghasilan dan lapangan kerja.

Kelima: Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

Keenam: Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya (fisik, manusia dan alam) harus dapat diperbaharui agar terjadi keberlanjutan pembangunan.

Ketujuh: Keberpihakan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat dari persaingan pasar yang tidak adil dan tidak seimbang.

Kedelapan: Tersedianya data pokok untuk dapat mengukur keadaan dan perkembangan daya beli tidak hanya di tingkat propinsi tetapi juga di setiap kabupaten/kota minimal untuk tiap tahun, sebaiknya data pokok triwulanan.

Khusus untuk peningkatan daya beli perlu strategi akselerasi yang meliputi bidang non ekonomi yaitu : (1) Reformasi Kelembagaan, (2) Pusat Kewenangan Peningkatan Daya

Beli, (3) Pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah, (4) Peningkatan kemampuan manusia, (5) Menghilangkan hambatan-hambatan yang membatasi kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi, (6) Meningkatkan keberlanjutan pembangunan, (7) Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang diperlakukan tidak adil, (8) Penyediaan data pokok mengenai daya beli sedangkan untuk Pengembangan Ekonomi diperlukan peningkatan : (1) sektor pertanian, (2) sektor industri, (3) sektor jasa, (4) PDRB per kapita, (5) partisipasi angkatan kerja terutama wanita, (6) menurunkan angka pengangguran terbuka, (7) mengurangi pekerja berusaha sendiri, (8) mengurangi pekerja berusaha dibantu pekerja tidak tetap, (9) meningkatkan pekerja yang berusaha dengan buruh tetap, (10) meningkatkan buruh/karyawan.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan implikasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi perekonomian Jawa Barat di tahun 2007 kedepan, diantaranya adalah:

- Dengan adanya peningkatan pertumbuhan yang disertai dengan adanya peningkatan pada pengangguran dan kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi di Jawa Barat sebagai pertumbuhan yang "belum berkualitas" karena tidak dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.
- Oleh sebab itu perlu upaya yang keras dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menciptakan kesempatan kerja, terutama bagi golongan masyarakat bawah.
- Target peningkatan IPM (khususnya dari indeks daya beli) tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, oleh sebabnya pemerintah harus berusaha dengan keras menciptakan "institusi" yang dapat mendorong pihak swasta untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat bawah

## **V. Outlook 2007 of Foreign Trade and Policy**

Sebagai suatu perekonomian yang terbuka, dimana rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi 40 persen, perkembangan ekonomi makro Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia terutama negara-negara partner utama. Yang termasuk negara partner utama dalam hal ini adalah negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan maupun aliran modal dengan Indonesia. Oleh karenanya untuk dapat memperkirakan perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang sangatlah perlu untuk melihat dan menganalisis arah perkembangan ekonomi global khususnya negara-negara partner utama.

Perkembangan ekonomi global dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap negara partner utama Indonesia terlebih dahulu, sedangkan perkembangan dan kebijakan negara partner utama berpengaruh langsung baik melalui ekspor dan impor maupun melalui aliran modal.

### **1.1 Perkembangan ekonomi dan perdagangan global**

Menurut data WTO dan IMF, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,1 persen sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2004 (4,0 persen), sedangkan ekspor barang manufaktur secara riil mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 6 persen, turun cukup signifikan dari pertumbuhan pada tahun 2004 yang mencapai 9,5 persen. Impor dari negara-negara pengimpor minyak terbesar seperti Uni Eropa(25), Amerika Serikat dan Jepang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam impor mereka. Pertumbuhan impor mereka pada tahun 2005 kurang dari setengahnya dari pertumbuhan impor pada tahun 2004. Disamping itu walaupun ekonominya tumbuh dengan cukup tinggi, impor China juga mengalami penurunan dalam pertumbuhan. Baik Uni Eropa, AS, Jepang dan China tidak saja merupakan raksasa ekonomi dunia, tetapi juga negara-negara partner utama Indonesia dalam tujuan ekspor. Salah satu penyebab utama penurunan dalam impor mereka adalah meningkatnya harga minyak dunia, walaupun dampak tersebut tidak mendorong peningkatan harga separah yang terjadi pada tahun 1970-an. Namun demikian impor dari negara-negara sedang berkembang maupun Commonwealth of Independent States (CIS) masih mencatat pertumbuhan impor yang cukup tinggi di atas rata-rata bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor mereka. Dalam hal ekspor, China merupakan negara yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2005, mencapai 25 persen naik 1 persen poin dibandingkan tahun 2004.



Tabel 1. Pertumbuhan GDP dan Perdagangan Berdasarkan Wilayah, 2004-2005

	GDP		Exports		Imports	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
North America	4.1	3.4	8.0	6.0	10.5	6.5
United States	4.2	3.5	8.5	7.0	11.0	5.5
South and Central America <sup>a</sup>	6.8	4.9	12.5	10.0	18.5	14.0
Europe	2.3	1.7	7.0	3.5	7.0	3.0
European Union (25)	2.2	1.6	7.0	3.5	6.0	2.5
Commonwealth of Independent States	8.0	6.6	13.0	4.5	16.0	16.5
Africa and Middle East	5.7	4.5	7.0	7.5	13.5	12.0
Asia	4.2	4.2	14.0	9.5	14.0	7.5
China	10.1	9.9	24.0	25.0	21.5	11.5
Japan <sup>b</sup>	2.3	2.8	10.5	1.0	7.0	2.5
World	3.9	3.3	9.5	6.0	...	...

<sup>a</sup> Including the Caribbean.

<sup>b</sup> Trade volume data are based on Japan's customs statistics. National account data report a markedly stronger export and import growth in 2005.

Source: WTO.

Perubahan harga relatif berbagai komoditi dunia dalam dua tahun terakhir membawa dampak yang cukup signifikan terhadap nilai perdagangan dan pangsa pasar berbagai komoditi. Harga minyak dan logam meningkat sekitar 30 persen pada tahun 2005, sementara harga barang-barang pertanian dan barang manufaktur tidak mengalami peningkatan berarti bahkan cenderung stabil. Tingkat harga barang-barang secara umum mengalami peningkatan yang moderat namun masih lebih rendah dibandingkan peningkatan pada tahun sebelumnya. Berbagai perkembangan tersebut menyebabkan pangsa pasar nilai ekspor minyak mengalami peningkatan, khususnya dibandingkan nilai ekspor barang pertanian.

Dari sisi nilai, ekspor barang mengalami peningkatan sebesar 13 persen pada tahun 2005 dan mencapai angka 10 triliun dolar. Meningkatnya harga minyak menyebabkan penerimaan ekspor negara-negara Afrika, CIS dan Timur Tengah mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2005, Afrika dan Timur Tengah memperoleh pangsa terbesarnya dalam ekspor sejak pertengahan 1980-an. Eropa sebagai wilayah yang terbesar dalam perdagangan mengalami pertumbuhan ekspor maupun impor yang paling rendah pada tahun 2005. Pertumbuhan nilai perdagangan Amerika Utara mengalami penurunan secara moderat. Sementara itu pertumbuhan perdagangan di wilayah Asia melebihi pertumbuhan rata-rata dunia. China merupakan negara Asia yang tumbuh paling cepat selama ini.

## 1.2. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia

Posisi Indonesia dalam konteks hubungan ekonomi internasional dapat dilihat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan sistematis tentang transaksi ekonomi penduduk

Indonesia dengan penduduk negara lain dalam kurun waktu satu tahun. Ada dua rekening utama dalam neraca pembayaran yang menunjukkan posisi Indonesia dalam hal daya saing dalam ekonomi internasional yaitu neraca riil ekspor barang dan jasa (transaksi berjalan) dan neraca keuangan (transaksi modal dan keuangan). Jumlah dari kedua rekening tersebut merupakan prestasi neto Indonesia dengan penduduk negara lain yang kemudian menentukan posisi cadangan devisa Indonesia.

Secara umum, ada perkembangan yang cukup menarik tentang neraca pembayaran Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2004 jumlah transaksi berjalan mengalami surplus sebesar 1,564 milyar dollar. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi hanya sebesar 340 juta dollar. Namun demikian pada semester pertama tahun 2006, transaksi berjalan mengalami kenaikan yang cukup pesat menjadi 4,544 milyar dollar. Tentu saja perubahan ini cukup menggembirakan ditinjau dari peningkatan kemampuan daya saing produk barang maupun jasa Indonesia. Namun demikian di sisi lain ada perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Dalam neraca modal dan keuangan, Indonesia mengalami penurunan daya tarik dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2004 neraca ini mengalami surplus sebesar 1,852 milyar dollar, namun pada tahun 2005 angka ini justru menjadi defisit sebesar 2,579 milyar dollar, dan pada semester pertama 2006 mengalami defisit sebesar 471 juta dollar. Secara keseluruhan setelah dimasukkan selisih perhitungan bersih, walaupun ada penurunan dalam neraca modal dan keuangan, posisi neraca pembayaran Indonesia mengalami perbaikan; dari surplus sebesar 309 juta dollar pada tahun 2004 kemudian menjadi surplus sebesar 444 juta dollar dan 9,165 milyar dollar masing-masing pada tahun 2005 dan semester pertama 2006. Kenaikan surplus neraca pembayaran pada semester pertama 2006 tersebut tentu saja mampu menaikkan posisi cadangan devisa Indonesia secara signifikan yang saat ini mencapai 40,107 milyar dollar.

Apabila diperhatikan, posisi dan struktur neraca pembayaran Indonesia sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti, terutama dalam transaksi berjalan. Selama ini neraca perdagangan selalu mengalami surplus mengimbangi neraca jasa yang selalu defisit. Defisitnya neraca jasa banyak dipengaruhi oleh banyaknya penggunaan faktor produksi asing terutama dalam hal pembayaran bunga utang, repatriasi keuntungan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan juga banyaknya penggunaan jasa asing baik dalam transportasi maupun jasa lainnya. Keadaan ini sudah terjadi selama lebih dari 35 tahun dan menunjukkan bahwa dalam hal jasa, Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat dalam konteks internasional. Walaupun kita banyak mengeksport barang, namun untuk mengangkutnya ke luar negeri masih banyak menggunakan jasa perusahaan asing. Ditambah lagi daya saing faktor produksi modal dan tenaga profesional dimana Indonesia selama ini masih banyak mengandalkan modal dari luar negeri yang pada akhirnya memerlukan balas jasa yang cukup besar.

Perubahan yang signifikan terjadi pada sisi neraca modal dan keuangan. Secara tradisional, rekening ini terdiri dari dua jenis transaksi yaitu transaksi modal jangka pendek (portofolio) dan transaksi jangka panjang (investasi langsung). Jika periode sebelum krisis ekonomi transaksi modal dalam bentuk investasi asing langsung sangat dominan, maka dalam lima tahun terakhir yang lebih dominan adalah transaksi modal jangka pendek. Transaksi modal jangka pendek sangat mudah berubah, terutama jika terjadi perubahan ekspektasi di pasar modal dan keuangan Indonesia, sehingga sangat rentan terhadap perubahan. Sementara itu, transaksi modal dalam bentuk investasi langsung merupakan transaksi modal jangka panjang yang sebenarnya diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di masa yang akan datang sehingga mampu lebih memperkuat ekspor di masa yang akan datang.

**Tabel 2. Neraca Pembayaran 2004-2006 (juta USD/millions of USD)**

Uraian	2004	2005	2006-QI	2006-QII
I. TRANSAKSI BERJALAN	1,564	340	2,564	1,980
A. Barang, bersih (Neraca perdagangan)	20,152	22,323	8,733	8,683
1. Ekspor, fob 1)	70,767	86,179	23,146	25,274
2. Impor, fob 2)	-50,615	-63,856	-14,413	-16,591
B. Jasa-jasa, bersih	-8,811	-10,792	-3,298	-3,226
C. Pendapatan, bersih	-10,917	-12,447	-3,248	-3,608
D. Transfer berjalan, bersih	1,139	1,257	378	131
II. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL	1,852	-2,579	537	-911
A. TRANSAKSI MODAL	-	333	41	56
B. TRANSAKSI FINANSIAL	1,852	-2,913	496	-967
1. Investasi langsung	-1,512	3,042	-171	-137
a. Ke luar negeri, bersih	-3,408	-3,065	-655	-628
b. Di Indonesia (FDI), bersih	1,896	6,107	484	491
2. Investasi portofolio	4,409	4,236	3,710	-1,222
a. Aset, bersih	353	-1,080	-392	-471
b. Kewajiban, bersih	4,056	5,316	4,102	-751
3. Investasi lainnya	-1,045	-10,190	-3,043	392
a. Aset, bersih	985	-8,646	-1,456	1,861
b. Kewajiban, bersih 3)	-2,030	-1,544	-1,587	-1,469
III. JUMLAH (I + II)	3,415	-2,239	3,101	1,069
IV. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH	-3,106	2,684	2,685	2,310
V. NERACA KESELURUHAN (III + IV)	309	444	5,786	3,379
VI. CADANGAN DEvisa DAN YANG TERKAIT 4)	-309	-444	-5,786	-3,379
a. Perubahan cadangan devisa	674	663	-5,359	354
b. Pinjaman IMF	-983	-1,107	-427	-3,733
Penaarikan	0	0	0	0
Pembayaran	-983	-1,107	-427	-3,733
Memorandum:	0	0	0	0
Posisi cadangan devisa 5)	36,320	34,724	40,082	40,107
Transaksi berjalan (% GDP)	0.6	0.1	0.0	0.0
Rasio pembayaran utang (%) 6)	27.1	22.1	24.9	34.3
a.l. Sektor terkait pemerintah dan otoritas moneter	10.4	7.0	10.2	21.6

1) Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line 1) Since May 2004 part of the reporting method of non oil & gas export has been changed into on-line-system 2) Sejak bulan April 2004 sebagian metode pelaporan impor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line 2) Since April 2004 part of the reporting method of non oil & gas import has been changed into on-line-system 3) Tidak termasuk pinjaman IMF 3) Excluding the use of Fund credit and loans

4) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit. Sejak kuartal pertama 2004, perubahan cadangan devisa 4) Negative represents surplus and positive represents deficit. Since the first quarter of 2004, untuk data realisasi hanya mencakup data transaksi. changes in reserve assets only cover data on changes due to transaction.

5) Sejak 1998, posisi cadangan devisa berdasarkan konsep aktiva luar negeri bruto menggantikan konsep 5) Based on Gross Foreign Asset concept replacing Official Reserve concept since 1998 and cadangan devisa resmi. Sejak 2000, posisi cadangan devisa memakai konsep International Reserve and based on International Reserve and Foreign Currency Liquidity (IRFCL) concept since 2000 Foreign Currency Liquidity (IRFCL)

6) Perbandingan antara pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap ekspor barang dan jasa 6) Ratio of

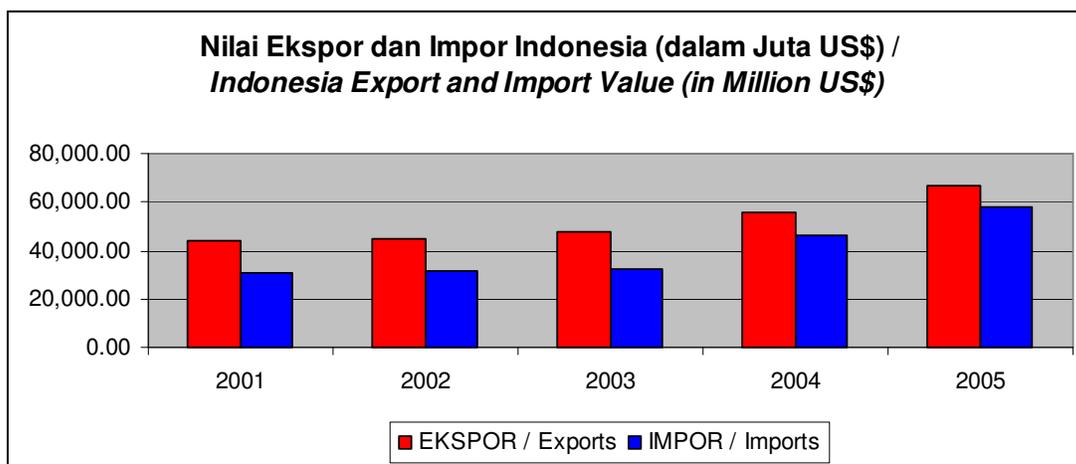
external debt service payments to export of goods and services.

Sumber: Bank Indonesia

Rendahnya investasi asing langsung di Indonesia memang cukup mengkhawatirkan, selain menunjukkan kurangnya daya tarik investasi asing di Indonesia dalam jangka panjang dapat juga menurunkan daya saing relatif komoditi Indonesia di pasar internasional. Hal ini disebabkan selain pada umumnya investasi asing banyak ditujukan untuk memperkuat ekspor, meningkatnya investasi asing ke negara lain yang merupakan pesaing Indonesia seperti China, VietNam maupun negara berkembang lainnya akan memperkuat daya saing produk mereka yang bersaing di pasar internasional maupun yang nantinya masuk ke pasar domestik Indonesia.

### 1.3. Trend perdagangan internasional Indonesia dalam 5 tahun terakhir

Data Departemen Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa secara rata-rata, antara tahun 2001 dan 2005, ekspor Indonesia meningkat sebesar 11,12 % sedangkan impor tumbuh lebih besar yaitu mencapai 17,84%. Namun demikian, neraca perdagangan internasional Indonesia masih terus menunjukkan surplus perdagangan (gambar 1). Walaupun cukup tinggi, pertumbuhan ekspor Indonesia tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekspor dunia yang meningkat sebesar 13 persen, apalagi dibandingkan negara China yang mencapai 25 persen.



Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Selanjutnya pada tabel 1 menunjukkan total nilai ekspor pada periode Januari-Juni 2006 mencapai 36.503,40 juta Dolar Amerika,

yaitu tumbuh sebesar 14,37 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2005. Pada sisi lain, hal menggembirakan diindikasikan oleh pertumbuhan impor yang relatif kecil yang hanya mencapai 1,64%.

Tabel 3. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia 2005-2006

URAIAN / <i>Description</i>	Jan-Jun 2005	Jan-Jun 2006	Perubahan / Change (%) 2005-2006
EKSPOR / <i>Exports</i>	31,918.00	36,503.40	14.37
IMPOR / <i>Imports</i>	28,463.30	28,928.80	1.64

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

### Ekspor Berdasarkan Kelompok Industri

Nilai ekspor Indonesia menunjukkan angka yang cukup baik antara tahun 2001-2005. Tabel berikut menunjukkan data ekspor non migas utama Indonesia.

Tabel 4. Perkembangan Ekspor Berdasarkan Industri

SEKTOR / <i>Sector</i>	2001	2002	2003	2004	2005	Trend (%)
	(Juta US\$/Million US\$)					2001- 2005
PERTANIAN / <i>Agriculture</i>	2,438.50	2,568.30	2,526.10	2,496.20	2,880.20	3.09
PERTAMBANGAN / <i>Mining</i>	3,569.60	3,743.70	3,995.60	4,761.40	7,946.80	20.21
INDUSTRI / <i>Industry</i>	37,671.10	38,729.60	40,879.90	48,677.30	55,593.60	10.59
SEKTOR LAINNYA / <i>Other sector</i>	5.4	4.5	5.2	4.4	7.8	7.34
Total	43,684.60	45,046.10	47,406.80	55,939.30	66,428.40	11.12

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Dari tabel terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekspor non migas antara tahun 2001-2005 mencapai 11,12 persen. Ekspor sektor pertambangan berkontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia diikuti oleh sektor industri dan komoditi sektor lainnya serta terakhir diikuti oleh sektor pertanian. Tingginya pertumbuhan ekspor pertambangan nampaknya sejalan dengan perkembangan di tingkat internasional yang dipicu oleh meningkatnya harga barang-barang tambang non-migas

Tabel 5. Kontribusi Berbagai Industri Dalam Nilai Ekspor, 2005-2006

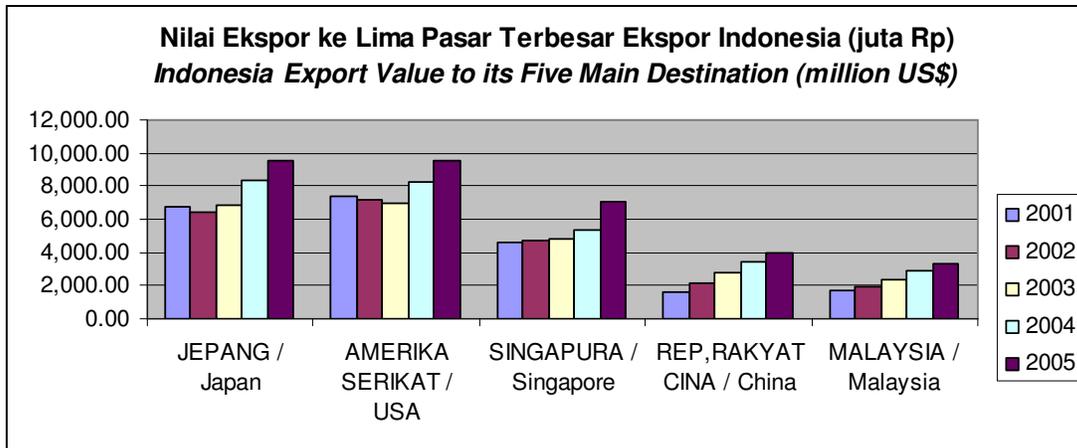
SEKTOR / Sector	Kontribusi / Share (%)	Kontribusi / Share (%)	Jan-Jun	Jan-Jun	Perubahan / Change (%)
	2005	2006	2005	2006	2005-2006
PERTANIAN / Agriculture	4.34	4.28	1,351.10	1,560.90	15.53
PERTAMBANGAN / Mining	11.96	12.62	3,452.80	4,608.10	33.46
INDUSTRI / Industry	83.69	83.09	27,109.50	30,331.00	11.88
SEKTOR LAINNYA / Other sector	0.01	0.01	4.6	3.3	-27.89
Total	100	100	31,918.00	36,503.40	14.37

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Data pada tabel 5 menunjukkan semakin pentingnya peranan ekspor komoditas sektor pertambangan bagi ekspor non migas Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kontribusi komoditas sektor ini terhadap total ekspor non migas Indonesia dari 11,96% pada 2005 menjadi 12,62 % pada tahun 2006. Selanjutnya, total nilai ekspor sektor pertambangan pada periode Januari-Juni 2006 mencapai 4.608,10 juta Dolar Amerika, yaitu tumbuh sebesar 33,46 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2005. Kenaikan signifikan ekspor Indonesia pada sektor pertambangan dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya permintaan dunia pada komoditas-komoditas dalam sektor ini seperti batu bara dan biji tembaga. Namun yang utama karena adanya peningkatan tingkat harga dunia untuk barang-barang logam.

### **Pangsa Pasar Berdasarkan Negara Tujuan**

Pasar ekspor terbesar Indonesia relatif tidak mengalami pergeseran setelah tahun 2000 dibandingkan tahun 1980 dan 1990an. Lima Negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia berturut-turut adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Republik Rakyat China dan Malaysia (lihat gambar berikut)



Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Namun, di antara lima negara tujuan ekspor di atas, dari tahun ke tahun peranan pasar China menjadi sangat penting bagi ekspor Indonesia (table 6). Rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke China mencapai 25,54 % antara tahun 2001-2005. Hal ini berlanjut hingga tahun 2006. Perbandingan antara Januari hingga Juni 2005 dengan Januari hingga Juni 2006, ekspor Indonesia meningkat sangat signifikan dibandingkan empat negara lainnya yang mencapai 30,53%. Selanjutnya, peranan Malaysia sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia juga menunjukkan hal yang sama terutama bila membandingkan data Januari-Juni 2005 dengan Januari-Juni 2006. Pertumbuhan ekspor ke Malaysia dalam kurun waktu tersebut mencapai 23,24%.

Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Tujuan Utama dan Perkembangannya

NO	NEGARA / Countries	Peran / Share (%) 2001	Peran / Share (%) 2005	Peran / Share (%) 2006	Rata-rata pertumbuhan/ Average Growth (%) 2001-2005	Jan-Jun 2005	Jan-Jun 2006	Perubahan / Change (%) 2005-2006
1	JEPANG / Japan	15.35	14.39	14.58	10.24	4,736.90	5,321.60	12.34
2	AMERIKA SERIKAT / USA	16.81	14.31	14.15	6.83	4,630.60	5,164.80	11.54
3	SINGAPURA / Singapore	10.65	10.64	10.22	10.24	3,539.30	3,731.50	5.43
4	REP, RAKYAT CINA / China	3.64	5.96	6.62	25.54	1,851.40	2,416.70	30.53
5	MALAYSIA / Malaysia	3.85	4.98	5.22	19.23	1,545.40	1,904.60	23.24

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

### Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang

Impor bahan baku penolong masih menyumbang porsi terbesar impor Indonesia (table 7). Antara tahun 2001-2005, rata-rata kontribusi impor bahan baku penolong terhadap total impor Indonesia mencapai 77,68%, jauh di atas rata-rata dua jenis barang lainnya, yaitu barang modal (14,20%) dan barang konsumsi (8,13%).

Tabel 7. Komposisi Impor Indonesia 2001-2005

SEKTOR / Sector	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata / Average	Kontribusi rata-rata / Average share (%)
	(Juta US\$ / Million US\$)					2001-2005	2001-2005
BARANG KONSUMSI / Consumption Goods	2,251.20	2,650.50	2,862.80	3,786.50	4,620.40	3,234.28	8.13
BAHAN BAKU PENOLONG / Raw Materials	23,879.40	24,227.50	25,496.30	36,204.20	44,792.00	30,919.88	77.68
BARANG MODAL / Capital Goods	4,831.50	4,410.90	4,191.60	6,533.80	8,288.40	5,651.24	14.20
<b>TOTAL</b>	<b>30,962.10</b>	<b>31,288.90</b>	<b>32,550.70</b>	<b>46,524.50</b>	<b>57,700.90</b>	<b>39,805.42</b>	

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Komposisi impor Indonesia-pun tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun 2005 hingga 2006 yang masih didominasi oleh impor bahan baku penolong diikuti oleh barang modal dan barang konsumsi. Perbandingan antara Januari hingga Juni 2005 dengan Januari hingga Juni 2006, impor bahan baku relatif mengalami

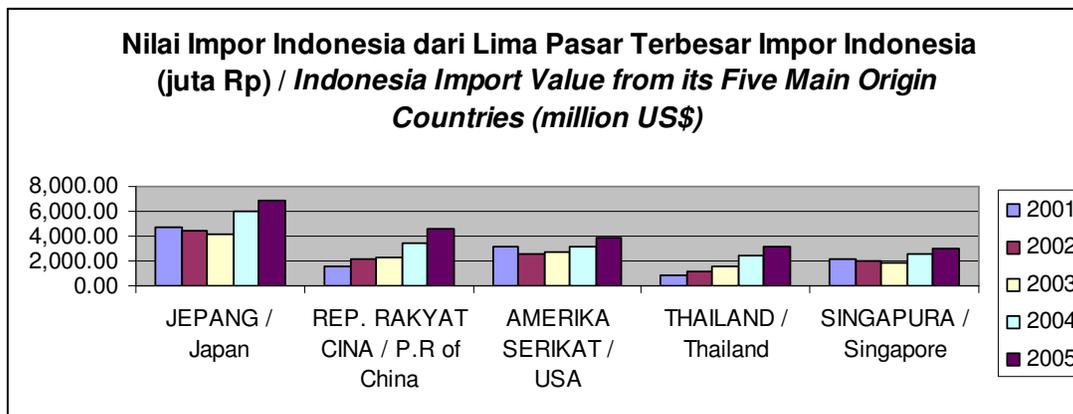
pertumbuhan yang kecil dibandingkan jenis barang lainnya (table 8).

Tabel 8. Perkembangan Komposisi Impor 2001-2006

SEKTOR / Sector	Rata-rata / Average 2001-2004	Kontribusi rata-rata / Average share 2001-2004	Perubahan Rata-rata / Average Change (%) 2001-2005	Kontribusi / Share 2005	Jan-Jun 2005	Jan-Jun 2006	Perubahan / Change (%) 2005-2006
BARANG KONSUMSI	2,887.75	8.17%	19.66	8.01	2,162.30	2,247.00	3.92
BAHAN BAKU PENOLONG	27,451.85	77.70%	18.05	77.63	22,254.80	22,316.90	0.28
BARANG MODAL	4,991.95	14.13%	15.86	14.36	4,046.30	4,365.00	7.88
TOTAL	35,331.55		17.84		28,463.30	28,928.80	1.64

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Mirip dengan negara-negara tujuan ekspor Indonesia, negara asal barang-barang impor Indonesia masih menunjukkan trend yang tidak berubah antara tahun 2001-2005 (gambar). Negara-negara tersebut berturut-turut adalah Jepang, Republik Rakyat China, Amerika Serikat, Thailand dan Singapura.



Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

Kontribusi China dan Thailand terhadap impor Indonesia meningkat signifikan antara tahun 2001-2005 (tabel). Hal ini dikarenakan ekspansi perekonomian China serta bangkitnya Thailand dari krisis tahun 1997. Namun demikian, perbandingan antara Januari hingga Juni 2005 dengan Januari hingga Juni 2006, impor dari dua negara ini, China dan Thailand, mengalami penurunan masing-masing 1,47% (China) dan (11,11%). Pada periode yang sama, impor dari Jepang turun sebesar 28,73%, sedangkan dari Amerika Serikat dan Singapura masih mengalami pertumbuhan.



Tabel 9. Perkembangan Impor Berdasarkan negara Asal, 2001-2006

NEGARA	Perubahan Rata-rata / Average Change (%)	Perubahan / Change (%)	Kontribusi / Share (%)	Jan-Jun	Jan-Jun	Perubahan / Change (%)	Kontribusi / Share (%)
	2001-2005	2004-2005	2005	2005	2006	2005-2006	) 2006
JEPANG / Japan	11.6	13.86	17.13	3,629.20	2,586.60	-28.73	13
REP. RAKYAT CINA / P.R of China	30.4	35.52	11.31	2,376.10	2,341.00	-1.47	11.77
AMERIKA SERIKAT / USA	5.5	21.03	9.47	1,895.60	1,976.30	4.26	9.94
THAILAND / Thailand	37.9	30.38	7.66	1,674.80	1,488.70	-11.11	7.48
SINGAPURA / Singapore	9.2	16.2	7.3	1,511.10	1,707.90	13.02	8.59

Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perdagangan

## BAGIAN II

### ARAH KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA

#### ISU-ISU PENTING

##### PERCEPATAN PEMBENTUKAN BADAN EKSPOR IMPOR INDONESIA

Pada tahun 2006 pemerintah telah membuat keputusan untuk melakukan percepatan pembentukan Badan Ekspor Impor Indonesia, dengan embrionya Bank Ekspor Indonesia. Tujuan dari pendirian badan ini adalah untuk menyediakan kredit investasi berjangka menengah panjang dengan suku bunga yang murah. Pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh DPR-nya pun akan lebih diprioritaskan pada tahun 2007 dengan menaikkan urutan pembahasan RUU tersebut dari nomor 212 menjadi urutan ketujuh. Namun demikian, beberapa masalah klasik masih mungkin terjadi berkaitan dengan pembentukan badan ini. Pertama, mengingat pembahasan RUU di DPR yang seringkali berjalan sangat alot, pembentukan Badan Ekspor Impor Indonesia paling cepat baru dapat terwujud pada tahun 2008 sehingga target peningkatan ekspor Indonesia melalui pembentukan badan ini masih belum dapat diwujudkan pada tahun 2007. Masalah kedua adalah berkaitan dengan keefektifan badan ini dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

##### KEBIJAKAN RESTITUSI PAJAK BAGI EKSPORTIR

Untuk meningkatkan ekspor Indonesia, pemerintah membuat suatu kebijakan yang diharapkan dapat merangsang perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspor. Salah satunya adalah kebijakan restitusi pajak bagi para eksportir. Namun sejak 2005 hingga 2006, PPN yang telah dibayarkan oleh para perusahaan eksportir belum dikembalikan oleh pemerintah. Lagi-lagi kita melihat adanya ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Penuggaan pembayaran restitusi pajak bagi eksportir sejak 2005 menjadi pukulan telak bagi dunia usaha karena banyak

dari perusahaan eksportir yang bisa dikatakan bergantung kepada uang yang diterima dari restitusi pajak tersebut. Sebagai contoh, sebagai akibat penunggakan pembayaran restitusi pajak ini, setidaknya sepertiga cashflow perusahaan-perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tidak dapat digulirkan untuk produksi yang berdampak pada penurunan produksi, bahkan bukan tidak mungkin tutupnya beberapa perusahaan tekstil di Bandung juga sebagai akibat terlambatnya restitusi pajak. Di saat perbankan tidak dapat lagi mengucurkan kredit kepada perusahaan tekstil, restitusi pajak menjadi andalan untuk menjamainya amannya cashflow perusahaan-perusahaan ini.

### **CLOSING REMARKS**

Telaahan outlook 2007 menyiratkan harapan dan kekhawatiran. Diantara hal-hal positif yang bisa diharapkan untuk terjadi ditahun mendatang diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang tetap terjaga, pasar modal yang berkembang, dan nilai tukar yang stabil. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar ... yang adalah lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2006 yang sebesar ... Inflasi tahun depan diperkirakan akan menurun menjadi hanya sebesar ... dari perkiraan inflasi tahun 2006 yang sebesar ... Inovasi pada instrumen keuangan pasar modal telah mempercepat terjadinya "financial deepening". Disertai dengan terus meningkatnya IHSG, hal ini telah membuat pasar modal semakin prospektif. Ekspektasi nilai tukar, khususnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, pada tahun 2007 diperkirakan akan tetap stabil, yaitu di bawah Rp. 9.500,- per 1 US Dollar.

Di lain pihak, masalah pengangguran, kemiskinan, dan investasi asing langsung, masih akan menjadi kendala yang dapat mengganjal proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran terbuka yang saat ini diperkirakan sebesar 10,26% pada tahun mendatang diperkirakan tidak akan berkurang secara signifikan, dan akan sangat sulit untuk mencapai target pengangguran terbuka di bawah 10% tanpa adanya kebijakan pengurangan yang progresif. Gambaran yang senada terjadi juga untuk pengangguran terselubung yang saat ini mencapai 30%. Jumlah penduduk miskin yang di tahun 2006 mencapai 36.05 juta pada tahun mendatang diperkirakan tidak akan berkurang secara signifikan. Melihat pada gambaran estimasi kondisi, maka pemerintah perlu menciptakan pertumbuhan yang dapat menurunkan kemiskinan (*pro-poor growth*) dan pada saat yang sama juga bisa menciptakan kesempatan kerja yang memadai (*pro-employment growth*). Pada tataran makro, stabilitas ekonomi makro saat ini merupakan suatu kondisi yang perlu (*necessary*) tetapi belum merupakan kondisi yang cukup (*sufficient*) dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan. Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja diperlukan revitalisasi dan investasi sektor-sektor ekonomi terpilih. Revitalisasi tersebut tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pada industri

padat karya, UKM dan industri berpotensi ekspor. Langkah-langkah tersebut merupakan landasan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal yang seluas-luasnya dan mendukung upaya perpindahan pekerja dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Hal ini perlu didukung oleh regulasi pasar kerja yang lebih fleksibel berkaitan dengan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan serta PHK, dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja.

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa dilakukan dengan perbaikan pelayanan sektor pendidikan formal dan informal termasuk pelatihan-pelatihan serta melakukan perbaikan pelayanan kesehatan. Peningkatan SDM ini sangat penting karena tingkat pendidikan dan keahlian dari angkatan kerja adalah salah satu variabel utama yang menentukan kemampuan rakyat miskin untuk bisa merasakan manfaat dari proses pertumbuhan dan terintegrasi ke dalamnya. Pada akhirnya hal ini akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pada saat yang sama akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Jika yang menjadi perhatian utama adalah percepatan pengentasan kemiskinan, maka fokus pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek sektoral dan lokasi. Salah satu cara paling efektif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan tersebut adalah dengan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian di pedesaan dan sektor jasa di perkotaan.